

**SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA BERDASARKAN
PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN**

RINGKASAN DISERTASI

Penelitian ini dibiayai oleh LPDP RI
Nomor: PRJ-651/LPDP.4/2019



Oleh :
Auliya Khasanofa
NIM : R 200 160 003

KOMPOSISI PROMOTOR:

Promotor: Prof. Dr. Absori, S.H., M. Hum.
Ko-Promotor: Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M. Hum
Ko-Promotor: Dr. Kelik Wardiono, S.H., M. Hum.

**PROGRAM DOKTOR (S-3) ILMU HUKUM
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

Abstrak

Perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia idealnya sesuai dengan konsep permusyawaratan perwakilan yang sesuai dengan falsafah negara, bukan mengarah kepada pada konsep demokrasi liberal, seperti yang tercermin dalam perubahan pasal UUD 1945 khususnya yang terkait dengan pemilihan presiden langsung yang telah menjauhkannya dari salah satu sila Pancasila. Pemilihan presiden langsung dengan mentranplantasi sistem demokrasi liberal melahirkan pertentangan terhadap prinsip sila keempat Pancasila “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan.” Sistem pemilihan presiden tersebut terbukti jauh dari konsep permusyawaratan perwakilan yang mencerminkan gotong-royong bukan individualistis. Pascaamandemen UUD NRI Tahun 1945 sistem pemilihan presiden diubah melalui Pasal 6 A bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Implikasi amandemen ini berdampak pada prinsip dasar yang diatur dalam UUD 1945 yang dirumuskan oleh para pembentuk) konstitusi. Pemilihan Presiden langsung secara perlahan meninggalkan prinsip Pancasila yang merupakan idiologi negara. Permasalahan yang diajukan dalam disertasi: *pertama*, bagaimana karakteristik sistem pemilihan presiden berdasarkan permusyawaratan perwakilan dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia? *Kedua*, bagaimana konsep pemilihan presiden berdasarkan permusyawaratan perwakilan yang berkarakter keindonesiaan?. Metode penulisan yang digunakan adalah doktriner. Simpulan penelitian ini adalah merekonstruksi karakteristik permusyawaratan perwakilan dalam sistem pemilihan presiden Indonesia dalam sejarah ketatanegaraan dengan lima aspek permusyawaratan perwakilan yakni kesepakatan, kebersamaan, keterbukaan, kekeluargaan dan keterwakilan serta konsep sistem pemilihan yang berkarakter keindonesiaan dengan kelima aspek permusyawaratan perwakilan dengan sistem pemilihan presiden tidak langsung melalui MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Kata Kunci : Sistem Pemilihan Presiden, Permusyawaratan Perwakilan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem ketatanegaraan menunjuk pada pembentukan fungsi-fungsi lembaga, baik pembagian kewenangan dan pengaturan batas-batas di antara jabatan satu dengan yang lain, maupun hubungan antara pejabat dan warga negara. Ketiga fungsi pembentukan, pembagian dan pengaturan tersebut merupakan fungsi-fungsi yang mengoperasikan sebuah sistem ketatanegaraan berdasarkan norma-norma, aturan-aturan konstitusi serta prinsip-prinsip konstitusionalisme dan negara hukum yang terkandung dalam konstitusi. Konstitusi dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar (UUD) di Indonesia.¹

Salah satu yang mengalami perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia mengenai sistem pemilihan umum dalam sistem presidensial.² Pemilihan umum adalah perwujudan kedaulatan rakyat dan sarana menyebarkan keinginan rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 yang asli mengatur asas dan sistemnya yaitu kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila, dan menjelaskan demokrasi dalam sistem kedaulatannya. Ini adalah musyawarah yang dipimpin oleh kebijaksanaan, dan kebijaksanaan dipimpin oleh perwakilan. Dalam konstitusi asli tahun 1945, pemilihan umum bertujuan untuk memilih wakil rakyat di legislatif, bukan presiden. Pada saat yang sama, presiden dipilih oleh wakil rakyat di MPR. Kemudian, presiden dipilih melalui MPR berdasarkan musyawarah, bukan dipilih langsung oleh rakyat yang disebut sistem pemilihan presiden menggunakan permusyawaratan perwakilan. Sistem pemilihan presiden berdasarkan permusyawaratan perwakilan dasarnya kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan melakukan musyawarah yang representatif sesuai dengan "Sila Keempat Pancasila".

Sistem pemilihan presiden berdasarkan permusyawaratan perwakilan yang ada di Indonesia meskipun terlihat ciri sistem pemerintahan parlementer karena kepala pemerintahannya dipilih oleh suatu lembaga negara yang dikenal dengan MPR menjadi pembeda dengan sistem pemilihan presiden di berbagai negara yang pelaksanaannya seperti terlihat dalam tabel 1.

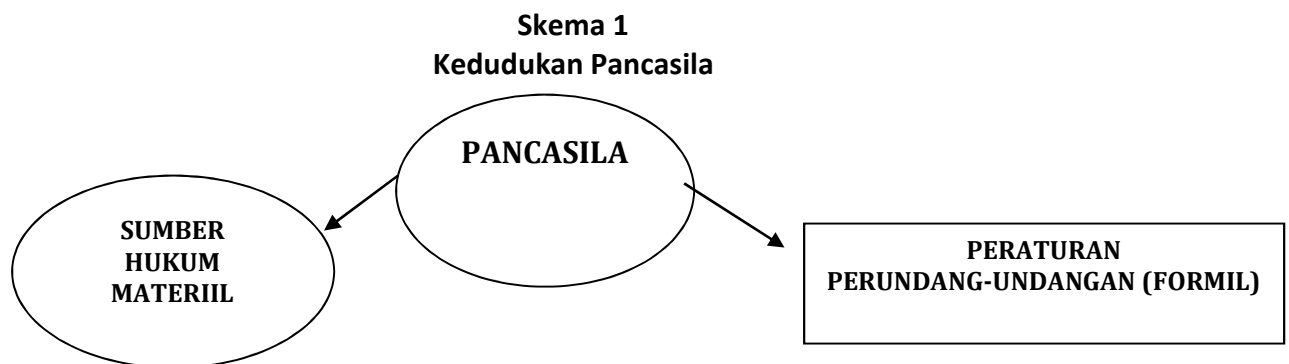
Tabel 1
Sistem Pemilihan Presiden di Berbagai Negara

¹ Pada dasarnya, jika kita berbicara tentang negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya, tidak mungkin kita memisahkan antara berbicara tentang konstitusi sebagai dasar negara dan kehidupannya. Galibya Modern (Galibnya) abad ke-20 merumuskan aturan dasar penyelenggaraan negara sebagai konstitusinya atau UUD. Menurut Yusril, dimasukkannya aturan-aturan dasar ketatanegaraan dalam konstitusi, bukan detailnya, disengaja dan bukan merupakan pembiaran oleh para perumus konstitusi. Para perumus konstitusi pada umumnya sadar bahwa masyarakat di negaranya dinamis dan akan berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, hubungan masyarakat dengan konstitusi merupakan hubungan yang interaktif. Di satu sisi UUD memberikan landasan atau kerangka bagi persoalan-persoalan pokok dalam penyelenggaraan negara, di sisi lain pemahaman tentang UUD juga dipengaruhi oleh perkembangan sosial. Yusril Ihza Mahendra, *"Dinamika Tata Negara Indonesia, Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian"* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 18; Udiyo Basuki, *"Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Amanat Reformasi dan Demokrasi,"* Jurnal Panggung Hukum, Vol. 1, No. 1, Januari 2015, hlm. 2.

No.	Negara	Sistem Pemerintahan	Sistem Pemilihan Presiden
1.	Argentina	Presidensial	Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung dua ronde. Pemenang 45% atau 40% plus selisih 10% menang pada pertama
2.	India	Parlementer	Presiden dipilih oleh semua anggota legislatif pusat, negara dan ibu kota
3.	Italia	Parlementer	Presiden dipilih oleh kedua dewan legislatif
4.	Afrika Selatan	Parlementer	Presiden dipilih oleh dewan legislatif pusat yang lebih rendah
5.	Amerika Serikat	Presidensial	Pemilih dan masing-masing negara memilih secara langsung

Sumber: Andrew Ellis, *Pembagian dalam Berbagai Tingkatan Kekuatan Legislatif dan Eksekutif*.³

Pancasila sebagai segala sumber hukum Indonesia baik itu sumber hukum materil atau berdasarkan urutan peraturan perundang-undangan, hal ini dapat dilihat pada skema 1.



Sumber : Anis Ibrahim

Berdasarkan rumusan Sila Keempat Pancasila yang bersumber dari nilai keislaman dan tradisi bernegara sebelum Indonesia merdeka sebagai dasar permusyawaratan perwakilan terdapat hakikat yang mengandung unsur-unsur dalam sistem pemilihan presiden sebagai berikut.

1. Kesepakatan
2. Kebersamaan
3. Kekeluargaan
4. Keterbukaan
5. Keterwakilan

Amandemen UUD NRI Tahun 1945 Pasal 6A telah mengubah sistem pemilihan Presiden yang dirumuskan dan terdapat dalam naskah asli UUD 1945. Amandemen UUD

³ Ikhar Nusa Bhakti dan Riza Sihbudi, *Kontroversi Negara Federal* (Mizan, Bandung: 2002) hlm. 89

1945 meninggalkan pemikiran yang diperjuangkan para pendiri negara dalam merumuskan naskah asli UUD 1945 salah satunya mengenai sistem pemilihan Presiden yang bercorak asli Indonesia berbasis ideologi khususnya sila keempat Pancasila. Amandemen UUD 1945 yang memantulkan pola dominasi paham konstitusional *liberal* yang seringkali menimbulkan komplikasi dalam pelaksanaannya karena bertabrakan dengan tradisi bernegara.⁴

Sistem pemilihan presiden langsung menghilangkan tradisi bernegara di Indonesia sehingga terjadi komplikasi sistem yang tidak sesuai dengan kultur Indonesia. Sistem pemilihan presiden langsung ternyata mengambil dari pelaksanaan sistem pemilihan presiden langsung di Amerika. Padahal terdapat tradisi bernegara salah satu yang bisa dijadikan rujukan misalnya sistem pemilihan pemimpin yang ada dalam Kesultanan Buton di Sulawesi Tenggara dengan mekanisme mengarah kepada permusyawaratan perwakilan melalui lembaga permusyawaratan untuk memilih Sultan dengan tidak melihat garis keturunannya⁵ diatur dalam Undang-Undang Kesultanan yang bernama *Murtabat Tujuh*.⁶

Model pemilihan kepemimpinan salah satunya di Buton, Banten dan Sunda menjadi dasar pemikiran pendiri negara dalam merumuskan Sila Keempat Pancasila dan pasal mengenai sistem pemilihan presiden dalam UUD 1945. Sistem pemilihan Presiden yang dihasilkan pasca amandemen secara subjektif menafsirkan Sila Keempat Pancasila dan meninggalkan tradisi bernegara di Indonesia ini terbukti menimbulkan kerusakan ketatanegaraan. Tragedi kemanusiaan yang terjadi dalam pemilu serentak lima kotak pada tahun 2019 dengan jatuhnya banyak korban jiwa dan sakit dalam penyelenggaraan salah satunya pemilihan presiden langsung. Menurut data dari KPU RI yang sakit dan meninggal dunia saat menjalankan tugas di Pemilu serentak 2019 yakni petugas badan

⁴ Aidul Fitriciada Azhari, *Menemukan Demokrasi*, (Muhammadiyah University Press Universitas Muhammadiyah Surakarta, Solo: 2005), hlm. 141-144

⁵ Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap negara memiliki bentuk dan sistem pemerintahan yang sistemnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan negara. Demikian halnya dengan Kesultanan Buton Sulawesi Tenggara, bentuk dan sistem pemerintahannya berpedoman pada *Murtabat Tujuh Sara Wolio* yang di dalam praktik pemerintahannya terdapat unsur demokrasi. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Sultan yang dipilih oleh lembaga *Siolimbona* (legislatif). Sistem pemeritahan Kesultanan Buton menggunakan sistem presidensial Sultan bertindak langsung sebagai kepala negara dan kepala pemeritahan, serta bentuk pemerintahan menggunakan monarki konstitusional, dalam praktik penyelenggaraan pemeritahannya terdapat unsur demokrasi. Lihat Muh. Ide Apurines, *Pratik Pemerintahan Pada Kesulanan Buton Tahun 1540-1960 Masehi* dalam <https://www.academia.edu>, diakses pada 10 Desember 2017.

⁶ Prinsip sistem ketatanegaraan yang terdapat pada nilai-nilai hukum Undang Undang *Murtabat Tujuh* yang disusun oleh LaElangi, menganut paham pemisahan kekuasaan yang terdiri dari, eksekutif (*sultan*), legislatif (*siolimbona*), dan yudikatif (*kinepulu*). Hak-hak politik Sultan diawasi langsung oleh *siolimbona*, sehingga sultan dalam bertindak dan mengambil kebijakan harus melalui suatu mekanisme, yaitu persetujuan pangka atau aparat kesultanan dan persetujuan dari *siolimbona*, sebagaimana yang tercantum pada pasal 1, 3 dan 4 UU *Murtabat Tujuh*. Bersamaan dengan itu pola rekrutmen kepemimpinanpun dilakukan melalui sistem perwakilan, dimana masyarakat menyalurkan aspirasinya pada dewan *siolimbona* sebagai wakil rakyat atau legislatif. Selain itu pengangkatan seorang pejabat harus memenuhi syarat pasal 3, 5, dan 6 UU *Murtabat Tujuh*. Lihat Abdul Rahim Yunus, *Islamic Mysticism in the Buton Sultanate, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara Province, during the 19th century* (Indonesin-Netherlands Cooperation on Islamic Studies, Jakarta: 1995), p. 33.

ad hoc yang sakit berjumlah 5.175 orang dan yang meninggal dunia berjumlah lebih 886 orang. Biaya pemilu yang sangat tinggi mahal yang luar biasa menguras uang negara dengan total anggaran yang dihabiskan sebesar Rp. 25.160.104.754.980.

Pendidikan politik dan demokrasi yang diperoleh masyarakat bukanlah pendidikan yang baik dan bermoral, melainkan justru pendidikan yang tidak sehat, salah satunya pemilihan presiden langsung diharapkan memunculkan pemimpin yang berkualitas namun kenyataannya malah sebaliknya, karena sistem ini memunculkan cara kapitalis yang transaksional sehingga tidak akan terjadi hubungan yang sinergis antara rakyat dengan presiden terpilih. Presiden yang dihasilkan oleh sistem pemilihan secara langsung tidak akan bertanggung jawab terhadap rakyat karena mereka merasa telah membeli suara rakyat dan rakyat tidak bisa melakukan kontrol sosial karena mereka sudah menggadaikan idealismenya. Fenomena ini jelas bertentangan dengan Pancasila dan sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pelaksanaan pemilihan Presiden langsung pasca amandemen yang berdasarkan Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945 pada masa reformasi terbukti menimbulkan problematika. Selain bertentangan dengan Pancasila khususnya Sila Keempat serta menghilangkan tradisi bernegara Indonesia terbukti sistem pemilihan presiden langsung pada masa reformasi menciptakan pemborosan keuangan negara dan inefisiensi penyelenggaraan negara. Sistem pemilihan presiden langsung menimbulkan kerusakan sistem ketatanegaraan dan menjadi sumber problematika dalam kehidupan berbangsa serta bernegara.

B. Fokus Studi dan Rumusan Masalah

Dalam upaya mengkaji sistem pemilihan presiden Indonesia perlu dipetakan dengan menggunakan teori *imamah* yaitu dengan menghadirkan karakteristik sistem pemilihan berdasarkan aspek permusyawaratan perwakilan dan teori *originalism* yaitu prinsip penafsiran yang mencoba untuk mencari tahu atau maksud berdasarkan makna asli dari perumus konstitusi mengenai konsep sistem pemilihan Presiden yang sesuai dengan karakteristik keindonesiaan. Dengan amandemen pada masa reformasi menjadikan perubahan sistem pemilihan presiden langsung yang mengarah kepada liberalisme dengan mentranplantasi sistem pemilihan presiden di Amerika Serikat sebagai asumsi dasar, meninggalkan permusyawaratan perwakilan maka dalam penelitian ini dengan menggunakan teori *imamah*, *originalism* dan permusyawaratan perwakilan dapat merumuskan mengenai sistem pemilihan presiden berdasarkan permusyawaratan perwakilan yang berkarakter keindonesiaan.

Berdasarkan latar belakang dan fokus studi dalam penelitian ini maka dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana karakteristik sistem pemilihan presiden berdasarkan permusyawaratan perwakilan dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimana konsep sistem pemilihan presiden berdasarkan permusyawaratan perwakilan yang sesuai dengan karakteristik keindonesiaan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan karakteristik permusyawaratan perwakilan sistem pemilihan presiden berdasarkan permusyawaratan perwakilan dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia.
2. Untuk mengeksplorasi konsep sistem pemilihan presiden berdasarkan permusyawaratan perwakilan yang sesuai dengan karakter keindonesiaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan karakteristik permusyawaratan perwakilan dalam tradisi pemilihan presiden di Indonesia.
 - b. Mengembangkan studi ilmiah tentang permusyawaratan perwakilan dalam sistem pemilihan Presiden yang berkarakter keindonesiaan.
 - c. Hasil studi ini diharapkan menjadi salah satu pijakan referensi untuk memperkaya kepustakaan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum tata negara mengenai konsep sistem pemilihan presiden berdasarkan permusyawaratan perwakilan di Indonesia serta penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktis
 - a. Dengan mengembangkan karakteristik permusyawaratan perwakilan dalam sistem pemilihan presiden Indonesia menambah wawasan dan pengalaman menemukan konsep pemilihan presiden yang berkarakter keindonesiaan.
 - b. Dengan mengembangkan sistem pemilihan presiden Indonesia berdasarkan permusyawaratan perwakilan, diharapkan memberikan pemahaman yang lebih utuh di dalam mempelajari dan mengembangkan hukum tata negara khususnya studi tentang Hukum Tata Negara dan Konstitusi.
 - c. Konsep pengakomodasian permusyawaratan perwakilan dalam sistem pemilihan presiden yang berkarakter keindonesiaan menjadi pedoman bagi akademisi yang mendalami Hukum Tata Negara dan pemegang kekuasaan legislatif dan eksekutif di Indonesia untuk membentuk dan menjalankan sistem pemilihan presiden dengan baik dan benar.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini merupakan penelitian *doktrinal*. Menurut Soetandyo Wingjosoebroto penelitian hukum *doktrinal* terdiri atas penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif, penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif dan usaha penemuan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.⁷

Penelitian *doktrinal* yang digunakan dalam disertasi ini memfokuskan kepada penemuan hukum *dogmatik* terutama dilakukan untuk meneliti hukum dalam

⁷ Soetandyo Wingjosoebroto, *Penelitian Hukum: Sebuah Tipologi*, Majalah Masyarakat Indonesia, Tahun I, No. 2, 1974, hlm. 5

pengertian ilmu hukum sebagai ilmu tentang kaidah atau apabila hukum dipandang sebagai sebuah kaidah yang perumusannya secara otonom tanpa dikaitkan dengan masyarakat. Penelitian hukum *dogmatik* sangat erat kaitannya dengan metode penelitian yang dipergunakan dalam filsafat.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum.⁸ Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang digunakan yaitu *statute approach*, *philosophical approach*, *conceptual approach*, *analytical approach*, *comparative approach*, *historical approach*, dan *case approach*.⁹ Merujuk pendekatan dalam penelitian hukum, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), filosofis (*philosophical approach*), konseptual (*conceptual approach*) dan sejarah (*historical approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), digunakan untuk meneliti, mendalami dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan mengenai sistem pemilihan presiden.¹⁰ Dalam hal ini menjelaskan sistem pemilihan presiden sebelum perubahan UUD 1945 hingga pasca amandemen.

Pendekatan filosofis (*philosophical approach*) digunakan untuk meneliti, mendalami dan menelaah berbagai pemikiran perumus awal UUD yang asli. Pendekatan filosofis digunakan untuk mendalami rumusan sistem pemilihan presiden. Pendalaman ini perlu dilakukan untuk mengetahui dasar permusyawaratan perwakilan dalam sistem pemilihan presiden di Indonesia.

Pendekatan historis (*historical approach*) dilakukan untuk melacak sejarah hukum dari waktu ke waktu mengenai sistem pemilihan kepemimpinan dalam tradisi bernegara di Indonesia khususnya di Kesultanan Buton di Sulawesi Tenggara, Kerajaan Sunda dan Kesultanan Kebantenan. Pendekatan historis dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menelusuri sejarah perkembangan sistem pemilihan presiden untuk menelusuri praktik ketatanegaraan yang berkembang mengenai permusyawaratan perwakilan pra dan pasca kemerdekaan.¹¹

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan dalam penelitian untuk mendalami sistem pemilihan presiden dengan tujuan mengetahui konsep karakter permusyawaratan perwakilan dalam tradisi pemilihan pemimpin di Indonesia dari tradisi bernegara di Indonesia yakni Kesultanan Buton di Sulawesi Tenggara Kerajaan Sunda dan Kesultanan Kebantenan kemudian rumusan asli Oendang-Oendang Dasar ketika

⁸ F. Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum* (CV Ganda, Yogyakarta: 2007), hlm. 29

⁹ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia* (PT Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2010), hlm. 12

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bayumedia Publishing, Malang: 2006), hlm. 302

¹¹ Penyelidikan sejarah bagi Van Apeldorn memiliki dua fungsi: 1) Penyelidikan sejarah memiliki sifat membebaskan: ia membebaskan kita dari prasangka-prasangka, ia menyebabkan bahwa kita tidak begitu saja menerima yang ada sebagai demikian, tetapi menghadapinya dengan kritis dan 2) Penyelidikan sejarah membuat kita mengenal faktor-faktor sosial. Lihat Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Noordhoff-kolff N.V, Jakarta: 1959), hlm. 339.

disahkan pertama kali pada tanggal 18 Agustus 1945 kemudian konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 serta UUD 1945 pasca amandemen.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial. Untuk menyelesaikan isu mengenai masalah hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, peneliti memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum. Soerjono Soekanto menyebutkan penelitian semacam ini dengan studi pustaka disebutnya sebagai penelitian normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan meneliti bahan-bahan pustaka berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹²

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan yang menelaah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Berikut bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini.

1. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen
2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949
3. Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950
4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
5. Kitab *Murtabat Tujuh*

Bahan dari kitab yang menjadi tradisi bernegara masuk kedalam bahan hukum primer dalam penelitian normatif. Selain itu digunakan pula bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa rancangan undang-undang, dokumen-dokumen hukum serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya, serta bahan hukum tersier adalah bahan hukum lain yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti hasil penelitian, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lain yang sifatnya karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini menggunakan studi kepustakaan yang diawali dengan kegiatan penelusuran norma dasar, peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi.¹³ Jika sumber hukum yang relevan diperoleh selengkap mungkin, kegiatan dilanjutkan dengan pengkajian terhadap relevansi dan dampak dari pemberlakuan sumber hukum.¹⁴

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-14, Jakarta: 2012), hlm. 13-14

¹³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, Jakarta: 2009), hlm. 109.

¹⁴ Hal-hal utama yang perlu diperhatikan adalah: (1) proses analisis terhadap norma dasar dan peraturan perundang-undangan yang dianggap relevan dengan objek penelitian; (2) proses analisis terhadap putusan-putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tentang perkara sejenis dengan perkara yang sedang dihadapi; (3) proses analisis terhadap dokumen-dokumen, kontrak-kontrak yang

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mengumpulkan, mengkaji, dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang menyangkut bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian kepustakaan (*library research*).¹⁵

Kajian kepustakaan dilakukan dalam rangka pengumpulan data dilakukan untuk memperdalam pemahaman terhadap permasalahan dengan menggunakan literatur baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, naskah ilmiah, jurnal, laporan penelitian, arsip laporan, internet terbitan berkala maupun luar negeri, dokumen-dokumen yang relevan dan lain-lain. Analisis penelitian menggunakan proses berfikir deduktif (berdasarkan proses silogisme).

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara interpretasi secara logis, sistematis dan konsisten melalui penelaan data secara mendalam. Dari data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini, baik yang berupa data primer maupun data sekunder dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Data-data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dianalisis secara normatif kualitatif.¹⁶

Setelah data terkumpul, dilakukan analisis data dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memaparkan sekaligus untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada. Karena itu, peneliti dapat menarik simpulan yang jelas dan benar untuk menjawab persoalan yang diajukan. Setelah data diolah, kemudian dianalisis secara deskriptif analitis untuk memperoleh gambaran secara sistematis dan objektif tentang fakta-fakta, ciri-ciri serta hubungan yang membentuk sistem pemilihan presiden berdasarkan permusyawaratan perwakilan,¹⁷ kemudian dikonstruksikan dalam suatu simpulan yang tepat sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

6. Alur Penelitian

Dalam penelitian, alur penelitian adalah proses untuk mencapai hasil penelitian tersebut. Adapun dalam alur penelitiannya ini digambarkan dalam skema 2.

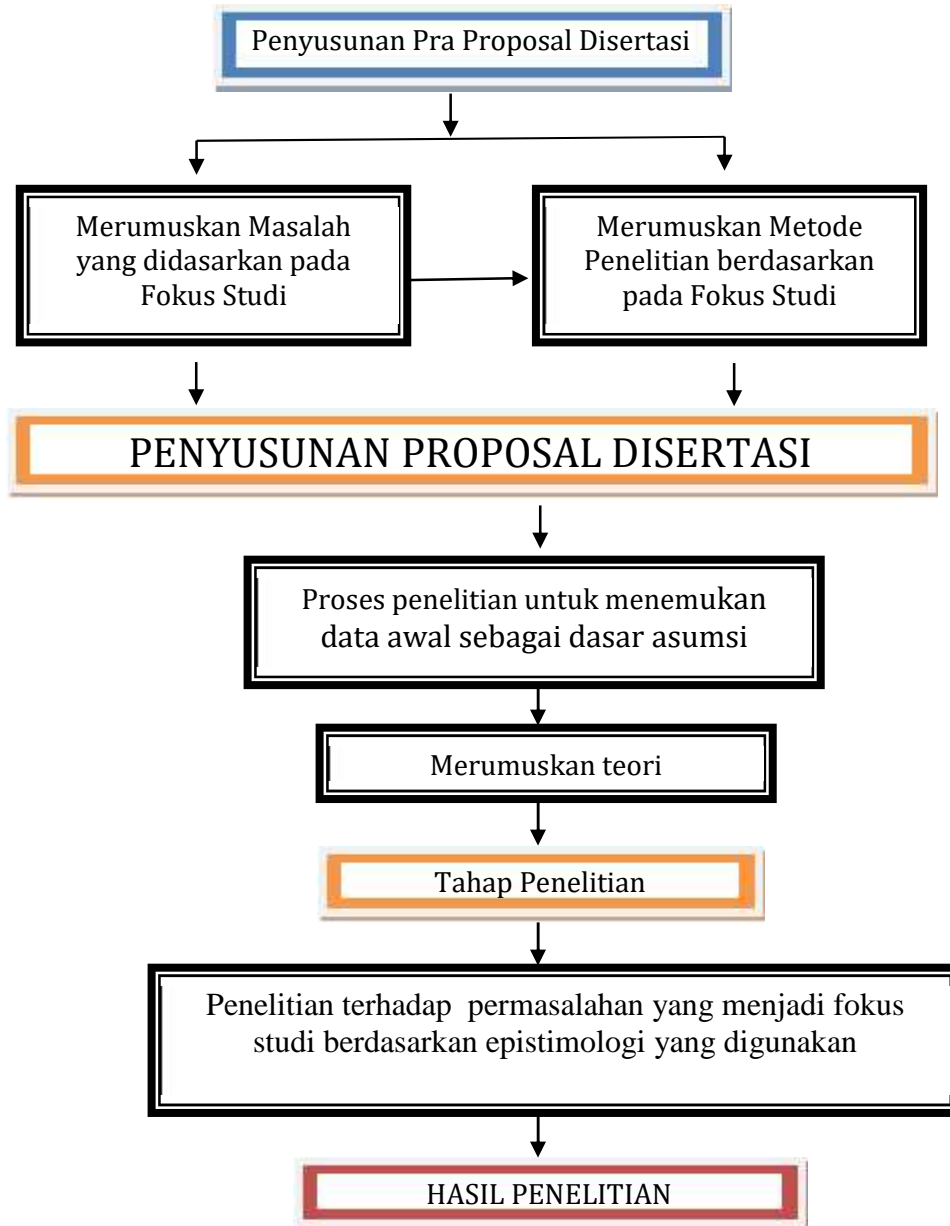
berisi hak dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak yang berperkara; (4) berdasarkan poin 1, 2, dan 3 akan muncul pendapat hukum atau *legal opinion*. Pendapat hukum adalah hasil analisis, pandangan, kesimpulan serta rekomendasi yang dibuat oleh penyusun memorandum hukum yang dihadapinya, ditinjau berdasarkan hukum positif untuk menentukan sikap dari pembuat legal memorandum; (5) kesimpulan dan rekomendasi. Lihat Soedjono Dirdjosisworo, *Memorandum Hukum* (Ghalia Indonesia Jakarta, 2002), hlm. 43

¹⁵ Nazir, *Metode Penelitian* (Ghalia Indonesia, Jakarta: 2003), hlm. 234.

¹⁶ Analisis data berdasarkan data yang telah diolah dengan cara melakukan sistematisasi dan klasifikasi terhadap data-data tertulis tersebut. Tujuannya untuk memudahkan pekerjaan analisis. Selain itu perlu dilakukan analisis terhadap *content* atau semua data yang dikumpulkan baik primer, dan sekunder untuk mengetahui validitasnya. Lihat Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 252-254.

¹⁷ B. Arief Sidharta, *Pengantar Logika Sebuah Langkah Penalaran Medan Telaah*, (Refika Aditama, Bandung: 2008), hlm. 9.

Skema 2
Alur Penelitian



7. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian disertasi ini beranjak dari teori *imamah* yang disampaikan oleh Al Mawardi. Menurut Al Mawardi, cara pemilihan pemimpin menggunakan dua pola, yaitu pemilihan yang dilakukan oleh *ahl al-hall wa al-aqd* dan penunjukan atau wasiat dari imam, khalifah atau raja sebelumnya. Al Mawardi menyampaikan dua hal penting.

1. *Ahl al-Ikhtiar* (para pemilih). Tidak semua orang berhak melakukan pemilihan atas imam. Imam hanya dipilih oleh wakil-wakil rakyat dengan memiliki syarat-syarat tertentu, seperti bersifat adil, mengetahui syarat-syarat khalifah, dan memiliki kesanggupan untuk menentukan dengan bijaksana siapa yang berhak menjadi khalifah dari calon-calon yang ada. Wakil-wakil rakyat ini disebut *ahl al-hall wa al-aqd* (orang-orang yang mempunyai wewenang untuk memecahkan masalah dan menetapkan keputusan). Begitu pentingnya kewenangan *ahl al-hall wa al-aqd*, maka Mawardi menetapkan beberapa syarat menjadi *ahl al-Ikhtiar*, yaitu: (1) memiliki sikap adil; (2) memiliki ilmu pengetahuan yang mampu mengetahui siapa yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai imam; dan (3) memiliki wawasan yang luas dan kearifan dalam memilih siapa yang paling tepat untuk menjadi imam dan mampu mengelola kepentingan umat di antara mereka yang memenuhi syarat untuk jabatan itu.¹⁸
2. *Ahl al-Imamah* (yang berhak dipilih). Imam atau khalifah harus memenuhi tujuh kriteria; (1) memiliki sifat adil dengan segala persyaratannya, (2) memiliki ilmu pengetahuan yang memadai untuk berijtihad dalam masalah hukum dan pengelolaannya, (3) sehat mental, (4) sehat fisik, (5) berwawasan luas untuk mengatur kehidupan dan kepentingan umat, dan (6) memiliki keberanian dan ketegasan untuk melindungi rakyat dan menumpas musuh, dan (7) keturunan Kuraisy, karena telah ditetapkan oleh nas dan ijmak sebagaimana disabdakan, "*al-A'immah min Quraisy*", yang artinya: "Para pemimpin harus dari keturunan Kuraisy" (HR. al-Bukhari dan Muslim).¹⁹

¹⁸ Imam Al Mawardi, Al-Ahkam As Sulthaniyyah, "*Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*" (Bekasi, Darul Falah: 2013) h. 6.

¹⁹ Dengan adanya pemilihan dan persyaratan yang cukup ketat dalam pengangkatan calon imam maka tentu berkonsekuensi pada kemungkinan adanya pemakzulan atau pemecatan seorang Imam jika sudah menyimpang dari kriteria dari seorang pemimpin. Di sinilah pentingnya adanya perjanjian Imam dengan umat sebagai komitmen untuk menjalankan kewajibannya dengan tulus dan ikhlas. Bagi umat, perjanjian itu mengandung arti bahwa mereka akan mematuhi dan mendukung khalifah atau Imam. Jika kepatuhan umat itu hilang yang disebabkan imam melanggar perjanjiannya dengan umat maka kekhalifahannya juga akan hilang hingga terjadi pemakzulan/pemecatan Imam. Menurut Imam al-Mawardi, kehilangan kekhalifahan dapat terjadi apabila (1) khalifah atau imam kehilangan sifat adil, memperturutkan hawa nafsu, dan melakukan kemungkaran; (2) khalifah atau imam kehilangan kesehatan mental atau fisik (misalnya kehilangan akal, penglihatan, rasa, dan penciuman); *Ibid*, hlm. 6-17

Teori *imamah* dihadirkan untuk menjadi alat analisis menguraikan karakteristik sistem pemilihan Presiden berdasarkan permusyawaratan perwakilan dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia yang telah mengalami perubahan ditinjau dari perkembangan konstitusinya dan dinamika ketatanegaraannya. Dalam UUD 1945 sebelum amandemen mekanisme pemilihannya terdapat dalam Pasal 6 ayat (2) berbunyi: “Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak”. Sistem pemilihan Presiden dalam naskah asli UUD 1945 melalui MPR dengan prinsip permusyawaratan perwakilan, tidak dipilih langsung oleh rakyat (*indirect*). Inilah yang dinamakan sistem perwakilan berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sesuai dengan sila keempat dari Pancasila yang berasal dari tradisi bernegara di Indonesia. Dalam sistem pemilihan Presiden ini terdapat pertanggungjawaban yang jelas karena Presiden merupakan mandataris MPR dan bertanggungjawab kepada MPR.

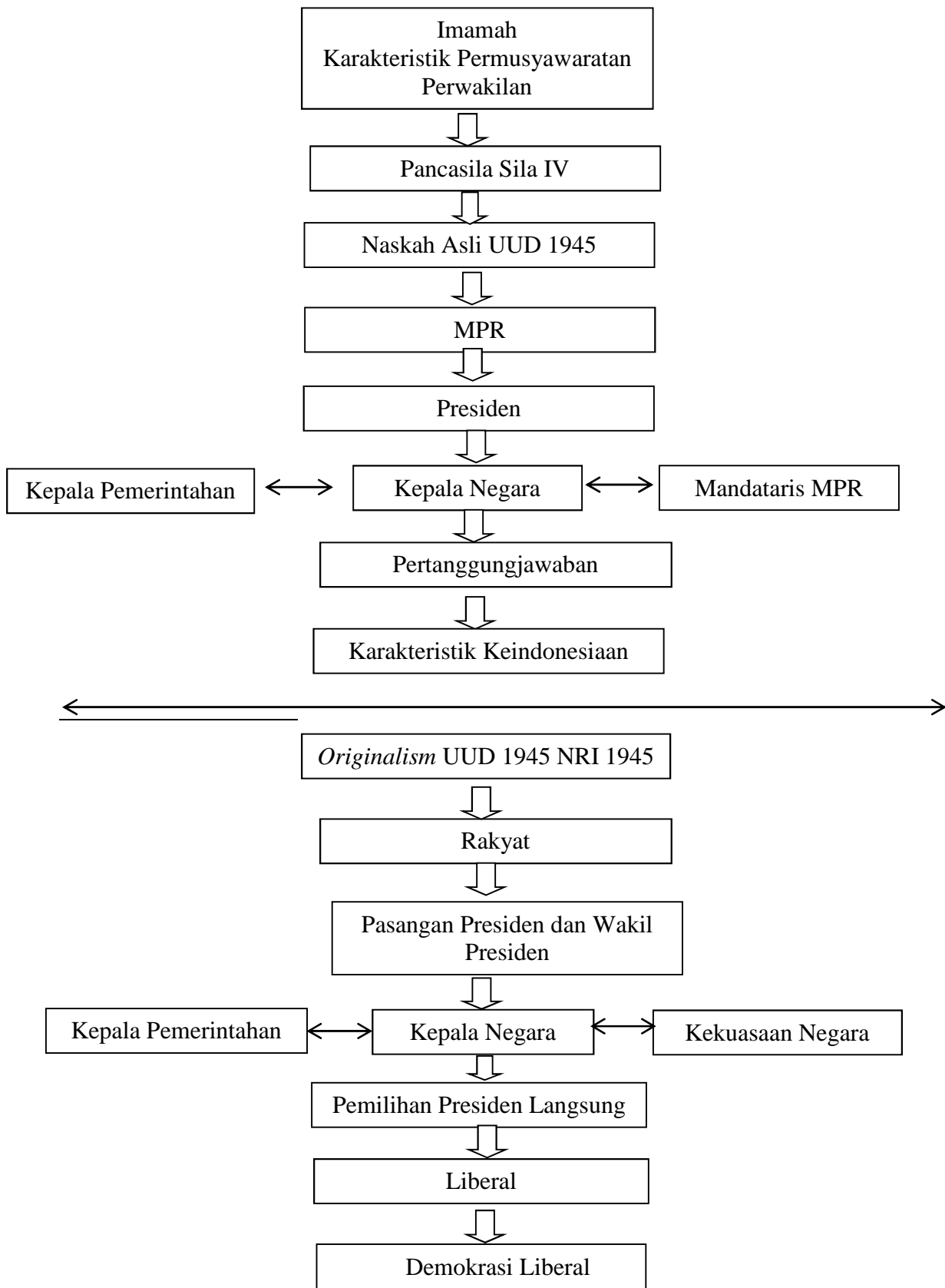
Pasca amandemen sistem pemilihan presiden menggunakan mekanisme langsung oleh rakyat melalui pemilihan presiden langsung yang diterapkan di Indonesia terjadi karena adanya perubahan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 6A ayat (1). Pasal tersebut berbunyi: “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat” (perubahan ketiga). Mekanisme pertanggungjawabannya ketika pemilihan presiden selanjutnya dengan opsi jika kembali mencalonkan sebagai pasangan presiden dan wakil presiden dipilih kembali atau tidak dipilih. Sistem pemilihan presiden langsung mengarah kepada demokrasi *liberal* ala Amerika Serikat.

Teori selanjutnya yakni *originalism* dari Antonin Scalia dalam kerangka konsepsional. Menurut Scalia teori *originalism* merupakan suatu penafsiran bukan konstruksi. *Originalism* memberikan jawaban terhadap suatu ketentuan konstitusi secara spesifik dari kejadian tertentu atau apabila terjadinya kontroversi pemahaman konstitusi, makna dari teks konstitusi atau dari maksud perumus awal teks konstitusi.²⁰ Amandemen yang telah dilaksanakan pasca masa reformasi yakni pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002 telah meninggalkan perumus asli naskah UUD 1945 dengan mentranplantasi sistem pemilihan Barat yakni Amerika Serikat dengan sistem pemilihan presiden langsung. Teori *originalism* menjadi alat untuk menguraikan analisis terhadap sistem pemilihan presiden pasca amandemen yang mengarahkan kepada liberal.

Konsep pemilihan presiden berdasarkan permusyawaratan perwakilan yang berkarakter keindonesiaan beranjak dari teori permusyawaratan perwakilan yang disampaikan oleh M. Yamin. Tradisi bernegara dan nilai keislaman yang menghadirkan permusyawaratan perwakilan menjadi kekhasan Indonesia yang tertuang dalam sila keempat Pancasila. MPR yang menjadi pembeda dari sistem Barat merupakan dekolonisasi dari penjajah menjadi lembaga yang berawal dari pemikiran pendiri Negara dan menjadi landasan dalam perumusan naskah asli UUD 1945 sebagai lembaga tertinggi Negara yang diberikan kewenangan memilih presiden.

²⁰ Antonin Scalia & Bryan A. Garner, *Reading Law: The Interpretation of Legal Texts*, (Thomson/West, United States of America: 2012), p. 1

Skema 3





F. Definisi Konsepsional dan Operasional

1. Sistem Pemilihan Presiden

Definisi Sistem pemilihan presiden adalah mekanisme yang mengatur dan memungkinkan warga negara memilih para calon presiden. Dalam pemilihan presiden seluruh pemilihan pasangan calon yang akan duduk di jabatan presiden dan wakil presiden berdasarkan konstitusi sebagai landasan utama dan undang-undang lainnya yang lebih terperinci.²¹ Sistem pemilihan presiden dibagi menjadi langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*)

2. Permusyawaratan Perwakilan

Permusyawaratan perwakilan bersumber dari Islam dan tradisi bernegara Indonesia. Ketika masa Khalifah Umar Ibn Khatthab dikenal pemerintahan Islam dengan mekanisme pemilihan khalifah dengan *Asy Asyura* atau *Ahl Halli Wal Aqdi* yaitu musyawarah beberapa sahabat senior untuk menentukan kebijakan negara dan untuk mengangkat *khalifah*, walaupun dalam bentuk yang belum terlembagakan secara tersendiri.²²

Perwakilan kemudian dikenal dengan pembentukan lembaga *Majelis Asy Syura* atau *Ahl Halli Wal Aqdi* yang pertama sekali dalam sejarah Islam yaitu pada masa pemerintah *Bani Umayyah II* di Spanyol yaitu pada masa *Khalifah Al Hakam II* (961-976 M). Pada saat itu anggota dari *Ahl Halli Wal Aqdi* terdiri atas pembesar-pembesar negara dan sebagian lagi pemuka masyarakat, dan yang bertindak sebagai ketua adalah langsung oleh *Khalifah*. Kedudukan anggota *Majelis Asy Syura* ini setingkat dengan pemerintah. Lembaga ini melakukan musyawarah dalam masalah-masalah hukum dan membantu *khalifah* menjalankan pemerintahan negara. Permusyawaratan perwakilan kemudian diikuti praktik ketatanegaraan sebelum Indonesia merdeka menjadi tradisi bernegara yang menjadi salah satu dasar perumusan UUD 1945 terkait sistem pemilihan presiden di Indonesia.

3. Karakteristik

Karakteristik menurut kamus bahasa Indonesia artinya bersifat khusus dan menjadi ciri dari sesuatu.²³ Karakteristik yang dimaksud tidak mengarah kepada sifat manusia. Karakteristik harus dimiliki oleh bangsa karena bangsa berasal dari perasaan

²¹ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu* (Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UGM, Yogyakarta: 2009) hlm. 28

²² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Gaya Media Pertama, Jakarta: 2001), hlm. 138.

²³ Lihat <https://id.wiktionary.org/wiki/karakteristik>, diakses pada 17 Januari 2021

senasib dan sepenanggungan yang sama untuk mengembangkan sikap sesuai dengan nilai-nilai yang disepakati bersama.

Karakteristik dalam penelitian ini berkaitan dengan kekhususan dan menjadi ciri dari pelaksanaan sistem pemilihan presiden dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Sesuatu yang mempunyai kekhasan yang menjadi ciri dari sistem pemilihan presiden dari suatu negara.

4. Berkarakter Keindonesiaan

Berkarakter Keindonesiaan memiliki definisi komitmen dan keseriusan bangsa Indonesia menyesuaikan kehidupannya dengan tradisi bernegara dan amanat UUD 1945, yang menempatkan hukum di atas manusia, bahkan di atas pembuat hukum itu sendiri, maka hukum sepatutnya melandasi seluruh kehidupan manusia Indonesia.²⁴

Berkarakter keindonesiaan berarti sesuai tradisi bernegara hadir sebelum Indonesia yang dipengaruhi oleh nilai keislaman hingga menjadi dasar negara yakni Pancasila. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum dan cita hukum bangsa Indonesia.

5. Liberalisme

Liberalisme, adalah sebuah istilah asing yang diambil dari bahasa Inggris, yang berarti kebebasan. Kata ini kembali kepada kata "*liberty*" dalam bahasa Inggrisnya, atau "*liberte*" menurut bahasa Perancis, yang bermakna bebas. Istilah ini datang dari Eropa. Para peneliti, baik mereka ataupun selainnya berselisih dalam mendefinisikan pemikiran ini. Namun seluruh definisi, kembali kepada pengertian kebebasan dalam pandangan Barat. *The World Book Encyclopedia* menuliskan pembahasan liberalism, bahwa istilah ini dianggap masih samar, karena pengertian dan pendukung-pendukungnya berubah dalam bentuk tertentu dengan berlalunya waktu.

Sulaiman al-Khirasyi menyebutkan, liberalisme adalah madzhab pemikiran yang memperhatikan kebebasan individu. Madzhab ini memandang, wajibnya menghormati kemerdekaan individu, serta berkeyakinan bahwa tugas pokok pemerintah ialah menjaga dan melindungi kebebasan rakyat, seperti kebebasan berfikir, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan kepemilikan pribadi, kebebasan individu, dan sejenisnya. Asas Pemikiran Liberal Secara umum asas liberalisme ada tiga, yaitu kebebasan, individualisme, rasionalis (*'aqlani*, mendewakan akal).

6. Kapitalisme

Kapitalisme mempertahankan kebebasan manusia yang terdiri atas kebebasan, berakidah, berpendapat, hak milik, dan kebebasan pribadi. Dari kebebasan hak milik ini lahir sistem ekonomi kapitalis, yang termasuk perkara paling menonjol dalam ideologi ini atau yang dihasilkan oleh keyakinan ideologi ini. Oleh karena itu, ideologi tersebut

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Genta Publishing, Yogyakarta: 2009), hlm. xiii

dinamakan ideologi kapitalisme. Sebuah nama yang diambil dari aspek yang paling menonjol dalam ideologi tersebut.²⁵

Tabel 2
Definisi Operasional

No.	Konsep (Variabel Penelitian)	Definisi Variabel	Indikator
1.	Sistem Pemilihan Presiden	Mekanisme yang mengatur mekanisme pemilihan para calon presiden untuk memiliki kebasahan sebagai presiden.	1. Pemilihan Langsung 2. Pemilihan Tidak Langsung
2.	Permusyawaratan Perwakilan	Mekanisme pemilihan presiden yang memenuhi unsur permusyawaratan perwakilan	1. Kesepakatan 2. Kebersamaan 3. Kekeluargaan 4. Keterbukaan 5. Keterwakilan
3.	Karakteristik	Karakteristik dalam ilmu hukum memiliki arti kebiasaan yang khas dalam ilmu hukum diterima sebagai ilmu yang menjelaskan ciri-ciri menurut pendekatan hukum yang digunakan. Dengan karakter demikian ilmu hukum merupakan ilmu tersendiri (<i>ius generis</i>). Dengan demikian kualitas keilmiahannya sulit dikelompokkan dalam salah satu cabang pohon ilmu, baik cabang ilmu pengetahuan alam, cabang ilmu pengetahuan sosial, maupun cabang ilmu humaniora. Tetapi berdasarkan karakteristik keilmuwan.	1. Ciri tertentu 2. Kebiasaan yang khas
4.	Berkarakter Keindonesiaan	Menurut Satjipto Raharjo berkarakter keindonesiaan yaitu Kebiasaan bangsa Indonesia menyesuaikan kehidupannya dengan tradisi bernegara dan perumus asli UUD 1945, yang menjadi ciri khas melekat.	1. Tradisi bernegara yang berkembang sebelum Indonesia merdeka 2. Pancasila sebagai dasar negara
5.	Liberalisme	Sulaiman al-Khirasyi mengatakan bahwa liberalisme adalah aliran	1. Kebebasan 2. Individualisme

²⁵ Taqi al-Dîn al-Nabhani, *Nizhâm al- Islâm*, Cet. VII, (tt.: Hizbut Tahrir, 2001), h. 26.

		pemikiran yang mengedepankan kebebasan pribadi. Sekolah ini menghormati kewajiban untuk menghormati kemandirian individu dan meyakini bahwa tugas utama pemerintah adalah melindungi dan melindungi kebebasan masyarakat, seperti kebebasan berpikir, kebebasan berbicara, kebebasan kepemilikan pribadi, dan kebebasan pribadi.	3. Rasionalis
6.	Kapitalisme	Kapitalisme mempertahankan kebebasan manusia, termasuk kebebasan, kepercayaan, pendapat, hak milik, dan kebebasan pribadi. Dari kebebasan hak milik inilah lahir sistem ekonomi kapitalis yang merupakan salah satu masalah yang paling menonjol dalam ideologi ini, atau dihasilkan oleh kepercayaan ideologis ini. Karena itu, ideologi ini disebut ideologi kapitalis. Nama diambil dari aspek ideologi yang paling menonjol.	1. Kebebasan 2. Pemilik Modal 3. Pasar

G. Orisinalitas dan Kebaruan Penelitian

1. Orisinalitas Penelitian

Penelitian mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen beberapa dilakukan oleh peneliti yang lain. Ditemukan beberapa disertasi yang terkait dengan topik disertasi ini.

Pertama, disertasi Harun Alrasid yang berjudul *"Masalah Pengisian Jabatan Presiden, Sejak Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 1945 Sampai Sidang MPR 1993,"* yang dijadikan buku dengan judul Pengisian Jabatan Presiden. Disertasi Harun Alrasid mengupas masalah-masalah umum mengenai pengisian jabatan presiden, dan bagaimana perundang-undangan dan praktek ketatanegaraan di Indonesia sejak dilangsungkannya sidang PPKI tahun 1945 sampai dengan sidang MPR tahun 1993.²⁶ Disertasi tersebut menghasilkan simpulan kedudukan presiden menurut sistem UUD 1945 sangat penting karena kekuasaan dan tanggung jawab terpusat pada jabatan presiden. Berkaitan dengan itu, maka pengisian jabatan presiden pada umumnya diatur di dalam UUD. Dengan kata lain, merupakan materi UUD.²⁷

²⁶ Harun Alrasyid, *"Pengisian Jabatan Presiden"* (Pustaka Utama Grafiti, Jakarta: 1999), hlm. 2-3

²⁷ *Ibid*, hlm. 137

Kedua, disertasi Bachtiar Baetal dengan judul: *Kekuasaan dan Pertanggungjawaban Presiden Dalam Konstruksi Politik Hukum Konstitsi Republik Indonesia*. Perumusan problematika: (1) Bagaimana politik hukum konstitusi negara Republik Indonesia dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia? (2) Bagaimana eksistensi kekuasaan Presiden berdasarkan politik hukum konstitusi dan praktiknya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? (3) Bagaimana rekonstruksi teoritik bentuk pertanggungjawaban presiden berdasarkan politik hukum konstitusi Republik Indonesia pasca perubahan UUD 1945?²⁸

Dalam kesimpulan disertasi menyatakan bahwa eksistensi kekuasaan presiden mengalami pergeseran ke arah diferensiasi kekuasaan. Pertanggungjawaban presiden pasca perubahan UUD 1945 telah mengalami rekonstruksi secara teoritik dari bentuk pertanggungjawaban politik menuju ke pertanggungjawaban konstitusional.²⁹

Ketiga, disertasi Aidul Fitriciada Azhari pada pascasarjana program doktoral Universitas Indonesia yang berjudul: *“Penafsiran Konstitusi dan Implikainya terhadap Pembentuk Sistem Ketatanegaraan Demokrasi atau Otokrasi (Studi Tentang Penafsiran UUD 1945 dan Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di Indonesia)”*. Fokus kajian disertasinya adalah pada penafsiran UUD 1945 sebagai upaya mewujudkan demokrasi di Indonesia dengan menggunakan perspektif penafsiran sebagai alat analisis untuk mengkaji permasalahan tersebut. Sesuai dengan makna penafsiran UUD sebagai cara memahami teks dalam UUD untuk disesuaikan dengan kondisi baru maka akan mengambil kurun waktu sejak perumusan UUD 1945 di BPUPKI tahun 1945 sampai sekarang.³⁰

Tabel 3
Deskripsi Orisinalitas dan Kebaharuan Penelitian

No	Peneliti	Identitas Penelitian	Alasan Pembeda
1	Harun Al Rasid	“Masalah Pengisian Jabatan Presiden, Sejak Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 1945 Sampai Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat 1993,” (UI, Depok: 1993)	Penelitian tersebut fokus kepada kedudukan presiden menurut sistem UUD 1945 dan pengangkatan jabatan presiden biasanya diatur dengan UUD. Berbeda dengan fokus peneliti kepada sistem pemilihan presiden.
2	Bachtiar Baetal	“Kekuasaan dan Pertanggungjawaban Presiden Dalam Konstruksi	Penelitian tersebut mengenai kekuasaan presiden yang mengalami pergeseran ke arah

²⁸ Bachtiar Baetal, *Kekuasaan dan Pertanggungjawaban Presiden Dalam Konstruksi Politik Hukum Konstitusi Negara Republik Indonesia* (PDIH Trisakti, Jakarta, 2017), hlm.4

²⁹ *Ibid*

³⁰ Aidul Fitriciada Azhari, *“Penafsiran Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Pembentuk Sistem Ketatanegaraan Demokrasi atau Otokrasi: Studi Tentang Penafsiran UUD 1945 dan Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di Indonesia”* (Pascasarjana UI, Jakarta: 2005), hlm. 41-42

		Politik Hukum Konstitsi Republik Indonesia.” (Universitas Trisakti, Jakarta: 2017)	diferensiasi kekuasaan. Pertanggungjawaban presiden pasca perubahan UUD 1945 telah mengalami rekonstruksi secara teoritik dari bentuk pertanggungjawaban politik menuju ke pertanggungjawaban konstitusional. Sedangkan peneliti mengarah kepada sistem pemilihan presiden yang sesuai dengan karakter keindonesiaan
3.	Aidul Fitriciada Azhari	“Penafsiran Konstitusi dan Implikainya terhadap Pembentuk Sistem Ketatanegaraan Demokrasi atau Otokrasi (Studi Tentang Penafsiran UUD 1945 dan Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di Indonesia)” (Universitas Indonesia, Depok: 2005)	Penelitian tersebut fokus kajian disertasinya adalah pada penafsiran UUD 1945 sebagai upaya mewujudkan demokrasi di Indonesia. Pembedanya peneliti fokus kepada sistem pemilihan presiden Indonesia

2. Kebaharuan Penelitian

Mencermati ketiga disertasi tersebut peneliti mengambil *positioning* terkait dengan perubahan sistem pemilihan Presiden Indonesia berdasarkan permusyawaratan perwakilan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni kepemimpinan negara (*imamah*) dan *originalism* yang menjadi kekuatan analisis menjadi kebaruan yang belum pernah digunakan dalam penelitian-penelitian bidang Hukum Tata Negara terkait sistem pemilihan presiden di Indonesia.

Skema 4 *Positioning Penelitian*



H. Struktur Penulisan

Struktur penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: Bab pertama adalah pendahuluan. Isinya meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, usulan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, alur kerangka penelitian, metode penelitian, kerangka konsep penelitian, definisi konseptual, definisi operasional, orisinalitas, dan struktur penulisan.

Bab II meninjau kepustakaan yang mendeskripsikan berbagai konsep dan teori yang digunakan sebagai pisau analisis terhadap rumusan masalah yang menjadi fokus studi dalam disertasi ini.

Bab III menjadi bagian yang menyajikan hasil penelitian, pembahasan dan analisis sesuai dengan rumusan masalah yang ada yakni karakteristik permusyawaratan perwakilan dalam sistem pemilihan presiden di Indonesia, dan konsep permusyawaratan perwakilan dalam sistem pemilihan presiden yang berkarakter ke-Indonesiaan.

Bab IV bagian terakhir memberikan kesimpulan dan saran atas masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini.

II.KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Arti Permusyawaratan

Kata "musyawarah" berasal dari bahasa Arab yang berarti musyawarah, musyawarah dan musyawarah. Istilah musyawarah berasal dari akar kata "Sy, w-, r," yang aslinya mengacu pada pengambilan madu dari sarang lebah. Tujuan

pengembangan makna ini adalah mencakup semua konten (termasuk opini) yang dapat diperoleh atau dihapus dari orang lain. Berdiskusi juga bisa berarti mengatakan atau menanyakan sesuatu. Menurut arti dasarnya, kata musyawarah pada dasarnya hanya digunakan untuk memperindah benda.³¹

Berikut prinsip-prinsip dasar gagasan bermusyawarah dalam Islam. Prinsip *pertama* yaitu bahwa makna musyawarah adalah menjalankan perintah Allah untuk mengumpulkan pandangan-pandangan dalam urusan-urusan kemanusiaan sedangkan prinsip *kedua* adalah bahwa tujuan bermusyawarah adalah merumuskan pandangan terbaik bagi kebaikan kepentingan bersama. Ilustrasi madu yang dihasilkan oleh para lebah sekaligus menjadi prinsip yang *ketiga*. Kriteria orang-orang yang bermusyawarah perlu sejalan dengan kriteria ini, yaitu bahwa lebah hanya menghasilkan produk yang terbaik.³² Sebagai faham musyawarah dalam Islam: merujuk kepada Al Qur'an musyawarah (*syura*) disebutkan sebanyak tiga kali dalam tiga tempat yang berbeda dan dengan bentuk kata yang berbeda pula, yakni pada surah Al-Baqarah: 233 (رُتْشَاو), Ali Imran: 159 (هُمْرشَاو) dan Al-Shura: 38.³³

Paham musyawarah dalam Al-Quran dimulai dengan surah Ali Imran ayat 158. Alasannya karena dalam surah inilah disebutkan perintah untuk bermusyawarah dalam surat Ali Imran 159:

إِهْـمَى ٱللَّهُ إِلَهُ ٱلْبُحْرِ ۖ يَبْلُغُكُمْ رَمْطَ مِمَّحَا ٱللَّهِ لَهُ ٱنتَبَ وَهُوَ كَوَلٌ قَتْنٌ عَظُّ ٱلْبِطْلَا لِيُنْقِىَ مُضَافَتَ حَنَوا فُكَلُوا عِفَاعٌ مُّهُنٌ لِرَفْعَاسُوا وَهُوَ فَمَهْرٌ شَاوُ ٱلْأَيِّ فَرَمَ ٱلْأَعْدَ قَتَمَرَا عُلُكُوتَ ٱللَّهِ

Terjemahan:

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah lah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.

Ayat ini merupakan kelanjutan dari beberapa ayat sebelumnya—maksudnya dalam surah Ali Imran ini—yang berbicara perihal kondisi umat Islam pasca perang Uhud. Sebagaimana yang diriwayatkan bahwa dalam peperangan ini kaum muslimin

³¹ M. Quraish Shihab, *"Membumikan Al Qur'an"* (Lentera, Jakarta: 1996), hlm. 569.

³² "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakalah kepada-Nya." (Surah Ali Imran 3: 59). Hal tersebut dijelaskan dalam proses perumusan aturan di lembaga hukum, bahkan perlu dijelaskan mengapa suatu undang-undang harus diawasi. Dalam hal ini juga perlu ditekankan bahwa ruang lingkup materi yang dibahas adalah masalah sosial, bukan aturan ibadah yang mutlak. Lihat Inna Junaenah, "Kontribusi Orde Islam untuk Demokrasi Musyawarah Indonesia", *Majalah Ahkam*, Volume 16, No. 166, 2 Juli 2016

³³ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *"Mu'jam Mufahras li al-Fazh al-Quran al-Karim"* (Dar alKitab Al-Mishriyah, Kairo: 2008), p. 391.

mengalami kerugian yang besar. Lebih dari itu, yang paling membuat kaum muslimin terpukul adalah cedera yang dialami Rasulullah saw yang cukup parah dalam pertempuran Uhud tersebut. Beberapa gigi Rasulullah tanggal (copot) pada peperangan ini. Penyebabnya adalah karena para pasukan pemanah yang tidak mematuhi aba-aba beliau guna berjaga di benteng Uhud. Setelah kejadian tersebut, mereka disergap rasa bersalah yang luar biasa, yang akibat kesalahan mereka ini hampir saja Rasulullah celaka. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa kondisi psikis umat Islam sedang terguncang saat itu sehingga di awal ayat 159 ini Allah menangkan mereka dengan menegaskan sifat kelembutan Rasulullah—yang merupakan salah satu bentuk rahmat Allah ta'ala, “Maka disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka”. Pihak Quraisy Mekah juga tidak berhasil menyelesaikan misinya pada perang ini, selain mereka juga mengalami kerugian yang besar.³⁴

Urusan menyapih balita saja dimusyawarahkan, apalagi urusan orang ramai? Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 233:

الْمَوْلُودَ وَعَلَى ٱلرَّضَاعَةِ يُنَمَّ أَنْ أَرَادَ لِمَنْ ۖ كَامِلَيْنِ حَوْلَيْنِ أَوْلَادَهُنَّ يُرْضِعْنَ وَالْوَالِدَاتِ
وَلَا يُولِدُهَا وَالِدَةٌ تُضَارُّ لَا ۖ وَسَعَهَا إِلَّا نَفْسٌ تُكَلِّفُ لَا ۖ بِٱلْمَعْرُوفِ وَكَسَدَوْنَهُنَّ رِزْقَهُنَّ لَهُ
فَلَا وَتَشَاوُرْ مِنْهُمَا تَرَاضٍ عَنْ فِصَالٍ أَرَادَا فَإِنَّ ۚ ذَٰلِكَ مِثْلُ الْوَارِثِ وَعَلَى ۖ يُولِدُهُ لهُ مَوْلُودٌ
أَنْتُمْ مِمَّا سَلَّمْتُمْ إِذَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فَلَا أَوْلَادَكُمْ تَسْتَرْضِعُوا أَنْ أَرَدْتُمْ وَإِنَّ ۖ عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ
بَصِيرٍ تَعْمَلُونَ بِمَا لَكُمْ أَنْ وَعَلَّمُوا لَكُمْ وَاتَّقُوا ۖ بِٱلْمَعْرُوفِ

Terjemahan:

Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Menariknya, pada ayat ini penekanannya lebih kepada *taradhin* (kerelaan kedua orang tua anak tersebut) baru kemudian diikuti dengan *tasyawurin*. Tentu saja seorang ibu dapat menyapih (memberhentikan pemberian ASI kepada anaknya) secara sepihak, namun jika tanpa kerelaan sang ayah—karena ayah juga berhak dan punya kepentingan untuk perkembangan anaknya—maka keridhaan keduanya harus ada. Artinya mereka saling ridha karena anak tersebut memang menjadi tanggung jawab keduanya. Jadi jika pada *Ali Imran* 159 berbicara musyawarah dalam lingkup ruang publik maka *Al-Baqarah* 233 ini berbicara musyawarah dalam lingkup ruang privat. Hal ini menunjukkan bahwa dari awal umat Islam sudah akrab dengan kegiatan diskusi, tukar pikiran, atau musyawarah, dan menjunjung tinggi keterbukaan. Karena memang sebagaimana yang ditulis oleh para mufassir, bahwa musyawarah mendatangkan kebaikan, meminimalisasi pertikaian, dan mengundang petunjuk Allah.³⁵

³⁴ Perhatikan ayat 152-158 surah Ali Imran ini. Ibnu Khalifah Alayawi, “*Al-Jami’ al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul wa Syarh Ayatiha*” (Hajar, Kairo: 2005), p. 408.

³⁵ Imam Muhammad Fakhruddin al-Razi, *Tafsir al-Fakhr al-Razi Juz XI* (tt: Darul Fikr, 1981), h. 67

Tidaklah mereka bermusyawarah kecuali mereka akan ditunjukkan pada solusi yang baik dalam urusan mereka. Karena itu, Allah melekatkan sifat suka bermusyawarah sebagai salah satu sifat para penghuni surga.³⁶ Firman Allah ta'ala pada surah Asy-Syura ayat 38:

يُذْفِقُونَ رَزَقْنَاهُمْ وَمِمَّا بَيْنَهُمْ شُورَى وَأَمْرُهُمُ الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا لِرَبِّهِمْ اسْتَجَابُوا وَالَّذِينَ

Terjemahan:

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

2. Arti Perwakilan

Prinsip lain dalam bermusyawarah adalah lembaga yang melakukan review. Buku terkenal Imam Mawardi "*Al Ahkam Sulthaniyah*" dapat mengkonfirmasi keberadaan lembaga perwakilan. Ini disebut *ahl al-'aqd wa al-hal* (parlemen), dan berpartisipasi dalam proses pemilihan imam (khalifah).³⁷ Dalam kitab ini, *al-'aqd wa al-hal* disebut sebagai badan perwakilan teritorial. Syafi'i Maarif menegaskan "Prinsip Syura yang begitu qurani tidak pernah dilembagakan secara optimal. Ini terjadi terutama karena semangat dan kepentingan dinasti pada periode pasca *khulafa rasyidin* (632-661 H) telah merusak ajaran *egaliter* seperti yang diajarkan Quran."

Pada masa pemerintahan Islam, terutama setelah wafatnya Nabi Muhammad saw yaitu sejak zaman Khalifah Umar Ibn Khatab (*Asyura*) atau *Ahl Halli Wal Aqdi* yaitu beberapa sahabat senior bernegosiasi menentukan kebijakan nasional dan mengangkat khalifah, meskipun bentuknya belum dilembagakan secara terpisah.³⁸ Sebelum era Islam, kota Mekah pernah dikenal dengan sebutan Darun Nadwah, wakil dari tokoh masyarakat di Mekkah, yang bertanggung jawab dalam merumuskan isu-isu nasional dan sosial.³⁹ Dalam sejarah Islam, pada masa pemerintahan Bani Umayyah II Spanyol, Khalifah Al Hakam II (961-976 M), Komite Asy Shura atau *Ahl Halli Wal Aqdi* didirikan

³⁶ Disebutkan pada ayat 36 dan 37 surah Al Asyura bahwa sifat-sifat orang beriman itu adalah bertawakal, menjauhi dosa besar dan perbuatan keji, dan pemaaf. Dan baru kemudian disambung dengan ayat 38 di atas.

أَمْفِ اِهْمِيَّتَاتِ شَيْمِ فَبِئْنَ اَلْعَمَّ الدَّافِيحِ وَيُنْ عَمَّا اللِّدَا حَةَ وَرِيَّ اَللَّغْبِ اَيْنْدَلْ زُونَم رُلْعَوَا يَمْهَبَ وَلُكَّوَتْ

Artinya: Maka sesuatu yang diberikan kepadamu, itu adalah kenikmatan hidup di dunia; dan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Tuhan mereka, mereka bertawakkal.

يَبْنِدَالُو كَوْنِيْنَجِ الرَّائِيَّ بَابُ اَلْاَوْمِثْ وَشَاخَوْفَالِ اَلْاَمْدُ غَا هُبِضًا يُمُوا وَتُرْفَعُ

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka memberi maaf.

³⁷ Imam Mawardi, "*Al Ahkam Al Shultaniyah, Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam* (Darul Falah, Jakarta, 2000) hlm 5-6

³⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Gaya Media Pertama, Jakarta: 2001), hlm. 138

³⁹ Fuad Said HA, *Ketatanegaraan Menurut Islam* (Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 2001), hlm. 89

untuk pertama kalinya. Saat itu, anggota *Ahl Halli Wal Aqdi* terdiri atas pejabat negara dan beberapa tokoh masyarakat, sedangkan ketuanya dijabat langsung oleh Khalifah. Anggota komite *Asy Shura* berada di level yang sama dengan pemerintah. Badan ini bertanggung jawab atas musyawarah urusan hukum dan membantu pemerintahan negara bagian Khilafah.

3. Permusyawaratan Perwakilan dalam Tradisi Bernegara Sebelum Kemerdekaan

Tradisi bernegara yang menghadirkan permusyawaratan perwakilan sebelum kemerdekaan dengan pengaruh kitab *Martabat Tujuh* yakni Kesultanan Buton, Kerajaan Sunda, dan Kesultanan Banten.

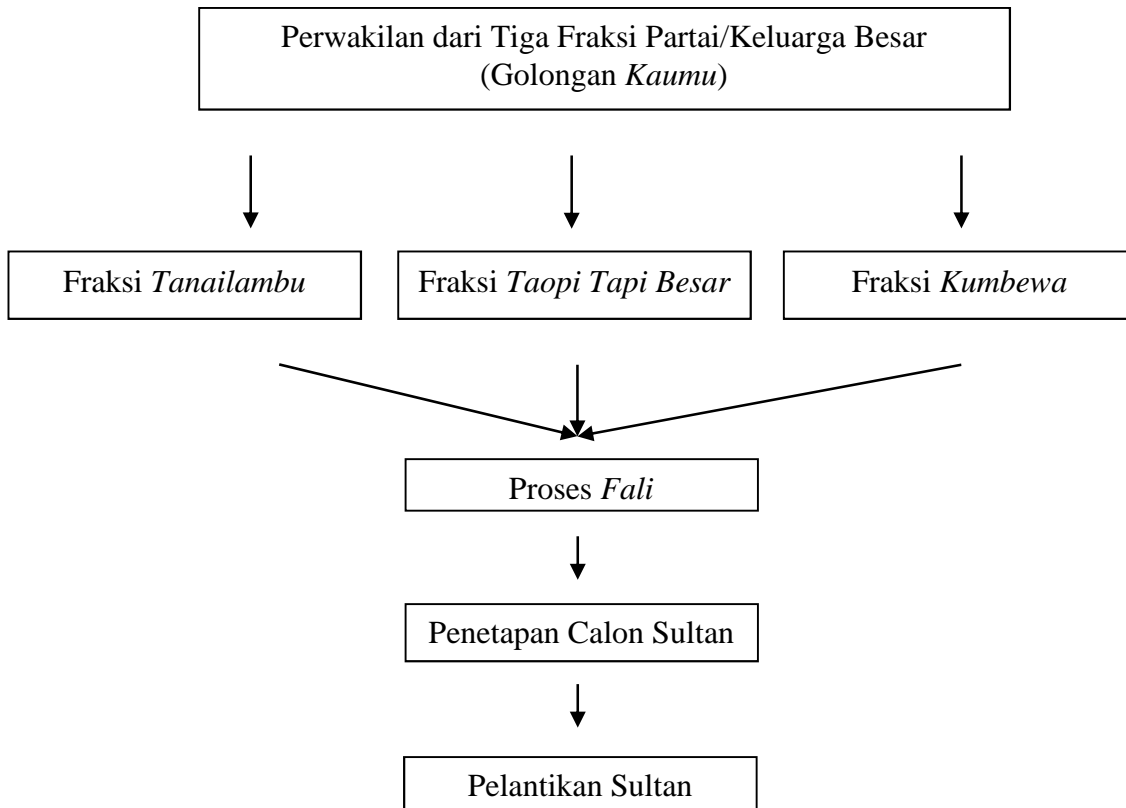
a. Kesultanan Buton

Salah satu perubahan mendasar yang terjadi adalah terbentuknya Undang-Undang Dasar *Murtabat Tujuh* yang menjadi dasar perubahan mendasar dalam tatanan pemerintahan, hukum dan adat istiadat masyarakat Buton. Selama pelaksanaan undang-undang ini, Sultan sesuai dengan Undang-undang *Murtabat Tujuh*, selalu memberikan nasehat dan penegasan bahwa tindakan masyarakat dan pemerintah Sultan didasarkan pada norma dan instruksi yang jelas, dan tidak lagi berdasarkan inisiasi individu atau kelompok.⁴⁰

Model rekrutmen kepemimpinan dalam sistem pemerintahan dan bentuk Kesultanan Buton bersifat tidak langsung. Komunitas atau orang menyampaikan keinginan mereka melalui *Siolimbona*, yang memilih Sultan. Dalam menjalankan pemerintahannya, Sultan bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang dipimpinnya. Dalam perekrutan pejabat lain, prosedur pengangkatan tergantung pada pengalaman di bidang yang akan dijabat atau pengetahuan yang cukup sesuai dengan jabatan yang dipegang. Selain pengetahuan tentang rekrutmen, model etika juga diutamakan.

⁴⁰ Zahari, *Op,Cit.*, hlm. 14

Skema 6
Proses Pemilihan Kesultanan Buton



Mekanisme untuk mendapatkan legitimasi dalam Kesultanan Buton disebut *Gau* (musyawarah). Semua peraturan perundang-undangan nasional berasal dari suatu kesepakatan, dan kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik melalui kesepakatan bersama sebelum keputusan nasional tentang Kesultanan Bouton atau hasil dari proses politik. Nilai-nilai politik *Murtabat Tujuh* merupakan nilai-nilai kemasyarakatan yang mengabdikan pada negara, yaitu:

1. *Ainda-indamo aurata sumanamo karo* (kepentingan pribadi orang lebih penting daripada harta benda) adalah pengabdian dan pengorbanan orang-orang kepada sesama dan manusia. Harta bisa membangkitkan kecemburuan masyarakat lain, berujung pada rapuhnya persatuan. Oleh karena itu, jika celah tersebut muncul, maka ada kesatuan tujuan untuk mencapai tujuan bersama negara untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera untuk kepentingan dirinya sendiri atau orang lain, dan properti bukanlah segalanya.

2. *Ainda-ndamo karo somanamo lipu* (kepentingan nasional lebih besar dari pada kepentingan pribadi). Karo adalah orang perseorangan, perseorangan atau sekelompok orang yang keselamatannya harus dilindungi oleh negara atau pemerintah, tetapi mempertahankan dan membela kepentingan (negara) Lipu yang lebih tinggi. Walaupun mengorbankan Lipu, Carlo atau warga juga rela berkorban untuk mempertahankan dan membela Lipu. Nilai tersebut mencerminkan pengabdian kepada masyarakat untuk kepentingan nasional.
3. *Ainda-indamo lipu somanamo sara* (kepentingan pemerintah lebih penting daripada negara) Sara atau negara berdasarkan musyawarah adalah milik bersama semua orang dan pemerintah. Negara harus dilindungi dan dijaga integritasnya agar tidak terancam dari manapun. Namun, jika kepentingan yang lebih tinggi dan lebih penting membutuhkan keamanan pemerintah (Sala), hal itu dapat mengorbankan wilayah tertentu dalam negara yang berada dalam keadaan yang diperlukan.
4. *Ainda-indamo sara somanamo agama*, (agama lebih penting dari pada pemerintah). Artinya, jika seseorang atau beberapa pejabat kekaisaran melanggar peraturan nasional atau melanggar hukum yang berlaku, mereka wajib mengeluarkan pejabat terkait karena pertimbangan integritas agama, yang merupakan tingkatan tertinggi dalam filosofi Buton. Atau dalam arti lain, agama lebih penting daripada negaranya. Namun, jika keselamatan agama sangat terancam dan situasinya sangat tidak stabil, dua pilihan harus diambil: (1) pemerintah menyerah, selama agamanya bertahan. (2) pemerintah memulai perang, percaya bahwa mereka bertempur dan mati dengan cara yang benar untuk membela kebenaran.⁴¹

Dalam sejarah Buton (pasca diundangkannya *Murtabat Tujuh*) terdapat banyak pejabat penting Kesultanan yang divonis hukuman mati karena melanggar aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satunya adalah Sultan Maradan Ali (1647-1654) yang dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Selain itu, beberapa orang Sultan dicopot dari jabatannya karena dianggap tidak mampu menjalankan tugas rakyat yang diatur dalam konstitusi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *Murtabat Tujuh* dapat digunakan sebagai konsep nilai yang sah untuk bergerak ke arah yang lebih baik dalam membangun Indonesia.⁴² Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap negara memiliki bentuk dan sistem pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan negaranya. Seperti halnya Kesultanan Buton di Sulawesi Tenggara, bentuk dan tata pemerintahan juga berpedoman pada *Murtabat Tujuh Sara Wolio*. Kepala pemerintahan dipimpin oleh Sultan, yang dipilih oleh *Siolimbona* (badan legislatif). Sultan secara langsung menjalankan tanggung jawab kepala negara dan pemerintahan.

b. Kerajaan Sunda

⁴¹ Morsidi, *Undang-Undang Dasar Pemerintahan Kerajaan Sendiri di Buton*, Baubau, Jurnal, 1990, hlm. 11

⁴² Mahrudin, "Nilai-Nilai Hukum Dalam Undang-Undang Murtabat Tujuh", Jurnal Al Adl, Vol. 8 Nomor 2, Juli 2015, hlm. 138.

Pada akhir penjajahan Belanda, prasasti Kebon Kopi II atau Pasir Muara dicuri orang, namun sempat dipelajari oleh FDK Bosch. Pakar sejarah MC Rickfefs meyakini keberadaan prasasti ini, tidak jelas bagaimana prasasti ini bisa kembali dan kapan. Prasasti tertua tentang Pakuan bertahun 932 M., tahun akhir periode Jayabupati. Prasasti itu berbahasa Melayu Kuno, dengan banyak resapan bahasa Armenia yang dipergunakan orang Samarkand.⁴³

Prasasti ini tampaknya dibuat menjelang bertahtanya Rakryan Jayagiri (923-940). Dengan kata lain bertahtanya Jayagiri berdasarkan ketetapan Juru pengambet, dewan resi. Dalam tradisi Mesir terdapat dewan pendeta, juru pengambet mempunyai kewenangan menetapkan pergantian raja. Naik tahtanya Jayagiri menjelaskan berpindahnya istana ke Pabaton, Istana Bogor sekarang. Hanya saja tidak jelas, dimana pusat kerajaan Sunda itu. Sunda masih dipakai sebagai penamaan kerajaan, belum Pakuan.⁴⁴

c. Kesultanan Banten

Salah satu peninggalan Kesultanan Banten pada periode Prabu Niskala adalah Prasasti Kebantenan. Ditemukan oleh pelukis Raden Saleh pada taun 1867 di Kebantenan. Prasasti Kebantenan terdiri atas empat tablet yang ditulis di atas lempengan metal, 1 tablet tak terbaca lagi. Isi penting dari prasasti adalah hukum dengan sangsi. Siapapun tidak diperbolehkan melintas Sunda Sembawa. Ditemukannya prasasti ini di bekas kerajaan Tirem di Kebantenan menunjukkan bahwa kerajaan Tirem merupakan jaringan Pakuan.

Sebagai jaringan Kerajaan Sunda ada kemiripan dalam menentukan pemimpin yakni melalui pengukuhan oleh lembaga yang diberikan kewenangan semacam juru pengambet dalam kerajaan Sunda.

4. Aspek Permusyawaratan Perwakilan

Dalam rumusan Sila Keempat Pancasila yang bersumber dari nilai keislaman dan tradisi bernegara sebagai dasar permusyawaratan perwakilan terdapat aspek dalam sistem pemilihan presiden Indonesia sebagai berikut.

a. Kesepakatan

Dalam kesepakatan terdapat sikap lemah lembut (*linta lahum*) dan kerelaan (*taradhin*). Kedua sikap ini merupakan modal dalam melakukan musyawarah guna tercipta iklim dialog yang kondusif. Tidak jarang, dalam sebuah musyawarah terjadi silang pendapat yang sengit sehingga menciptakan suasana musyawarah yang panas. Jika niat dan sikap peserta debat tidak didasari untuk mencari kebenaran dan jalan terbaik yang disertai dengan sikap sopan santun dan persaudaraan maka yang muncul adalah permusuhan, bahkan hingga di luar forum musyawarah atau diskusi. Jadi, sesengit apapun perdebatan yang ada di dalam forum, selama didasari semangat mencari kebenaran dan persaudaraan—yang dalam hal ini

⁴³ Ridwan Saidi, “Kerajaan Sunda dan Sunda Kalapa, serta kemandirian Banten” (Yayasan Renaissance, Jakarta: 2019), hlm. 8

⁴⁴ *Ibid*

diwakilkan oleh kata sikap lemah lembut dan saling rela—maka akan tetap memperoleh kebaikan, apa pun solusi yang dihasilkan dengan kesepakatan bersama. Memegang teguh kesepakatan atau keputusan musyawarah (*‘azm*) merupakan kesimpulan dari musyawarah. Ketika keputusan atau kesepakatan telah dibuat, semua pihak sudah mengikat diri untuk berkomitmen melaksanakan keputusan tersebut. Tetapi, perlu digarisbawahi bahwa keputusan itu menimbulkan keyakinan bahwa keputusan itulah yang terbaik, atau dalam bahasa Al Quran “*membulatkan tekad*”. Keputusan itu tidak boleh hanya karena tidak ditemukan “*jalan lain*”, sehingga walaupun keputusan yang dihasilkan masih meragukan namun dipaksa untuk diterima. Kata *azm* ini menggambarkan kekokohan dari simpulan yang dihasilkan. Artinya diskusi itu harus melahirkan keyakinan yang kuat.

b. Kebersamaan

Kesadaran bahwa semua pihak yang terlibat dalam musyawarah atau forum diskusi berpotensi untuk berbuat salah atau kekeliruan (*fa’fu anhum wa astaghfir lahum*). Kesalahan itu boleh jadi ada pada pribadi peserta musyawarah, pada usulan yang diajukan, pada kesepakatan yang dicapai, atau bahkan pada pelaksanaan kesepakatan itu sendiri. Oleh sebab itu, melalui ayat 159 surah *Ali Imran*, Allah mengingatkan kita semua untuk saling memaafkan dan memintakan ampun. Bahkan, memaafkan dan memintakan ampun ini Allah dahulukan daripada musyawarah itu sendiri sebab dengan terciptanya rasa persaudaraan dalam mencari kebenaran. Memang dengan musyawarah peluang menemukan solusi atau jalan yang terbaik lebih besar dibandingkan jika secara sendiri-sendiri, namun, tetap saja potensi kesalahan atau kekeliruan tetap terbuka maka yang utama adalah kebersamaan.

c. Kekeluargaan

Ikhtiar menyerahkan semua hasilnya kepada yang Maha Pemegang keputusan akhir, yakni Allah. Kedua-duanya adalah perintah Allah. Bermusyawarah perintah Allah dan bertawakal juga perintah Allah. Oleh sebab itu, tidak ada pertentangan antara keduanya dan menghadirkan kekeluargaan dalam setiap permusyawaratan.

d. Keterbukaan

Musyawarah memiliki dua fungsi, yakni sebagai sarana (alat) dan prinsip (tujuan). Sebagai sarana, musyawarah dipandang sebagai cara untuk menemukan atau memecahkan masalah dengan lebih baik. Namun, hal ini saja tidak cukup sebab jika terbatas sebagai sarana maka boleh jadi musyawarah dinilai hanya sebagai alternatif. Artinya, jika ada alasan lain yang dipandang dapat menghasilkan apa yang menjadi tujuan musyawarah tersebut maka artinya musyawarah atau diskusi tidak perlu dilaksanakan. Akibatnya muncullah sikap otoriter. Padahal musyawarah bukan hanya bertujuan menemukan solusi yang paling jitu, melainkan juga mengajak semua elemen untuk ikut terlibat dalam mengambil dan melaksanakan keputusan. Dari sinilah, musyawarah bukan hanya dipandang sebagai sarana, melainkan juga prinsip. Artinya, bukan sebagai alternatif, melainkan menjadi bagian dari solusi itu sendiri yang memiliki keterbukaan.

e. Keterwakilan

Keterwakilan merupakan representasi dari wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Lembaga yang dibentuk sebagai wujud perwakilan yang diberikan kewenangan untuk menentukan pimpinan lembaga negara melalui musyawarah.

5. Konsepsi Sila Keempat Pancasila

a. Konsepsi Cita Hukum Indonesia

Pancasila sebagai cita hukum yang oleh para *The Founding Father* disepakati dan ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, landasan filosofis dari kerangka dan tatanan dasar organisasi nasional diatur, Pancasila adalah pedoman hidup bangsa Indonesia, mengedepankan pandangan masyarakat Indonesia tentang relasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Manusia dan Tuhan (*habluminallah*), manusia dan sahabat (*habluminannas*), dan manusia bersama alam semesta (*hablum minal alam*) didasarkan pada keyakinan tentang tempat individu dalam masyarakat dan alam semesta.⁴⁵

Pancasila mengikat secara hukum. Pancasila menghadirkan suasana kebatinan atau cita-cita hukum dalam bentuk hukum dalam praktiknya dan hukum dasar tidak tertulis yang berkembang dalam praktik pemerintahan nasional sebagai hukum dasar negara. Semuanya diperkuat oleh berbagai momentum paling penting dalam setiap perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia.⁴⁶

b. Konsepsi Demokrasi Pancasila

Kedaulatan rakyat lahir di panggung politik kontroversial dalam sejarah kekuasaan negara, dan maknanya sarat dinamika. Konsep asli rakyat adalah sumber kekuasaan tertinggi di suatu negara tanpa kecuali. Orang-orang memerintah secara mandiri. Bagaimana "rakyat" memerintah dan mengatur diri mereka sendiri? Di zaman ini yang hanya dikelilingi oleh kekuasaan para penguasa yang menyebut diri mereka raja atau kaisar, gagasan menempatkan rakyat sebagai penguasa tertinggi atau pemegang kedaulatan adalah gagasan yang gila dan mustahil. Namun dalam pembahasan teori nasional dan praktik *trial and error* di Perancis dan Amerika Serikat, gagasan kedaulatan rakyat terus berkembang hingga hampir semua negara di dunia akhirnya mengikutinya.⁴⁷ Demokrasi menunjukkan bahwa derasnya aliran kekuasaan rakyat sebagai sebuah istilah telah merubah struktur monarki, setidaknya

⁴⁵ Cita hukum biasa dikenal dengan pemikiran, prakarsa, kreativitas dan pemikiran yang berkaitan dengan hukum atau pemahaman tentang makna hukum, terdiri dari tiga unsur yaitu keadilan, validitas (hukum) dan kepastian hukum. Lihat. Roeslan Abdulgani, *"Pengembangan Pancasila di Indonesia,"* (Grafindo, Jakarta: 1977), hlm. 20

⁴⁶ Mahfud MD, *"Pancasila sebagai Paradigma Pembaharuan Hukum,"* Jurnal Filsafata Pancasila, Pusat Studi Pancasila Universitas Gajah Mada, Yogyakarta: 1999.

⁴⁷ Istilah 'kedaulatan rakyat' dalam bahasa Indonesia seringkali digunakan dan di identikkan "demokrasi". Meski tidak menimbulkan masalah serius dari sudut pandang etimologis, nyatanya kedua istilah ini bisa memiliki tafsirnya sendiri-sendiri. Kedaulatan rakyat atau demokrasi dalam teks Indonesia memiliki nuansa konseptual. Lihat mo. "Menuju Indonesia Merdeka" Hatta dimuat dalam buku *"National Issues"* yang diedit oleh Miriam Budiardjo..

menjadi monarki parlementer atau hancur total telah digantikan oleh republik demokratis.

Penegasan Hatta, demokrasi Pancasila dilandasi oleh asas kekeluargaan dan gotong-royong yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang meliputi unsur kesadaran beragama, kebenaran, cinta kasih dan akhlak mulia, serta berkarakteristik Indonesia.⁴⁸ Demokrasi Pancasila menekankan bahwa sistem penyelenggaraan negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuannya bersama.⁴⁹

c. Konsepsi Majelis Permusyawaratan Rakyat Menurut Sila Keempat Pancasila

Pancasila harus dipahami sebagai satu kesatuan organis: setiap silas terkait antara satu dengan yang lain atau menjadi landasan prinsip, petunjuk, dan batasan lainnya. Pemahaman Pancasila secara organis juga harus dipadukan dengan gagasan pokok yang dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945. Tanpa pemahaman tersebut akan kehilangan maknanya. Pancasila dapat dipahami secara subjektif, menyimpang dan menjadi bumerang, seperti amandemen konstitusi dan pemilihan presiden langsung.⁵⁰

Apabila ditinjau secara mendalam MPR sebagai institusi memang lahir dengan perspektif identitas keindonesiaan yang melekat di dalamnya. Identitas keindonesiaan lazim dipahami sebagai tradisi bernegara. Tradisi bernegara yang dimaksud penulis dipahami dalam makna hukum tata negara, yakni mengenai struktur negara dan bagaimana interelasi antar struktur dan substruktur bernegara yang berbasiskan nilai, norma maupun kebutuhan domestik suatu negara. Secara fungsional, tradisi memiliki makna sebagai konsep rasionalitas yang hadir dari masa lalu yang kemudian menjadi dasar perencanaan untuk segala tindakan dimasa depan. Bagi John Austin konsep ini dimaknainya sebagai *a rule of positif morality*.⁵¹ Hal yang demikian ini kemudian akan berujung kepada lahirnya konstitusi yang merepresentasikan tradisi maupun moralitas positif yang memang mengakar, sebagaimana diuraikan Hans Kelsen, "*custom has to be, like legislation, a constitutional institutions*".⁵² Indonesia sendiri dapat dikategorikan sebagai negara bangsa yang memiliki kecenderungan menggunakan tradisi bernegara yang menjadikannya identitas kolektif sehingga pada akhirnya membentuk pola yang kemudian diinstitusionalisasikan serta mendapatkan legitimasi politik. Alur ini yang

⁴⁸ Mohammad Hatta, *Indonesia Merdeka*, dalam karya lengkap Bung Hatta. *Buku I: Kebangsaan dan Kerakyatan*, (Penerbit LP3ES, Jakarta: 1998), hlm. 87

⁴⁹ Adnan Buyung Nasution, *Pikiran dan Gagasan dalam Demokrasi Konstitusional*, (Kompas, Jakarta, 2010), hlm. 3-4.

⁵⁰ Pada era reformasi, ideologi Pancasila dipertanyakan banyak pihak keampuannya sebagai pijakan, perekat dan pilar penyangga kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak aneh apabila kemudian muncul tawaran ideologi lain yang menjanjikan, bahkan tanpa sadar dari petinggi negara sampai rakyat bawah pikiran dan perilakunya sudah pragmatis, menjauh dari nilai-nilai sebagaimana yang diajarkan ideologi Pancasila. Lihat Absori, *Politik Pembangunan .. Op. Cit.*, hlm. 8

⁵¹ M.D.A Freeman, "*Lloyd's Introduction to Jurisprudence*", (Sweet & Maxwell, London: 1994), p. 23-24

⁵² Hans Kelsen, "*General Theory of Law and State*" (Russel & Russel, New York: 1973), p. 181

kemudian diamini oleh Juergen Habermas disebutnya sebagai *cultural basis for constitutional state*.⁵³

d. Konsepsi Daulat Rakyat dalam Konteks Keindonesiaan

Amandemen Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menunjukkan adanya perubahan konsep kedaulatan rakyat yang paling mendasar dalam UUD 1945. Ada perubahan mendasar atau kekuatan tertinggi mengenai siapa yang sebenarnya memegang penguasa tertinggi. Sebagaimana dikatakan Soewoto Mulyosudarmo, amandemen Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 merupakan perubahan terhadap kondisi yang mencerminkan keadaan sebenarnya mengenai pengawasan kekuasaan tertinggi.⁵⁴ Pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara adalah rakyat.

Menurut Sri Sumantri, berdasarkan susunan keanggotaannya, MPR merupakan penjelmaan rakyat Indonesia, yang berdasarkan pada “pasal 1 ayat (2) UUD 1945”, disebutkan kedaulatan ditangan rakyat. Kedaulatan dimaksud yaitu MPR. Itu sebabnya, (sebelum Perubahan UUD), MPR merupakan penjelmaan rakyat Indonesia. Pemikiran para *founding fathers*, antara lain Soepomo, sangat mewarnai Pondasi kelahiran MPR.⁵⁵ Setelah reformasi, UUD 1945 diamandemen untuk mengubah lembaga MPR (semula lembaga negara tertinggi, kemudian menjadi negara) memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah Presiden dan atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam Sidang Paripurna Majelis. Berikutnya, melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya; memilih dan melantik Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari.⁵⁶ Tidak ada lagi kewenangan MPR untuk mendengar dan membahas laporan kemajuan (*progress report*) dari lembaga negara dan pelaksanaan tugasnya dan Presiden tidak perlu lagi memberi laporan pertanggungjawaban kepada MPR pada akhir masa jabatannya.⁵⁷

6. Penafsiran Sila Keempat Pancasila

⁵³ Juergen Habermas, *“The Inclusion of the Other: Studies in Political Theory”*, (Cambridge MIT Press, England: 1977), p. 89-91

⁵⁴ Soewoto Mulyosudarmo, dalam Khairul Fahmi, *Ibid.*, hlm. 120. Pemilihan sistem pemilu tertentu juga dapat mengukur sejauh mana penyelenggara nasional sesuai dengan asas kedaulatan rakyat dalam UUD 1945. Sistem ini akan lebih dekat dengan esensi kedaulatan rakyat. Semakin sempit sistem tersebut pilihan rakyat, maka semakin jauh pula sistem tersebut dari hakikat kedaulatan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵⁵ Prayudi, MPR, *“Transisi Kedaulatan Rakyat Dan Dampak Politiknya”*, Politica Vol. 3, No. 1, Mei 2012, hlm. 22.

⁵⁶ *Ibid*, h. 518

⁵⁷ *Ibid*, h. 520

Makna rakyat merupakan hasil dari wujud rakyat dengan jumlah yang besar di suatu negara tertentu, maka demokrasi merupakan esensi yang melekat pada rakyat. Kodrat manusia diungkapkan dengan mengacu pada prinsip keadilan dan peradaban manusia, yaitu: manusia adalah individu dan makhluk sosial, dan sifat alami yang melekat pada karakter manusia adalah: kepekaan terhadap perasaan, pikiran, perilaku dan tindakan, sesuai dengan perwujudannya keadilan rakyat. Inilah makna esensial dari masyarakat.

Makna ...yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, merupakan kerakyatan yang mengacu pada konsep musyawarah dalam Islam dan konsep representatif dalam tradisi bangsa Indonesia yang lebih dekat dengan ajaran Islam. Berdasarkan konsep demokrasi Pancasila, mengacu pada mekanisme pengambilan keputusan.

7. Sistem Pemerintahan

a. Sistem Parlementer

Pemerintahan parlementer memisahkan kepala negara dari kepala pemerintahan. Kepala negara bisa jadi presiden India, atau raja/ratu Inggris, sedangkan kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Sebagai negara berbentuk republik, kepala negara haruslah presiden karena negara republik menganggap negara adalah milik warganya. Untuk negara/wilayah yang ada berbentuk monarki, kepala negara haruslah raja/ratu atau kaisar, karena monarki menganggap raja/kaisar sebagai penguasa negara. Dalam bentuk sistem presidensial, jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan dijabat oleh presiden. Presiden dipilih langsung oleh rakyat.⁵⁸

b. Sistem Presidensial

Sistem presidensial menjadi pembeda, jika sistem parlementer sangat melekat dengan Inggris dalam sistem ketatanegaraan, Amerika Serikat menjadi melekat dengan sistem presidensial. Sri Soemantri menyebut USA sebagai "*the mother*" sistem pemerintahan presidensial.⁵⁹ Dalam karyanya yang terkenal Verney mencontohkan Inggris dengan pemerintahan parlementer, dan AS dengan pemerintahan presidensial.⁶⁰

⁵⁸ Meski presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, namun metode pemilihan yang digunakan berbeda. Secara umum, rumus pemilihan presiden dapat dibagi menjadi tiga: model Amerika, yang dapat disebut pemilihan semi-populer (setiap negara bagian menerima jumlah perguruan tinggi pemilihan berdasarkan jumlah penduduk; calon presiden yang memenangkan mayoritas suara) suara negara ini akan mendapatkan semua pemilih (universitas negeri), suara populer seperti yang digunakan di sebagian besar negara Amerika Latin, dan suara populer dan dukungan regional seperti yang digunakan di Nigeria dan Indonesia. Afrika Selatan adalah satu-satunya pemerintahan yang menganut sistem presidensial, tetapi presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, tidak dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Padahal negara ini sudah mengadopsi bentuk pemerintahan.

⁵⁹ Sri Soemantri, menyebutkan bahwa Inggris dan Amerika Serikat merupakan perwujudan daripada sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Karena itu, dapat dikatakan, kedua negara tersebut "*the mother*" dari sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. *Op. Cit.*, Sri Soemantri, "Sistem-Sistem Pemerintahan", hlm. 47

⁶⁰ Douglas V Verney, "*The Analysis of Political System*" (Outlage & Kegan Paul, London: 1979), p. 1-56.

c. Sistem Quasi Presidensiil

Sistem *quasi* presidensial sering disebut sebagai bentuk pemerintahan ketiga yang untuk pertama kalinya dipopulerkan Hubert Bueve Mery di tahun 1959. Walaupun demikian Duverger dianggap sebagai pakar yang memperkenalkan sistem quasi presidensial. Terkait kemungkinan perubahan sistem semi presidensial menjadi semi suplementer atau sebaliknya, Rafael Martinez dalam bukunya yang berjudul "*Semi-Presidential System: A Comparative Study*". Klasifikasi sistem semi presidensial adalah semacam Fleksibel dan sistem osilasi. Hubungan antara sistem presidensial dan sistem parlementer bergantung pada kondisi politik, sosial, dan kelembagaan masing-masing negara bagian. Sistem semi-presidensial memberikan jalan untuk menghindari perbedaan antara parlemen dan mayoritas presidensial Pendekatan terhadap risiko kebuntuan kelembagaan, ini juga memungkinkan kontrol politik pemerintah, sehingga menghindari penyalahgunaan kekuasaan presiden.⁶¹

B. Kerangka Teori

1. Teori Kepemimpinan Negara (*Imamah*)

Pembahasan tentang kepala negara hendaknya mencakup pembahasan tentang hubungan antara penguasa dan rakyat. Karena di satu sisi dapat dikatakan bahwa kedudukan kepala negara adalah hak asasi manusia. Namun di sisi lain, manusia adalah makhluk sosial dan politik yang oleh Aristoteles disebut "politisi kebun binatang". Atau dalam bahasa Ibnu Khaldun "*al-insan madaniyyun bi al-thab'i*" yang artinya manusia adalah manusia sosial naluriah.⁶²

Allah SWT menguraikan bahwa dalam suatu negara harus ada pemimpin sebagai penerus fungsi kenabian, yaitu menjaga terlaksananya doktrin agama, mengatur negara, menguasai politik, merumuskan kebijakan berdasarkan keimanan agama, dan mempersatukan umat. *Imamah* adalah dasar untuk pelaksanaan ajaran agama yang benar, sehingga kehidupan masyarakat aman dan sejahtera. Kepemimpinan semacam ini secara khusus bertanggung jawab atas berbagai bidang dan wilayah di bawah bimbingan hukum dan ajaran agama bersatu di bawah *Imamah*.⁶³

Imamah yang dimaksud Mawardi dipegang oleh khalifah (pemimpin), raja, penguasa atau kepala negara, dan ditandai sebagai agama. Kata Mawardi, "Sesungguhnya imam (khalifah) itu diproyeksikan untuk mengambil alih peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia".⁶⁴ Menurut Mawadi, ada dua

⁶¹ Rafael Mart'nez Martinez, "*Semi-Presidentialism: A Comparative Study*", ECPR Joint Sessions, (Manheim, 1999), p. 46.

⁶² Ibn Khaldun, "*Muqaddimah*" (Al-Qaeda: Dar al-Sya'b), hal. 39; Rusjdi Ali Muhammad, "*Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam: Memahami Identitas Manusia*" (Arainyi Press, Banda Aceh: 2004), hlm. 46.

⁶³ Imam Mawardi, "*Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam, terjemahan Fadhli Bahri dari kitab al-Ahkam al-Sulthaniyyah*", (Gema Insani Press, Jakarta: 1996), hlm. 14.

⁶⁴ Imam Mawardi, "*Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam, terjemahan Fadhli Bahri dari kitab al-Ahkam al-Sulthaniyyah*", (Darul Falah, Jakarta: 2006), hlm. 1

cara untuk memilih imam: *pertama*, panitia pemilihan bertugas menyeleksi imam untuk rakyat. *Kedua*, panitia imam menunjuk salah satu dari mereka sebagai imam.⁶⁵

Tabel 4

Cara Bekerjanya Teori Kepemimpinan Negara (*Imamah*)

Teori	Alasan Pemilihan Teori	Bekerjanya Teori	Pemikiran Hukum	Temuan Hukum Baru
Kepemimpinan Negara (<i>Imamah</i>) Merupakan kewajiban umat Islam untuk mengangkat pemimpin (kepala negara) melalui musyawarah. Karena posisi pemimpin bisa menggantikan fungsi profetik untuk melindungi dan mengendalikan dunia Imam Mawardi dalam <i>Al Ahkam Al Sulthaniyah</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Karakteristik Pemilihan Presiden dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia berdasarkan permusyawaratan perwakilan sesuai dengan konsep <i>Imamah</i> - Bahwa pengangkatan pemimpin disesuaikan dengan kriteria yang disepakati bersama. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melihat secara filosofis karakteristik pemilihan presiden dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia berdasarkan konsep <i>imamah</i> - Merumuskan karakteristik dan aspek permusyawaratan perwakilan dalam pemilihan presiden Indonesia berdasarkan <i>Imamah</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa karakteristik pemilihan presiden berdasarkan permusyawaratan perwakilan sesuai dengan mekanisme <i>imamah</i> - Bahwa aspek permusyawaratan perwakilan dalam pemilihan Presiden Indonesia sesuai dengan konsep <i>imamah</i> 	Bahwa karakteristik pemilihan presiden dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia berdasarkan aspek permusyawaratan perwakilan memiliki kesesuaian dengan karakter Keindonesiaan yang berdasarkan tradisi bernegara yakni nilai Islam dan kepemimpinan sebelum kemerdekaan

Teori *Imamah* dari Mawardi memiliki substansi yang merupakan kewajiban umat Islam untuk menunjuk seorang pemimpin (kepala negara). Karena posisi pemimpin bisa menggantikan fungsi kenabian dalam menjaga dan mengendalikan dunia. Dalam bukunya "*al-Ahkamal-Shulṭaniyyah*", ia juga menekankan bahwa

⁶⁵ *Ibid*

pemerintahan hukum yang menjamin keberlangsungan sosial suatu negara atau wilayah diperlukan baik secara rasional maupun dalam batas tertentu.⁶⁶

Pemimpin bertujuan menetapkan *dawlah* (negara) dan *syawkah* (otoritas) adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menegakkan agama; jadi, ketika negara dan agama benar-benar dijalankan untuk tujuan itu, maka kesejahteraan spiritual dan material pasti akan tercapai.⁶⁷

2. Teori *Originalism*

Penafsiran berasal dari beragam interpretasi dikarenakan ada banyak kepentingan dalam proses pembuatan Undang Undang Dasar sebagaimana dijelaskan Antonin Scalia dan Bryan A. Garner sebagai berikut.

*“when necessary to achieve favorable consequences for certain targeted groups of people, such as minorities, women, factory workers, the poor, homeowners, businesspeople, tenants, landlords, taxpayers, government workers, children”.*⁶⁸

Istilah *originalism* secara umum digunakan sejak tahun 1980-an. Istilah ini diperkenalkan oleh Paul Brest. Sebelumnya, istilah *interpretivisme* digunakan untuk merujuk pada aliran informasi yang berusaha menemukan teks konstitusi atau makna maksud perumus. Dalam perkembangannya, istilah *primitivisme* digunakan, bahkan mereka menolak menyebutnya interpretivisme. Aliran *primitivisme* sering dikacaukan dengan *konstruktivisme* yang ketat. Hal ini dikarenakan kedua sekolah memiliki teori yang berkaitan dengan ilmuwan tekstur, sedangkan sekolah reguler memiliki “sekolah biasa”. Namun ternyata kedua sekolah tersebut cukup berbeda. Antonin Scalia mencontohkan, *konstruktivisme* yang tegas tidak berarti dia menggunakan tongkat. “Dia menggunakan tongkat” artinya dia berjalan dengan tongkat. *“he wolks with a cane”*.

Tabel 6
Cara Bekerjanya Teori Penafsiran *Originalism*

Teori	Alasan Pemilihan Teori	Bekerjanya Teori	Pemikiran Hukum	Temuan Hukum Baru
<i>Originalism</i> Penjelasan bukanlah konstruksi, Primitivisme	- Teori ini akan melihat penafsiran perumus asli teks UUD 1945 mengenai	- Mengekplorasi pemikiran-pemikiran <i>the founding father</i> untuk mengetahui	- Bahwa adanya suatu konstitusi seharusnya sesuai dengan keinginan	Bahwa amandemen UUD NRI Tahun 1945 banyak meninggalkan pemikiran dan

⁶⁶ Imam Mawardi, *“Hukum Tatanegara Islam dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), edisi terjemahan dari judul aslinya *Al Ahkamus-Sulthoniyah Wal Wilaayaatud-Diniyyah*” (Al Maktab al Islami, Beirut; 1996), hlm. 63.

⁶⁷ Antony Black, *“Pemikiran Politik Islam”* (Serambi Ilmu Semesta, Jakarta: 2006), hlm. 292.

⁶⁸ Antonin Scalia & Bryan A. Garner, *“Reading Law: The Interpretation of Legal Texts”*, (Thomson/West, United States of America: 2012), p. 1

Memberikan jawaban atas ketetapan konstitusi tertentu dalam peristiwa tertentu, atau jika terjadi perselisihan pemahaman tentang konstitusi, maka makna konstitusi atau dari maksud perumusanya	<p>konsep sistem pemilihan presiden berdasarkan permusyawaratan perwakilan</p> <p>- Bahwa terjadinya amandemen konstitusi seharusnya sesuai dengan perumus awal teks konstitusi dan karakteristik keindonesiaan</p>	<p>konsep sistem pemilihan Presiden dalam UUD 1945.</p> <p>- Mengakomodasi norma hukum yang ada dalam UUD 1945 sebelum dan pasca amandemen dominan pemikiran siapa dalam konsep pemilihan presiden Indonesia</p>	<p>perumus awalnya</p> <p>- Bahwa amandemen konstitusi harus merujuk kepada teks dari perumus awalnya dalam konsep sistem pemilihan presiden yang sesuai dengan karakteristik keindonesiaan</p>	<p>teks dari perumus aslinya dalam konsep pemilihan presiden sehingga terjadi pergeseran yang signifikan dalam sistem pemilihan Presiden yang tidak sesuai dengan karakteristik keindonesiaan</p>
Antonin Scalia dalam <i>"Reading Law: The Interpretation of Legal Texts"</i> (2012)				

Menurut Antonin Scalia, orisinalitas adalah tafsir, bukan penjelasan. Orisinalitas memberikan jawaban atas ketetapan konstitusi tertentu untuk peristiwa tertentu, atau ketika ada perselisihan tentang pemahaman konstitusi, makna teks konstitusi, atau maksud pembuatnya.⁶⁹

Konsep sistem ketatanegaraan lebih luas daripada konsep sistem pemerintahan. Konsep sistem pemerintahan mencakup hubungan antara badan legislatif dan eksekutif, dan hubungan ini biasanya melahirkan sistem presiden dan parlementer. Konsep sistem ketatanegaraan lebih seperti konsep sistem pemerintahan dalam arti luas, meliputi seluruh fungsi pemerintahan (perundang-undangan, penyelenggaraan, dan peradilan) dan hubungan antara negara dan warga negara. Sistem ketatanegaraan suatu negara dapat ditemukan dalam konstitusi. Konstitusi (*constitution*) merupakan suatu pengertian tentang seperangkat prinsip nilai dan norma dasar yang mengatur mengenai apa dan bagaimana suatu sistem kekuasaan dilembagakan dan dijalankan untuk mencapai tujuan bersama dalam wadah organisasi. Brian Thompson menyederhanakan

⁶⁹ *Ibid*

pengertian konstitusi dengan menyatakan: *a contitution is a document which contains the rules for the operation of an organization.*⁷⁰

3. Teori Permusyawaratan Perwakilan

Perkembangan permusyawaratan perwakilan terdapat demokrasi deliberatif merupakan gagasan yang berkembang pada tahun 1980-an, berkat Jurgen Habermas.⁷¹ Konsep demokrasi deliberatif tidak didasarkan pada demokrasi voting mayoritas, tetapi menekankan pada konsep demokrasi yang mengarah pada ketaatan bersama.⁷² Konsep demokrasi ini memberikan konsensus untuk mengurangi gesekan kelompok minoritas yang tidak menerima keputusan demokratis.⁷³

Teori Permusyawaratan Perwakilan yang juga disinggung oleh Habermas dalam demokrasi deliberatif dihadirkan oleh perumus asli teks UUD tahun 1945 bahwa kedaulatan rakyat adalah kedaulatan politik yang dimiliki oleh rakyat dan dilaksanakan oleh badan perwakilan MPR. Lembaga yang menjalankan kedaulatan rakyat memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang dasar untuk menghasilkan supremasi hukum, dan presiden serta Partai Progresif Demokratik akan menjalankan aturan hukum

⁷⁰ Brian Thompson, *“Textbook on Constitutional Law and Administrative Law”*, (Blackstone Press, London: 1997), p. 3.

⁷¹ Habermas mengartikan demokrasi deliberatif meminati persoalan-persoalan yang substantif seperti persoalan kesahihan keputusan kolektif, aarti kontrol demokratis dapat dikontrol melalui opini publik. Demokrasi menghendaki bagaimana menyelesaikan masalah atau konflik tidak dengan cara kekerasan tetapi lebih kepada diskursif. *Deliberatif discourse index* sebagai upaya untuk mengevaluasi argumen-argumen yang dimunculkan lewat forum debat, dilaksanakan di institusi pemerintahan baik eksekutif, legislatif dan yudikatif namun yang dikandungnya adalah kekuatan rasionalitas dan *common sense*. Para partisipan bernalar dan berharap penalaran yang mereka ajukan bakal membantu proses pengambilan keputusan kolektif yang menurut Habermas dalam liberasi ideal, *no force except that of the better argument is exercised.*” Jurgen Habersmas, *Legitimation Chrisis tr. T. McCarthy*, (Boston: Beacon Press, 1996) P. 108

⁷² Untuk mencapai konsensus rasional bersama, Habermas mengusulkan tiga prasyarat komunikasi berikut: *Pertama*, hanya ketika orang menggunakan bahasa yang sama dan selalu mengikuti logika dan aturan semantik bahasa barulah mereka dapat berpartisipasi dalam wacana. *Kedua*, hanya jika masing-masing peserta memiliki niat untuk mencapai mufakat yang adil dan memperlakukan peserta lain dengan tulus, memiliki tanggung jawab yang sama, dan tidak menganggapnya sebagai alat otonomi belaka, barulah kita dapat mencapai kesetaraan kesempatan dalam wacana. *Ketiga*, aturan secara umum harus diperhatikan untuk melindungi proses wacana dari tekanan dan diskriminasi. Aturan ini harus memastikan bahwa orang mencapai konsensus melalui paksaan, daripada mengusulkan argumen yang lebih baik. Habermas percaya bahwa melalui prosedur komunikasi yang wajar dan diskusi aktual, risiko ketidaksepakatan yang berujung pada keruntuhan dapat dihindari. Lihat F. Budi Hardiman, *“Demokrasi Deliberatif, Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas”* (Kanisius: Yogyakarta, 2009) h. 76

⁷³ Demokrasi konsensus menjadi bentuk yang harus praktis dan terkelola. Ia dibangun sebagai sistem dan prosedural. Kekhalifahan utama dalam pemikiran politik yang mengasumsikan “representasi”. Pengertian representasi dimulai dari ilusi bahasa, bahwa satu hal dapat ditirukan persis dalam bentuk lain, misalnya kata perwakilan. Goenawan Mohammad mengatakan bahwa demokrasi acapkali menghentikan proses politik dengan berdasarkan suara terbanyak. Artinya semuanya menjadi kaku dan dianggap menyimpang, seperti suara *obscene* disingkirkan. Terkadang demokrasi mengabaikan pemikiran dan gagasan alternatif baru. Ia tak membuka dirinya untuk inovasi pemikiran ketika dihadapkan pada pilihan (*choice*). Lihat Goenawan Mohammad, *“Demokrasi dan Kekecewaannya”* (Jakarta: Paramadina Press, 2009) h. 44

ini dalam bentuk kekuasaan untuk membuat undang-undang. Supremasi hukum menjadi dasar bagi MPR dan lembaga negara lainnya untuk menjalankan fungsi dan kekuasaan negara sebagai pemegang kedaulatan negara. Konsep kedaulatan rakyat harus dikaitkan dengan ketentuan UUD 1945 yang berbunyi: "Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat" (Pasal 1 ayat 2 UUD 1945).

Tentang perwakilan Yamin menyatakan bahwa "suatu negara Indonesia jika perwakilan tidak dimanfaatkan, koneksi yang terbentuk tentunya tidak akan lekat dengan ruh struktur kenegaraan rakyat. Di sisi lain, jika kita tetap menggunakan basis perwakilan Indonesia di seluruh bagian pemerintahan negara dengan mengedepankan basis musyawarah dan rasionalisme, sebentar lagi kita akan sampai pada tatanan negara yang masuk akal dengan peradaban kita." Soal hikmah, Seseorang berkata, kearifan menjadi pemimpin bangsa Indonesia adalah rasionalisme yang sehat, karena menghilangkan semangat anarki, liberalisme dan kolonialisme.⁷⁴

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN:

KARAKTERISTIK DAN KONSEP SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN BERDASARKAN PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN SESUAI KONTEKS KEINDONESIAAN

A. Karakteristik Permusyawaratan Perwakilan dalam Sistem Pemilihan Presiden Indonesia

Tabel 7
Pemikiran Filosofis yang Mendasari Rumusan Norma Hukum

No	Karakteristik Permusyawaratan Perwakilan dalam Sistem Pemilihan Presiden	Periodesasi Pemilihan Presiden										
		Awal	Orde Lama				Orde Baru	Transisi		Era Reformasi		
		1945 - 1949	1949 - 1950	1950 - 1959	1959 - 1966	1967 - 1998	1998 - 1999	1999 - 2004	2004 - 2009	2009 - 2014	2014 - 2019	
1.	Aspek 1	Ö	X ₂	X ₂	X ₂	X ₂	Ö	Ö	X ₁	X ₁	X ₁	
2.	Aspek 2	Ö	X ₂	X ₂	X ₂	X ₂	Ö	Ö	X ₁	X ₁	X ₁	
3.	Aspek 3	Ö	X ₂	X ₂	X ₂	X ₂	Ö	Ö	X ₁	X ₁	X ₁	
4.	Aspek 4	Ö	X ₂	X ₂	X ₂	X ₂	Ö	Ö	X ₁	X ₁	X ₁	
5.	Aspek 5	Ö	Ö	Ö	X ₂	X ₂	Ö	Ö	X ₁	X ₁	X ₁	

Keterangan :

Ö : memenuhi aspek

X₁ : tidak ada

X₂ : ada tetapi tidak memenuhi aspek (menggunakan aspek lain)

⁷⁴ *Ibid*

Tabel 8
Rumusan Norma Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang
Sistem Pemilihan Presiden

No.	Karakteristik Permusyawaratan Perwakilan dalam Sistem Pemilihan Presiden	Periodesasi Pemilihan Presiden										
		Awal	Orde Lama				Orde Baru	Transisi		Era Reformasi		
		1945 - 1949	1949 - 1950	1950 - 1959	1959 - 1966	1967 - 1998	1998 - 1999	1999 - 2004	2004 - 2009	2009 - 2014	2014 - 2019	
1.	Aspek 1	Ö	X ₂	X ₂	X ₂	X ₂	Ö	Ö	X ₁	X ₁	X ₁	
2.	Aspek 2	Ö	X ₂	X ₂	X ₂	X ₂	Ö	Ö	X ₁	X ₁	X ₁	
3.	Aspek 3	Ö	X ₂	X ₂	X ₂	X ₂	Ö	Ö	X ₁	X ₁	X ₁	
4.	Aspek 4	Ö	X ₂	X ₂	X ₂	X ₂	Ö	Ö	X ₁	X ₁	X ₁	
5.	Aspek 5	Ö	Ö	Ö	X ₂	X ₂	Ö	Ö	X ₁	X ₁	X ₁	

Keterangan :

Ö : memenuhi aspek

X₁ : tidak ada

X₂ : ada tetapi tidak memenuhi aspek (menggunakan aspek lain)

Tabel 9
Realisasi dari Isi Perundang-Undangan Tentang Sistem Pemilihan Presiden

No.	Karakteristik Permusyawaratan Perwakilan dalam Sistem Pemilihan Presiden	Periodesasi Pemilihan Presiden										
		Awal	Orde Lama				Orde Baru	Transisi		Era Reformasi		
		1945 - 1949	1949 - 1950	1950 - 1959	1959 - 1966	1967 - 1998	1998 - 1999	1999 - 2004	2004 - 2009	2009 - 2014	2014 - 2019	
1.	Aspek 1	Ö	X ₂	X ₂	X ₂	X ₂	Ö	Ö	X ₁	X ₁	X ₁	
2.	Aspek 2	Ö	X ₂	X ₂	X ₂	X ₂	Ö	Ö	X ₁	X ₁	X ₁	
3.	Aspek 3	Ö	X ₂	X ₂	X ₂	X ₂	Ö	Ö	X ₁	X ₁	X ₁	
4.	Aspek 4	Ö	X ₂	X ₂	X ₂	X ₂	Ö	Ö	X ₁	X ₁	X ₁	
5.	Aspek 5	Ö	Ö	Ö	X ₂	X ₂	Ö	Ö	X ₁	X ₁	X ₁	

Keterangan :

Ö : memenuhi aspek

X₁ : tidak ada

X₂ : ada tetapi tidak memenuhi aspek (menggunakan aspek lain)

Tabel 10
Karakteristik Sistem Pemilihan Presiden Indonesia

Periode	Kesepakatan	Kebersamaan	Keluargaan	Keterbukaan	Keterwakilan	Nama Karakteristik
Pada Masa Awal Tahun 1945	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Permusyawaratan Perwakilan
Masa Orde Lama 1949-1966	X ₂	X ₂	X ₂	X ₂	X ₂	Transformatif
Orde Baru Tahun 1966-1998	X ₂	X ₂	X ₂	X ₂	X ₂	Justifikatif
Masa Transisi Reformasi Tahun 1998-1999	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Permusyawaratan Perwakilan
Pada Masa Reformasi Tahun 2004-2019	X ₁	X ₁	X ₁	X ₁	X ₁	Liberal

Keterangan :

Ö : memenuhi aspek

X₁ : tidak ada

X₂ : ada tetapi tidak memenuhi aspek (menggunakan aspek lain)

Analisis dari data kelima periodisasi ditinjau dari kelima aspek permusyawaratan perwakilan yakni kesepakatan, kebersamaan, keluargaan, keterbukaan dan keterwakilan dengan menggunakan teori *imamah* dari Mawardi mengenai mekanisme pemilihan dan pengangkatan imam dalam hal sistem Indonesia dikenal dengan presiden. Menurut Mawardi, ada dua cara pemilihan pemimpin, yaitu pemilihan yang dilakukan oleh *Ahl al-hall wa al-aqd* dan imam, khalifah atau pengangkatan atau kehendak raja. Mawardi menyampaikan dua hal penting.

1. *Ahl al-Ikhtiar* (Pemilih). Tidak semua orang berhak memilih imam. Imam hanya dipilih oleh wakil-wakil rakyat dengan memiliki syarat-syarat tertentu, seperti bersifat adil, mengetahui syarat-syarat khalifah, dan memiliki kesanggupan untuk menentukan dengan bijaksana siapa yang berhak menjadi khalifah dari calon-calon yang ada. Wakil-wakil rakyat ini disebut *ahl al-hall wa al-aqd* (orang-orang yang mempunyai wewenang untuk memecahkan masalah dan menetapkan keputusan). Begitu pentingnya kewenangan *ahl al-hall wa al-aqd*, Mawardi menetapkan beberapa syarat menjadi *ahl al-Ikhtiar*, yaitu: (1) memiliki sikap adil; (2) memiliki ilmu pengetahuan yang mampu mengetahui siapa yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai imam; dan (3) memiliki wawasan yang luas dan kearifan dalam

memilih siapa yang paling tepat untuk menjadi imam dan mampu mengelola kepentingan umat di antara mereka yang memenuhi syarat untuk jabatan itu.⁷⁵

2. *Al-Imamah* (yang berhak dipilih). Imam atau khalifah yang harus memenuhi tujuh orang kriteria, yakni: (1) memiliki sifat adil dengan segala persyaratannya, (2) memiliki ilmu pengetahuan yang memadai untuk berjihad dalam masalah hukum dan pengelolaannya, (3) sehat mental, (4) sehat fisik. Syarat berikutnya, (5) berwawasan luas untuk mengatur kehidupan dan kepentingan umat, dan (6) memiliki keberanian dan ketegasan untuk melindungi rakyat dan menumpas musuh, dan (7) keturunan Kuraisy. Hal ini disebabkan telah ditetapkan oleh nas dan ijmak sebagaimana disabdakan, "*al-A'imma min Quraisy*", yang artinya: "Para pemimpin adalah harus dari keturunan Kuraisy" (HR. al-Bukhari dan Muslim).⁷⁶

Periode awal tahun 1945 tepatnya 18 Agustus 1945 pemilihan presiden yang memenuhi kelima aspek permusyawaratan perwakilan yang berkesesuaian dengan teori imamah dengan mekanisme seleksi dilakukan oleh *ahl al-hall wa al-aqd*. Soekarno dan Hatta terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dipuji karena memiliki kekuatan untuk menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan dalam Komite Nasional Indonesia Pusat pasca disahkannya UUD 1945 dan memiliki dasar Pasal III aturan peralihannya.

Soekarno dan Hatta sebagai pejuang kemerdekaan dinilai memiliki kriteria sebagai pemimpin. Selain memperjuangkan kemerdekaan dan menandatangani teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soekarno dan Hatta dikenal sebagai tokoh yang memiliki integritas yang tinggi, memenuhi enam kriteria yang disampaikan Mawardi kecuali yang ketujuh harus keturunan Quraisy karena harus dilacak benar nasab dari keduanya.

Dua hal penting yang disampaikan Mawardi yakni *ahl al ikhtiar* (para pemilih) dan *ahl al imamah* (yang berhak dipilih) semuanya memenuhi terpilihnya Soekarno dan Hatta secara aklamasi menjadi presiden dan wakil presiden pertama dalam sejarah Indonesia satu hari pasca kemerdekaan. Sistem pemilihan presiden Indonesia perdana menjadi karakteristik permusyawaratan perwakilan yang memenuhi kelima aspeknya.

Perubahan terjadi setelah adanya pergantian Konstitusi di Indonesia dari UUD 1945 menjadi Konstitusi RIS 1949 dimana ada dua kepemimpinan antara Soekarno dan Asaat konsekuensi dari perjanjian meja bundar di Den Haag yang menjadikan Indonesia menjadi negara serikat. Sistem pemilihan kepemimpinan

⁷⁵ *Op. Cit.*, Mawardi, al-Ahkam..., h. 6.

⁷⁶ Dengan premis bahwa seleksi dan syarat calon imam sangat ketat, jika imam menyimpang dari standar pemimpin pasti akan menimbulkan konsekuensi pemakzulan atau pemecatan imam. Inilah pentingnya kesepakatan antara imam dan umat, dan itu adalah janji untuk memenuhi kewajibannya dengan itikad baik dan ikhlas. Bagi masyarakat, kesepakatan itu berarti mereka akan taat dan mendukung Khalifah atau Imam. Jika ketaatan umat hilang karena imam melanggar kesepakatannya dengan umat, maka khalifah juga akan hilang sampai imam dimakzulkan/dibubarkan. Menurut Imam al-Mawardi, jika (1) khalifah atau imam kehilangan keadilan, terobsesi dengan keinginan dan melakukan monka, maka kehilangan khalifah dapat terjadi; (2) Khalifah telah kalah kesehatan mental atau fisik (misalnya, kehilangan pikiran, penglihatan, rasa dan penciuman); *Ibid*, hlm. 6-17

yang berdasarkan Pasal 2 Konstitusi RIS 1949 terdapat karakteristik permusyawaratan perwakilan tetapi tidak memenuhi kelima aspeknya. Aspek kebersamaan dan keterwakilan menjadi tidak terlihat karena adanya “intervensi” Belanda hasil dari perjanjian meja bundar. Republik Indonesia Serikat yang tidak lama bertahan kemudian berganti dengan adanya mosi integral Natsir sehingga pada 17 Agustus 1950 Konstitusi RIS berganti menjadi UUDS 1950 yang mengakhiri bentuk negara serikat kembali kepada negara kesatuan dengan presiden Soekarno dan wakil presidennya Hatta berdasarkan pasal 45 UUDS 1950.

Perjalanan kepemimpinan Soekarno sebagai presiden ditandai dengan mundurnya Hatta sebagai wakil presiden pada tahun 1956 praktis setelah itu Soekarno menjadi presiden tanpa didampingi wakil presiden. Puncaknya pada tahun 1959 ditandai dengan dekrit presiden yang salah satunya membubarkan badan konstituante dan Soekarno kemudian mengangkat dirinya sendiri menjadi presiden seumur hidup dan memperkenalkan istilah panglima revolusi dengan demokrasi terpimpin hingga pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Seluruh dinamika yang terjadi dalam sistem pemilihan presiden mulai dari pemikiran filosofis yang mendasari rumusan norma hukum, pada masa orde lama terhitung sejak 1949-1966 berkarakter transformatif karena banyak terjadi perubahan dalam pengisian jabatan presiden.

Pasca orde lama kepemimpinan berpindah sejak tahun 1966 kepada Soeharto yang dikukuhkan sebagai presiden pada tahun 1968 setelah pencabutan jabatan presiden dari Soekarno oleh MPRS pada tahun 1967. Periode perubahan dari orde lama ini disebut dengan periode orde baru yang awalnya disepakati Soeharto dikukuhkan sebagai presiden sejak 1968 tanpa adanya wakil presiden hingga adanya Ketetapan MPR No. II/MPR/1973 tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Hal itu menyebabkan pergesaran Pasal 6 ayat (1) dan (2) UUD 1945 menjadikan calon presiden tunggal tetap bisa ditetapkan oleh MPR menjadi presiden menjadi justifikatif karena penunjukan langsung dari MPR tanpa pemilihan. Dengan demikian, aspek permusyawaratan tidak terpenuhi karena menggunakan aspek yang lain hingga tahun 1997 Soeharto terpilih secara berturut-turut setiap lima tahun sekali hingga mundur karena krisis moneter dan desakan dari demonstrasi mahasiswa serta tokoh reformasi pada tahun 1998.

Sistem pemilihan presiden dengan karakteristik permusyawaratan perwakilan muncul kembali pada masa transisi terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan Megawati sebagai Wakil Presiden pada tahun 1999 berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan (2) UUD 1945 melalui MPR RI sebagai penjelmaan rakyat Indonesia yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sila keempat Pancasila. Karakteristik permusyawaratan perwakilan kemudian menjadi liberal pada sistem pemilihan presiden 2004 hingga 2019 berdasarkan Pasal 6A dan 22E UUD NRI Tahun 1945 yang berbiaya mahal. Banyak korban dan menghadirkan neo-otoritarianisme yang semuanya tidak memenuhi kelima aspek permusyawaratan perwakilan. Puncaknya pada tahun 2019 dengan keserentakannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 semakin menambah

permasalahan sistem pemilihan presiden pasca amandemen yang sangat liberal dan berjalannya pemerintahan terlihat memunculkan oligarki.

Tabel 11
Dasar Hukum Sistem Pemilihan Presiden Indonesia

No.	Periode	Dasar Hukum
1.	Pra Kemerdekaan Sebelum 1945	Piagam Jakarta
2.	Tahun 1945-1949	Pasal III aturan peralihan UUD 1945
3.	Tahun 1949-1950	Pasal 2 Konstitusi RIS 1949
4.	Tahun 1950-1959	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 45 UUDS 1950 - UU No. 7 Tahun 1953
5.	Tahun 1959-1966	Dekrit Presiden (UUD 1945)
6.	Orde Baru Tahun 1967-1998	Ketetapan MPR No. II/MPR/1973
7.	Transisi Reformasi 1998-1999	Pasal 6 ayat (1) dan (2) UUD 1945
8.	Tahun 1999-2004	Pasal 6 ayat (1) dan (2) UUD 1945
9.	Tahun 2004-2009	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 6 A dan 22E UUD NRI Tahun 1945 - UU Nomor 23 Tahun 2003
10.	Tahun 2009-2014	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 6A dan 22E UUD NRI Tahun 1945 - UU Nomor 42 Tahun 2008
11.	Tahun 2014-2019	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 6A dan 22E UUD NRI Tahun 1945 - Undang Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
12.	Tahun 2019-2024	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 6A dan 22E UUD NRI Tahun 1945 - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013

B. Konsep Sistem Pemilihan Presiden Berdasarkan Permusyawaratan Perwakilan yang Berkarakter Keindonesiaan

1. Sumber Konsep Ideal Permusyawaratan Perwakilan dalam Sistem Pemilihan Presiden Indonesia

Hasil analisis ditinjau dari lima aspek permusyawaratan perwakilan menunjukkan bahwa karakteristik permusyawaratan perwakilan dengan menggunakan teori *imamah* dari Mawardi bersumber pada Islam dan tradisi bernegara sebelum kemerdekaan. Bahwa Indonesia sebagai negara dan bangsa telah menjadi kesepakatan nasional (*Darul Ahdi*) melalui permusyawaratan perwakilan yang di dalamnya terdapat Pancasila sebagai dasar negara. Konsensus nasional tersebut harus dipegang dan tidak boleh dilepas oleh siapa pun, sehingga tetap utuh dan berdiri tegak sebagaimana diletakkan fondasinya oleh para pendiri bangsa. Pancasila sendiri bagi Umat Islam sebagai mayoritas sudah merupakan dasar negara yang disepakati. Di dalamnya terdapat nilai-nilai dasar yang sejalan dengan Islam dan mencerminkan Islam, serta

tidak ada yang bertentangan dengan Islam. Karenanya Indonesia yang berdasar Pancasila itu dapat dikatakan sebagai *darussalam*. Maka yang diperlukan ialah mengisi dan membangun Indonesia sebagai negara dan bangsa melalui peran seluruh komponen bangsa. Itulah yang disebut dengan kesaksian atau "*syahadah*" sebagaimana dalam Al Qur'an disebut "*syuhada ala al-nas*".⁷⁷

Sejarah *Darul Ahdi Wa Syahdah* bisa dilihat dari musyawarah antara Nabi Muhammad dan sahabat. Perang Badar terjadi pada 17 Maret 324 M atau pada tanggal 2 Ramadhan dalam penanggalan Hijriah. Saat itu, Al Habab bin Mundzir bertanya kepada Rasulullah SAW: "Rasulullah, apakah kamu mendapat ilham dari Allah SWT dan memilih tempat yang tidak bisa diubah ini?" Itu berdasarkan taktik perang. Rasulullah menjawab: "Saya memilih tempat ini berdasarkan pendapat dan strategi perang saya sendiri." Setelah mendengar jawaban dari Nabi, Al Habab mengemukakan pendapatnya sendiri bahwa itu bukan tempat yang tepat, pasukan arahkan ke perairan yang dekat dengan musuh, di mana kita membangun benteng dan membuka penampungan di sana dan isi dengan air. Dengan cara ini, jika kita memiliki air minum yang cukup, kita akan melawan dan musuh tidak akan bisa mendapatkan air minum. Rasulullah menjawab bahwa pendapat itu dengan sangat bagus. Usai mengambil keputusan tersebut, Rasulullah mengirimkan isyarat kepada umat Islam untuk segera pindah ke tempat yang diusulkan Habab bin Mudzir. Saat Quraish dengan arogan berbaris menuju Lembah Badr. Rasulullah mengangkat tangannya sembari berdoa kepada Allah Swt. Wahai Rabbi jika kekuatan kecil ini lenyap, tidak ada orang lain yang akan menyembahmu dengan hati yang tulus". Kisah ini adalah bagian dari fakta, Nabi Muhammad bin Abdullah diangkat sebagai Nabi dan Rasul juga manusia. Faktanya, setelah mempertimbangkan dengan cermat, Rasulullah secara terbuka menerima pendapat Habab bin Mundzir.

Kisah yang menginspirasi *the founding father* Indonesia untuk mendahulukan bermusyawarah dalam mengambil setiap keputusan salah satunya berkomitmen menjadikan Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi Was Syahadah* salah satu keputusan Muktamar Muhammadiyah di Makasar pada tahun 2015. Pada kenyataannya nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan, sehingga masih terdapat penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dari maraknya praktik korupsi, kekerasan, skandal moral, gesekan sosial, dan eksploitasi alam yang tidak bertanggung jawab. Kemiskinan dan pemerataan hasil pembangunan nasional yang belum terealisasi. Elit mengabaikan dan memprioritaskan kepentingan pribadi, dan kroni-kroni mematahkan sendi negara dan kehidupannya. Pada saat yang sama, kehidupan sosial-politik, ekonomi dan budaya seringkali benar-benar bebas terutama pasca amandemen dengan mekanisme pemilihan umum secara langsung khususnya

⁷⁷ Kesediaan umat Islam melalui Ki Bagus Hadikusumo selaku Ketua PP Muhammadiyah kala itu pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 untuk bersedia mencoret tujuh kata dalam Pembukaan UUD 1945 demi keutuhan Indonesia yang baru satu hari diproklamasikan, menunjukkan jiwa pengorbanan umat Islam yang tak terhingga. Padahal jika golongan Islam mau memaksakan sungguh dapat terwujud karena kedudukannya sebagai mayoritas. Peristiwa sejarah penting itu oleh Alamsjah Ratu Prawiranegara disebut hadiah terbesar dari umat Islam untuk Indonesia. *Ibid*, hlm. 22.

pilpres yang meninggalkan karakteristik permusyawaratan perwakilan yang telah diletakan oleh pendiri Indonesia.

Konsep sistem pemilihan berdasarkan permusyawaratan perwakilan dilaksanakan dengan anggun dan bermartabat oleh Muhammadiyah yang mekanismenya diatur untuk menjaring calon pimpinan dari seluruh Pimpinan Muhammadiyah Se-Indonesia dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan kemudian oleh panitia pemilihan calon yang diajukan diserahkan surat kesediaan. Jika menolak, berarti pencalonan tidak lanjutkan, namun ketika menerima berkas wajib dikembalikan untuk dibawa ke Tanwir untuk menjaring nama-nama calon Pimpinan Muhammadiyah yang bersedia dipilih dengan musyawarah menjadi 39 nama. Sidang Tanwir yang dihadiri Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Se-Indonesia. 39 nama hasil sidang tanwir dibawa ke Mukhtar Muhammadiyah untuk dipilih kurang lebih 2.600 pemilih dari berbagai Pimpinan mulai dari Perwakilan tingkat Ranting, Cabang, Daerah, Wilayah dan Pusat Muhammadiyah hingga menjadi 13 nama. Penentuan siapa yang menjadi Ketua Umum dilakukan dengan bermusyawarah dari 13 nama yang terpilih dalam mukhtar hingga disahkan dalam Mukhtar. Melalui konsep sistem pemilihan berdasarkan permusyawaratan perwakilan lahir tokoh-tokoh dan negarawan hebat dari Muhammadiyah.

Kelembagaan demokrasi di Indonesia, sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan terdapat pengaruh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama ditegaskan oleh Aidul, *"Demokrasi perwakilan tidak bersendi pada aturan mayoritas atau suara terbanyak, melainkan pada proses permusyawaratan yang memungkinkan proses perundingan secara rasional dan partisipatif"*. Inilah konsep membangun demokrasi perwakilan.⁷⁸

Demokrasi di Indonesia seharusnya berdasarkan *worldview*⁷⁹ Pancasila yakni pandangan hidup tentang realitas, kebenaran dan menjadikan Pancasila sumber dari Semua sumber hukum di negara dan kehidupan nasional. Yang dimaksud dengan "demokrasi pancasila" adalah kedaulatan rakyat yang terintegrasi erat dengan sila lain dan bersumber dari cita-cita kekeluargaan dan gotong-royong.⁸⁰ Perubahan sistem

⁷⁸ Aidul Fitriadi Azhari, *"Rekonstruksi Tradisi Bernegara dalam UUD 1945"* (Genta Publishing, Yogyakarta: 2014), hlm. 49-50.

⁷⁹ Pandangan hidup adalah melihat segala sesuatu dari perspektif epistemologis, dan dapat digunakan sebagai kerangka untuk mempelajari segala sesuatu. Karena, pandangan dunia merupakan suatu konsep yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan cara pandang manusia tanpa melihat negara atau agamanya, maka terdapat beberapa definisi dari pandangan dunia, dan juga dapat mendeskripsikan secara luas dan sempit. Pandangan Naquib al-Attas tentang pandangan dunia Islam adalah pandangan Islam tentang realitas dan kebenaran, yang terlihat di hati manusia dan menjelaskan hakikat keberadaan. Karena Islam mengeluarkan bentuk yang umum, maka pandangan dunia Islam berarti pandangan Islam tentang wujud.). Lihat S.M.N, al-Attas, *"in his Prolegomena to The Metaphysics of Islam An Exposition of the Fundamental Element of the Worldview of Islam"* (ISTAC, Kuala Lumpur: 1995), p. 2.

⁸⁰ Musyawarah atas gagasan sebagai bentuk demokrasi merupakan dasar penelitian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demokrasi yang dikenal sebagai pilihan membangun negara diberi tambahan ciri "demokrasi Pancasila". Mahfud MD menegaskan bahwa istilah "demokrasi Pancasila" sangat populer di era orde baru, yang sangat kontras dengan "demokrasi terpimpin". Tentunya, upaya sentralisasi kekuasaan di era orde lama begitu kentara sehingga bentuk Ketetapan MPRS VIII/MPRS/1965 berhasil

pemilihan Presiden seharusnya mengikuti *worldview* Pancasila sesuai dengan pemikiran dari perumus asli UUD 1945 yang berdasarkan teori *originalism* harusnya diikuti oleh siapapun ketika mengubah atau mengamandemen UUD 1945 sebagai acuan sistem pemilihan presiden yang dalam kenyataannya pasca amandemen mengarah kepada liberalisme yang menimbulkan berbagai masalah. Seharusnya sistem pemilihan Presiden mengikuti tradisi bernegara di Indonesia agar tidak terjadi komplikasi sistem yang tidak sesuai dengan kultur Indonesia. Salah satu yang bisa dijadikan rujukan sistem pemilihan pemimpin yang ada dalam Kesultanan Buton di Sulawesi Tenggara dengan mekanisme mengarah kepada permusyawaratan perwakilan melalui lembaga permusyawaratan untuk memilih Sultan dengan tidak melihat garis keturunannya⁸¹ diatur dalam Undang-Undang Kesultanan yang bernama *Martabat Tujuh*.⁸² Termasuk adanya Juru Pengambet dalam Kerajaan Sunda dan jaringannya Kesultanan Kebantenan yang mempunyai kewenangan menetapkan pergantian raja atau Sultan.⁸³ Termasuk adanya lembaga permusyawaratan dalam penentuan siapa yang akan menjadi raja atau sultan seperti yang terjadi di Kerajaan Sunda dan Kesultanan Kebantenan melalui Juru Penghambet.

Tradisi bernegara seharusnya menjadi bagian penting dan menjadi pedoman dalam melakukan perubahan konstitusi yang menjadi tuntutan reformasi. Ketika rezim Orde Baru runtuh pada 21 Mei 1998 setelah 32 tahun berkuasa, berbagai persyaratan reformasi, seperti pemerintahan konstitusional dan supremasi hukum. Pada intinya berbagai permasalahan telah muncul, dan permasalahan tersebut harus segera diperhatikan, seperti pemulihan ekonomi, pemulihan dan peningkatan stabilitas politik dan keamanan, serta kepatuhan pada konsistensi negara hukum. Dari sudut pandang tertentu, hal ini juga terkait pemberantasan segala jenis korupsi, dan nepotisme.⁸⁴

Gagasan untuk dilakukannya reformasi hukum untuk terwujudnya supremasi sistem hukum⁸⁵ menjadi prioritas di dalam bingkai sistem ketatanegaraan Indonesia.⁸⁶

memformalkan gagasan “demokrasi terpimpin”. Lihat Moh. Mahfud MD., *“Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia”* (Rineka Cipta, Jakarta: 2003), hlm. 42.

⁸¹ Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap negara memiliki bentuk dan sistem pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan negaranya. Seperti halnya Kesultanan Buton di Sulawesi Tenggara, bentuk dan tata pemerintahan juga berpedoman pada *Murtabat Tujuh Sara Wolio*. Kepala pemerintahan dipimpin oleh Sultan, yang dipilih oleh *Siolimbona* (badan legislatif). Sistem pemerintahan Kesultanan Buton menganut sistem presidensial. Sultan langsung berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, serta menganut sistem pemerintahan Monarki Konstitusional. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, terdapat demokrasi. Lihat Muh. Ide Apurines, *“Pratik Pemerintahan Pada Kesultanan Buton”* 15401960Masehidalamhttps://www.academia.edu/11742287/Pratik_Pemerintahan_Kesultanan_Buton_Pada_tahun_1540-1960_Masehi, diakses pada 10 Desember 2017.

⁸² Lihat Abdul Rahim Yunus, *“Islamic Mysticism in the Buton Sultanate, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara Province, during the 19th century”* (Indonesian-Netherlands Cooperation on Islamic Studies, Jakarta: 1995), p. 33.

⁸⁴ Satya Arianto, *“Agenda Pertemuan Empat Tokoh”*, Koran Tempo, 12 April 2001, hal. 15; Satya Arianto, Sorotan, *Pemerintahan Baru*, Kompas, 30 Juli 2001, hlm 7.

⁸⁵ Kotan Y. Stefanus, *“Perkembangan Kekuasaan Pemerintah Negara”* (Dimensi Pendekatan Politik Hukum Terhadap Kekuasaan Presiden Menurut UUD 1945) (Univertas Atmajaya, Yogyakarta: 1998), hlm. 22.

Salah satu perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia mengenai sistem pemilihan umum.⁸⁷ Pemilihan umum, adalah perwujudan kedaulatan rakyat dan sarana menyebarkan keinginan rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 yang asli mengatur asas dan sistemnya yaitu kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila, dan menjelaskan demokrasi dalam sistem kedaulatannya. Ini adalah musyawarah yang dipimpin oleh kebijaksanaan, dan kebijaksanaan dipimpin oleh perwakilan. Dalam UUD 1945 asli, tujuan pemilihan umum adalah untuk memilih wakil rakyat di badan legislatif, bukan presiden. Pada saat yang sama, presiden dipilih oleh wakil rakyat di MPR. Kemudian, presiden dipilih oleh MPR berdasarkan musyawarah, bukan dipilih langsung oleh rakyat.

2. Kegagalan Sistem Pemilihan Presiden Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945

a. Aspek Kesepakatan

Sistem pemilihan presiden pasca amandemen dilaksanakan sejak tahun 2004 kembali dipertanyakan ketika dikaitkan dengan upaya merevitalisasi MPR, apakah kembali kepada format MPR yang lama (sebagai lembaga tertinggi)? Dalam merespon pertanyaan tersebut, ada baiknya untuk mengingat kembali fakta bahwa di bawah masing-masing UUD 1945 asli maupun pasca amandemen, memang diketahui pola pemerintahan di antara keduanya mampu melahirkan dan pernah menghadirkan memerintahan yang demokratis maupun otoritarian. Melalui UUD 1945, pada orde lama, periode 1946-1950 pola pemerintahan yang transformatif yang pada tahun 1959-1967 muncul demokrasi terpimpin yang jauh bertentangan dengan karakteristik permusyawaratan perwakilan. Pada awal Orde Baru 1967-1971, MPR masih dianggap mampu menghadirkan pola yang demokratis meski pada akhirnya berkarakter justifikatif, dan 1971-1997 MPR hadir dibawah *otoritarian* Orde Baru. Pada akhirnya lebih demokratis pada periode 1999-2001. MPR menjalankan fungsinya dengan baik pada masa transisi tahun 1999 dengan pemilihan presiden yang berkarakter permusyawaratan perwakilan. Di bawah UUD 1945 pasca perubahan menghadirkan pola pemerintahan yang liberal pada periode 2004-2014, dan periode 2014 hingga saat ini banyak pihak yang menyatakan periode *neo-otoritarian*.⁸⁸

Singkatnya, neo-otoritarianisme menggambarkan sistem dengan karakteristik sebagai berikut: (i) ekonomi kapitalis; (ii) negara memiliki kepemilikan yang luas atas alat-alat produksi; (iii) ruang publik diatur secara ketat atau dikendalikan oleh negara, yaitu otoritarianisme; (iv) Elit yang berkuasa memiliki jaringan ekonomi kapitalis; (v) aturan menguntungkan para elit untuk mempertahankan hegemoni mereka.⁸⁹ Aspek kesepakatan menghilang ditelan oleh kekuatan oligarki sehingga pemilihan presiden

⁸⁶ Sumali, "*Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang*" (*Perppu*), (UMM Press, Malang: 2002), hlm. 1

⁸⁸ Eve Warburton, "*Jokowi and the New Developmentalism*", Jurnal Indonesian Economic Studies, Vol. 52 No 3, 2016, hlm. 297-320,

⁸⁹ Daniel Goh, "*The Rise of Neo-Authoritarianism: Political Economy and Culture in the Trajectory of Singapore Capitalism*", Working Papers Center for Research on Social Organization, Department of Sociology" (The University of Michigan, Michigan: 2002), p. 47.

menjadi liberal karena mentranplantasi sistem pemilihan yang ada di Barat khususnya Amerika Serikat.

b. Aspek Kebersamaan

Peran penyelenggara pemilu sangat penting dan strategis. Dalam demokrasi yang merdeka, netralitas dan profesionalisme menjadi ciri utama penyelenggara pemilu. Ruang lingkup kerjanya meliputi prapemilihan, pemilihan dan pascapemilihan. Beberapa prinsip dasar yang harus dimiliki oleh penyelenggara pemilu adalah: kemandirian, ketidakberpihakan, integritas, transparansi, efisiensi dan profesionalisme, serta rasa pelayanan.⁹⁰ Untuk lebih melindungi kedaulatan rakyat, mengurangi dominasi satu otoritas, menegaskan perlindungan hak asasi manusia, dan membangun mekanisme *check and balance* antar otoritas, distribusi kekuasaan di antara tiga tingkat otoritas politik telah diatur kembali.⁹¹

Faktanya, fenomena ini bukan hanya perlawanan terhadap politik kartel, tetapi yang lebih penting lagi, sejak pemilihan presiden langsung di Indonesia, korupsi di bidang politik semakin serius. Media elektoral dapat digunakan sebagai sarana persaingan demokrasi agar terus menghasilkan dan memperoleh keuntungan dari pembangunan politik dan ekonomi. Platform ideologi partai politik sebenarnya belum digunakan sebagai sumber kekuatan dan perubahan politik, melainkan lembaga ketatanegaraan yang dibentuk melalui pemilu untuk memuaskan dan peduli terhadap kepentingan pemilik modal. Kewenangan yang diperoleh melalui demokrasi elektoral dalam pemilu menjadi alasan untuk dapat mengekspresikan kepentingan reproduktif tersebut secara lebih legal dan lebih dapat diterima secara politis dalam praktiknya.⁹² Fenomena pemilihan presiden langsung meninggalkan aspek kebersamaan karena persaingan para calon dan berimbas kepada pendukung calon sering berbeda, bahkan, menjurus kepada pertikaian.

c. Aspek Kekeluargaan

Model demokrasi elektoral adalah model berkarakteristik liberal tranplantasi model demokrasi Amerika di Indonesia.⁹³ Hal ini berbeda dengan pembahasan dan praktik Amandemen UUD 1945 tentang pembangunan sosial masyarakat Indonesia.

⁹⁰ Catt, helena; Ellis, Andrew; Maley, Michael; Wall, Alan; dan Wolf, Peter. *"Electoral Management Design, International Institute for Democracy and Electoral Assistance"* (IDEA), Stockholm: 2014.

⁹¹ Valina Singka Subekti, *"Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUS 1945"* (PT Rajagrafindo Pers, Jakarta: 2009), hlm. 67

⁹² Herlambang P. Wiratman, *"Pemilu dan Neo Otoritarianisme"*, KNHTN ke-5, "Tantangan Menjaga Daulat 1 Rakyat dalam Pemilihan Umum", Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Batusangkar, 9-12 November 2018.

⁹³ Dalam demokrasi elektoral kemampuan negara diukur dari kemampuannya memaksakan aturan agar ditaati oleh penduduknya dalam pemilu. Kemampuan negara adalah membangun negara nasional, semangat kebangsaan dengan cara kemerdekaan nasional, integrasi nasional dan *national building, goverment menjadi governance*, kekuatan politik, politik mempengaruhi (*political influence*) dan politik manipulasi. Lihat Samuel P. Huntington, *"Political Order In Changing Societies"* (Yale University Press, Yale: 1968), p. 34

Wacana tradisi telah berkembang di kalangan para pendiri negara Indonesia sejak awal dan menjadi konsep dasar sistem ketatanegaraan dalam UUD 1945.⁹⁴

*The third amendment to the Article 6A, especially in paragraph (1) as stated above is different from the provision of the original script of the 1945 Constitution Article 6 paragraph (2) which states that "The President and Vice President are elected by the People's Consultative Assembly with the most votes". However, a decree, MPR Decree No. II/MPR/1973, was made in 1973 by the MPR and recorded in history to show it no longer has the power, as the highest institution of the country, to elect and appoint the president and vice president.*⁹⁵

Sistem pemilihan Presiden yang dihasilkan pasca amandemen yang menjauhkannya dari aspek kekeluargaan yang menjadi prinsip Pancasila dan meninggalkan tradisi bernegara di Indonesia, berbahaya dan harus dihentikan. Pendidikan politik dan demokrasi yang diperoleh masyarakat bukanlah pendidikan yang baik dan bermoral, melainkan pendidikan yang tidak sehat.⁹⁶ Salah satunya Pemilihan presiden langsung diharapkan menghasilkan pemimpin militer yang berkualitas, namun kenyataannya justru sebaliknya. Sistem ini menciptakan pendekatan kapitalis dalam urusannya sehingga tidak terjadi sinergi antara rakyat dan presiden terpilih. Presiden yang dipilih dengan sistem pemilihan langsung tidak akan bertanggung jawab kepada rakyat karena merasa telah membeli suara rakyat, tetapi rakyat tidak dapat melakukan kontrol sosial karena mereka mengikrarkan idealisme. Jelas bertentangan dengan Pancasila dan sangat bahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Auliya dalam artikelnya menyatakan bahwa:

*Furthermore, the system causes a lot of social conflicts, wastes finance, and inefficient in assuring effective administration in the country. This proves globalists have cooperated with the reformists to damage the country's electoral system and this has led to several controversies.*⁹⁷

⁹⁴ Aidul Fitriciada Azhari, "Rekonstruksi Tradisi Bernegara Dalam UUD 1945", (Gentha Publishing, Yogyakarta, 2015), hlm. 3-4.

⁹⁵ Auliya Khasanofa, Absori, Aidul Fitriciada Azhari and Kelik Wardiono, "The Representative Consultation Concept amongst Representatives in Presidential Election System in Indonesia", *International Journal of Advanced Science and Technology*, Vol. 29, No. 6, 2020, p. 1452-1457

⁹⁶ Arend Lijphart membagi model demokrasi menjadi dua: *Pertama*, model konsensus yang meminjam unsur-unsur model konsensus Lijphart dengan prinsip pembagian kekuasaan eksekutif dengan koalisi besar, pemisahan baik formal maupun informal, bikameralisme yang seimbang antara house representatif (DPR) dengan Senator (DPD) punya fungsi legislatif yang seimbang dan perwakilan minoritas sistem multi partai, sistem multi partai, sistem partai multidimensi perwakilan proporsional, federalisme dan desentralisasi teritorial dan non teritorial, konstitusi tertulis dan veto minoritas. *Kedua*, westminster yang terdiri dari sembilan prinsip: (1) konsentrasi kekuasaan berada di tangan eksekutif; (2) fusi kekuasaan dan dominasi kabinet; (3) bikameralisme asimetris; (4) sistem dua partai; (5) sistem berdimensi tunggal; (6) sistem pemilu yang pluralitas; (7) pemerintah unitariat terpusat; (8) konstitusi tidak tertulis dan kedudukan pada tangan parlemen dan (9) demokrasi perwakilan sutuhnya. Lihat Arend Lijphart, "Democracies, Pattern of Majoritarian and Consensus Government In Twenty One Countries", (Yale University Press, New Haven Conn: 1985), p. 90-92

⁹⁷ Auliya Khasanofa, *The Concept of Deliberations Amongst Representatives in Indonesia's Presidential Election System*, *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, Vol. 24, Issue 08, 2020, p. 1766.

Pemilu langsung sama dengan menyediakan panggung terbuka bagi siapa saja, persis seperti saat pemilihan presiden 2019, menyerang personal. Memfitnah pada setiap kesempatan dalam setiap tahapan pemilihan, sebagaimana terjadi dan menggema saat ini, tidak mungkin tidak disebut sebagai bahaya buat bangsa ini. Caci maki, tuduhan asal jadi, terbelahnya masyarakat dalam satu komunitas, bahkan agama, pemberian hadiah, uang, dan lainnya termasuk permasalahan netralitas aparat pemerintah. Masyarakat memiliki kebiasaan memberi penilaian terhadap seseorang berdasarkan pendapat umum. Karena tak diperhitungkan, maka tak terperhitungkan pula bagaimana pendapat umum direncanakan untuk mengesankan dalam nada mengelabui dan menyesatkan orang banyak atas sosok calon presiden itu. Bahaya uang yang telah menjelma dalam pemilihan konsul, sebuah jabatan yang hanya bisa dipangku seorang konsul selama setahun dalam tradisi Republik Romawi, sejak tahun 68 Masehi, luput dari potret mereka. Caci maki atas agama calon presiden yang dialamatkan dan menimpa Thomas Jefferson dalam pilpres tahun 1801 terabaikan begitu saja. Tak banyak orang tahu tentang mutu, bobot capres dan cawapres, hal yang mewarnai perdebatan gagasan pemilihan langsung sejak tahun 1787.⁹⁸

d. Aspek Keterbukaan

Aspek keterbukaan terberangus dengan meningkatnya kejahatan korupsi yang melibatkan para politisi karena modal untuk memenangkan pemilu langsung termasuk pemilihan presiden di dalamnya sangat besar.⁹⁹ Biaya politik yang tinggi menjadikan penguasa memiliki ketergantungan kepada pemilik modal yang mempengaruhi kebijakan dan menciptakan kekuasaan yang oligarki karena yang dipikirkan bagaimana hasilkan dana untuk mengembalikan modal, membayar hutang kepada investor dan menyimpan dengan pihak yang mendukungnya.¹⁰⁰

Politik transaksi terjadi secara berlapis (hierarki). Biasanya antara partai politik dengan individu yang berniat menjadi pejabat publik dan saat mengisi jabatan tertentu di kantor publik antar partai politik. Terkait pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden, politik transaksi dapat terjadi 4 hingga 5 kali, yaitu: (a) saat pencalonan calon legislator; (b) saat pencalonan calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan ketentuan tren presiden; (c) memahami hasil pemilihan presiden putaran pertama (bila perlu putaran kedua); (d) Ketika kabinet terbentuk; dan (e) membentuk koalisi di DPR.¹⁰¹

⁹⁸ Margarito Kamis, *"Pilpres Liberal, Segeralah Berlalu"*, Kolom Republika, 15 Juli 2019.

⁹⁹ Persimpangan antara kebusukan individu membuahkan hasil kolektif. Liberalisme atau beberapa aliran yang menarik salah satu proposisi fundamentalnya dari hal ini. Aturan-aturan baik cukup untuk masyarakat yang berperadaban baik dan cukup beradab, apapun kualitas dan kekuarangan pelakunya. Gagasan umumnya adalah keserakahan, nafsu kemewahan dan berfoya-foya dengan kata lain ketidakmampuan mengendalikan diri. Lihat Jean Baechler, *"Demokrasi Sebuah Tinjauan Analitis"* (Kanisius, Yogyakarta: 2001), hlm. 77

¹⁰⁰ Marulak Pardede, *"Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia"*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 3 Nomor 1, April 2014

¹⁰¹ Khairul Huda dan Zulfa Azzah Fadlika, *"Pemilu Presiden 2019: Antara Konstetasi Politik dan Pemicu Pemecah Bangsa"*, Jurnal Unnes Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018. hlm. 560

e. Aspek Keterwakilan

Keterwakilan dan perangkat hukum pemilu telah terkurung dalam perangkap oligarki politik, yang dengan mudah dapat mengambil manfaat dari sistem pemilu saat ini. Seperti kita ketahui bersama, aturan presidensial *threshold* akan menumbuhkan proses politik yang begitu pragmatis dan cair di antara partai politik. Pencalonan capres-cawapres harus memenuhi ambang batas 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Artinya tidak ada parpol hasil pemilu 2014 yang bisa mencalonkan diri sendiri sebagai presiden dan wakil presiden. Pengalaman pemilu 2014 dan 2019 hanya melahirkan dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dari perspektif realisme politik, realitas politik yang bertolak belakang ini membuat praktik koalisi politik pragmatis semakin kuat. Dibandingkan dengan latar belakang politik pemilu AS, situasi dan sifatnya tentu saja berbeda, apalagi tanpa adanya pertarungan politik ideologis. Indonesia melaksanakan pemilihan umum "dari awal sampai akhir", yang menunjukkan karakteristik "politik geng" daripada "politik ideologis."

3. Konsep Sistem Pemilihan Presiden Berdasarkan Permusyawaratan Perwakilan Berkarakter Keindonesiaan

Konsepsi permusyawaratan perwakilan dalam Pancasila sesuai dengan semangat penyusunan konstitusi yakni berlandaskan sistematis negara kekeluargaan. Sejalan dengan sistematis negara kekeluargaan maka hal ini merupakan resultan dari pergulatan ragam aspirasi dan ideologi yang ada. Konsepsi negara kekeluargaan setidaknya ada tiga ukuran sebagai implementasi semangat Pancasila yaitu *unitarianisme*, demokrasi kerakyatan dan *sosialisme*.¹⁰²

Aspek permusyawaratan perwakilan dipandang sejalan dengan pokok pikiran keempat Pembukaan Konsep sistem pemilihan presiden berdasarkan permusyawaratan perwakilan yang berkarakter keindonesiaan terwujud dengan lima aspek permusyawaratan perwakilan sebagai berikut:

a. Aspek Kesepakatan

Mewujudkan persatuan dalam keberagaman dengan kesepakatan bersama menjadi salah satu karakteristik Indonesia. Tujuan dari permusyawaratan perwakilan adalah mengusulkan persatuan negara yang mengatasi konsep individu, kelompok dan kelompok dengan semangat kekeluargaan, serta menyelesaikan eksistensi berbagai suku bangsa di Indonesia dengan semangat persatuan untuk menciptakan persamaan dan persamaan perbedaan. Cita-cita hikmat dan kebijaksanaan mencerminkan orientasi moral yang didasarkan pada nilai-nilai sakral, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan.¹⁰³

Secara *etimologis*, permusyawaratan perwakilan dalam paktiknya di German dinamakan dengan demokrasi deliberatif yang berasal dari kata *deliberation* yang artinya konsultasi atau menimbang-nimbang. Demokrasi deliberative meminati

¹⁰² Yudi Latif, "*Revolusi Pancasila*", (Mizan Media Utama, Bandung: 2017), hlm. 27

¹⁰³ Astim Riyanto, "*Pancasila Dasar Negara Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan*", Tahun ke-37 No. 3, 2017, hlm. 457-493

persoalan mengenai keputusan kolektif yaitu menjelaskan arti *control* demokratis melalui *opini public*.¹⁰⁴ Demokrasi ini mengacu pada prosedur formasi opini dan aspirasi secara demokratis.¹⁰⁵ Indonesia sebagai negara persatuan dan kebangsaan yang multikultur hanya dapat bertahan lebih kuat dengan landasan Pemerintahan yang menjamin keseimbangan antara prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan yang berlaku untuk semua warga negara.¹⁰⁶

Menariknya, pemikiran demokrasi yang mewakili demokrasi pancasila adalah warisan asli negara Indonesia. Hampir identik dengan pemikiran demokrasi deliberatif yang dikemukakan oleh filsuf Jerman Jurgen Habermas. Bagi Habermas, demokrasi deliberatif merupakan konsep demokrasi yang dilandasi oleh mekanisme musyawarah yang mendalam. Oleh karena itu, demokrasi deliberatif adalah demokrasi yang menggunakan musyawarah dalam mekanisme demokrasinya. Lahirnya demokrasi deliberatif dilandasi oleh kecemasan Habermas tentang demokrasi modern yang hanya

¹⁰⁴ Menurut David Held dalam "Model Demokratis" -nya, jajak pendapat tidak mengutamakan refleksi publik atas isu-isu publik. Tujuan pemungutan suara adalah mengajak warga untuk berpartisipasi langsung dalam perumusan kebijakan publik. Rumusan bersama langsung masyarakat ini juga memberikan informasi yang lengkap tentang isu yang sedang dirumuskan. Oleh karena itu, muara jajak pendapat adalah keputusan rakyat atas kebijakan publik yang disertai dengan pemahaman publik atas kebijakan yang telah diputuskan. Berkumpul di satu tempat selama beberapa hari untuk membahas masalah utama dalam kehidupan publik. Sebelumnya, sampel memiliki kesempatan untuk menyatakan tampilan yang telah ditinjau sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan musyawarah yang melibatkan dua elemen yaitu; (1) menggali dan meminta informasi dari kelompok ahli tentang isu-isu yang dibahas; (2) melakukan debat terbuka di antara peserta untuk mendapatkan keputusan publik yang lebih terinformasi. Setelah itu, tanyakan kembali pendapat semua orang dan bandingkan hasil polling sebelum dan sesudahnya. Seringkali, proses review mengubah opini yang ada karena dipengaruhi oleh informasi tentang fakta yang sedang dipertimbangkan, dan orang yang terlibat juga akan mempertimbangkan pendapat dan argumen orang lain. Selain itu, Holder mengemukakan gagasan utama tentang mekanisme pemungutan suara, yaitu gagasan utamanya adalah merepresentasikan sampel populasi. Lihat David Held, "*Models of Democracy, diterjemahkan oleh Abdul Haris*", The Akbar Tandjung Institute, Jakarta: 2007, hlm. 291

¹⁰⁵ Negara yang bercirikan ketimpangan sosial dan ekonomi, meskipun kebebasan politiknya terjamin, tidak dapat dikatakan sebagai negara demokratis. Jika tidak ada semangat demokrasi, esensi budaya dan ideologis yang bercirikan partai politik, lembaga pemerintah, dan internal organisasi kemasyarakatan, maka demokrasi menjadi tidak efektif dan tidak efektif. Menjaga demokrasi, memahami jalannya demokrasi dan penggunaan kehidupan. Lihat John Muller, "*Retreat From Doomsday, The Obsolescence of Major War*" (Basic Book, Newyork: 1989), p. 29

¹⁰⁶ Baik demokrasi musyawarah perwakilan dan demokrasi musyawarah menekankan peran partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Hal ini dilatarbelakangi oleh munculnya gagasan demokrasi dan *good governance* yang memberikan ruang yang sangat besar bagi partisipasi publik. Konsep *good governance* merupakan isu strategis dalam administrasi publik. Tuntutan masyarakat akan gagasan *good regional governance* oleh pemerintah sejalan dengan peningkatan pengetahuan masyarakat dan transformasi pemerintah dari *rogue governance* menjadi *good governance*, hal ini dapat dipahami sebagai fenomena yang adil dan demokratis. Lihat Zaka Firma Aditya dan Sholahuddin Al-Fatih, Efek kontra demokrasi musyawarah dalam merumuskan kebijakan publik yang partisipatif dan etis, Paper Prossiding dipresentasikan dalam Konferensi Nasional "*Membangun dan Memperkuat Integritas Tata kelola Pemerintahan dan Praktik Bisnis yang Baik untuk Mewujudkan Peradaban Nasional yang Berdaya Saing*", di Universitas Paramadina, Jakarta, pada tanggal 14-15 Desember 2016.

menggunakan prinsip mayoritas dalam melegalkan semua kebijakan dan perundang-undangan.¹⁰⁷

b. Aspek Kebersamaan

Landasan pembangunan bangsa Indonesia sedari awal berdasar pada musyawarah untuk mufakat, karena Indonesia milik semua golongan. Dalam hal ini, musyawarah diharapkan mampu menampung semua pandangan yang berbeda dari semua pihak, dan kemudian diterima secara demokratis dengan mencari solusi terbaik. Demokrasi Indonesia didasarkan pada kebijaksanaan daripada kekuasaan, dan itu juga mengandalkan prosedur musyawarah sebagai cita-cita kebenaran. Legitimasi kepemimpinan tidak sepenuhnya ditentukan oleh mayoritas, tetapi melibatkan warga negara yang setara dan mandiri.¹⁰⁸ Aspek kebersamaan dalam permusyawaratan perwakilan bukan menjadi sarana perwakilan berbagai kepentingan melainkan sebagai tempat penyelesaian permasalahan melalui dialog daripada penggunaan kekuasaan.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Hatta menilai demokrasi Pancasila adalah demokrasi primitif Indonesia yang bertujuan mencari konsensus dalam kerangka kearifan dan kearifan, dan pada akhirnya mencapai keadilan sosial. Dengan mengacu pada praktik demokrasi di desa, seperti pertemuan mencari konsensus, kepemilikan tanah bersama, gotong royong, dan protes rakyat terhadap kebijakan raja, Hatta memberikan landasan budaya dan sejarah untuk lokalisasi demokrasi. Lihat Zulkifri Suleman, *"Demokrasi Untuk Indonesia, Pemikiran Politik Bung Hatta"*, Kompas, Jakarta: 2010, hlm. 181-185.

¹⁰⁸ Ketidakterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan, mengakibatkan proses implementasi kebijakan menjadi tidak sesuai dengan harapan. Oleh sebab itu, jalan satu-satunya agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik adalah dengan keikutsertaan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan. Sehubungan dengan hal itu, demokrasi permusyawaratan sebenarnya telah menyediakan mekanismenya. *Pertama*, kebijakan publik dimulai dari adanya masalah publik yang mendapat perhatian serius. Oleh sebab itu, untuk pemerintah sebagai *policy maker* perlu melakukan pendekatan mengenai masalah yang harus dipecahkan melalui kebijakan tersebut. Dalam hal ini pemerintah dapat melakukan jajak pendapat publik. Jajak pendapat ini digunakan untuk memetakan dan mencari akar permasalahan yang terjadi di masyarakat yang harus diselesaikan oleh pemerintah melalui kebijakan yang nantinya akan dibuat. Jajak pendapat oleh publik dalam negara demokrasi dianggap sebagai salah satu strategi yang paling demokratis untuk mengkomunikasikan permasalahan masyarakat untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah. *Kedua*, juri warga. Mekanisme ini ditetapkan oleh badan publik yang berfungsi sebagai tim konsultasi masyarakat pemerintah. Tugas dewan juri warga adalah merumuskan pandangan publik tentang kebijakan atau merumuskan isu sosial yang mendasar, dan menyerahkannya kepada pemerintah sebagai rancangan kebijakan. Juri memiliki dua tanggung jawab: wakil rakyat yang mengimbau pemerintah kepada rakyat dan badan pengawas kebijakan pemerintah. Jelas, dewan juri warga ini berbeda dengan perwakilan resmi rakyat di DPR. Dewan juri warga terdiri dari lembaga publik yang berada di luar struktur parlemen. *Ketiga*, umpan balik dari masyarakat dan pemerintah. Artinya, pemerintah menyediakan saluran ideal untuk menghasilkan umpan balik dalam merumuskan kebijakan. Awalnya, model umpan balik ini ada di *e-government*, di mana pemerintah menggunakan akses internet untuk mengkomunikasikan kebijakan. Namun model ini top-down, dari pemerintah ke masyarakat tanpa ada umpan balik. Ini bisa dimaklumi, karena setelah kebijakan dirumuskan, pemerintah terbiasa melakukan sosialisasi. Hal ini sebagaimana dalam pandangan Sabatier, bahwa pendekatan *Top-Down* berawal dari *"they started with policy decision (usually statute) and examined the extent to which its legally-mandated objectives were achieved over time and why"*. *Keempat*, melakukan uji publik atas kebijakan yang akan di implementasikan. Paul A. Sabartier dan Hank C Jenkin Smith, (Eds), *"Policy Change and Learning"* (Westview Press, Boulder: 1993), p 12-20

¹⁰⁹ Ambiro Puji Asmaroni, *"Menjaga Eksistensi Pancasila dan Penerapannya bagi Masyarakat di Era Globalisasi"*, Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 1 No. 2, 2017, h. 50-64

c. Aspek Keterbukaan

Karakteristik Permusyawaratan perwakilan menjadi keputusan politik memenuhi setidaknya empat syarat utama, itu bisa dikatakan benar. *Pertama*, didasarkan pada prinsip nalar dan keadilan, bukan hanya pada subjektivitas dan kepentingan ideologi. *Kedua*, berkomitmen untuk kebaikan bersama, bukan individu atau kelompok. *Ketiga*, menoleransi dan mempertimbangkan pendapat semua pihak.¹¹⁰

Dalam menjabarkan Pasal 22E ayat 1 ayat 1 UUD 1945, pemilu diselenggarakan secara langsung, terbuka, bebas, diam-diam, jujur, dan adil setiap lima tahun. Pemilu diadakan untuk memilih wakil rakyat yang akan menjadi Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Di tingkat daerah, kepala daerah dan wakil ketuanya dipilih langsung secara berpasangan oleh masyarakat di daerahnya masing-masing.¹¹¹

Permusyawaratan perwakilan dengan aspek keterbukaan mewujudkan persatuan dalam keberagaman yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa nilai persatuan Indonesia bersumber pada prinsip kedaulatan rakyat, dan bertentangan dengan berbagai bentuk feodalisme, totalitarianisme, dan kediktatoran yang dianut oleh mayoritas dan minoritas. Nilai persatuan Indonesia sendiri berarti bekerja keras untuk mempersatukan rakyat dalam kesatuan negara Republik Indonesia guna menumbuhkan rasa nasionalisme. Nilai kedaulatan rakyat adalah fondasi demokrasi Indonesia yang sedang tumbuh. Nilai tersebut merujuk pada pembatasan kekuasaan negara akibat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Sementara itu, demokrasi yang dipimpin oleh kearifan sistem perwakilan menunjukkan bahwa manusia di Indonesia memiliki status, hak dan kewajiban yang sama. Kebijakan dalam musyawarah adalah impian masyarakat demokratis.¹¹²

Kedudukan hak dan kewajiban harus sama dan seimbang. Sebelum mengambil keputusan tentang kepentingan bersama, terlebih dahulu harus ditinjau. Dalam hal ini musyawarah untuk mencapai mufakat. Oleh karena itu harus dilandasi oleh semangat kekeluargaan yang merupakan lambang bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia menghormati dan teguh dalam segala hasil musyawarah dan keputusan. Oleh karena itu, sebagai bagian dari bangsa Indonesia, pihak-pihak yang berkepentingan dengan tulus menerima dan memenuhi rasa tanggung jawab yang tinggi.

d. Aspek Kekeluargaan

¹¹⁰ Yudi Latif, *Negara paripurna*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2011), hlm. 55

¹¹¹ Pemilu diakui sebagai mekanisme paling modern untuk mewujudkan kekuasaan rakyat dan hanya mewakili sebagian dari keseluruhan. Yang lain bahkan membuat masyarakat di ambang penghinaan. Inilah mengapa Socrates sangat tidak setuju dengan demokrasi. Dia lebih lanjut mengusulkan sistem merit, yaitu masyarakat dipimpin oleh orang-orang dengan keahlian tinggi di bidang yang dibutuhkan oleh lembaga pemerintahan. Lihat Bimo Nugroho, *"Menatap Demokrasi Dari Jendela, Sebuah Pengantar"* Institute Studi Arus Informasi, Jakarta: 1999, hlm. 30

¹¹² Iriyanto Widisuseno, *"Azas Filosofis Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara"*, Jurnal HUMANIKA Vol. 20 No 2, 2014, hlm. 62-66

Permusyawaratan perwakilan sebagai salah satu makna dalam makna kerakyatan mengandung arti bahwa dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan diusahakan keputusan sudah bulat, dan setelahnya tindakan bersama diambil. Pembulatan menunjukkan hasil yang bulat, yang berarti keputusan diambil dengan kesepakatan bersama. Dengan demikian, determinan demokrasi berdasarkan Pancasila merupakan hasil kebijakan yang konsisten. Pengambilan keputusan yang bulat menurut sila kerakyatan ini diperlukan adanya aspek kekeluargaan.

Sesuai dengan karakter negara kekeluargaan dari bangsa Indonesia, pembangunan sistem politik harus memperhatikan karakter dasar bangsa yaitu *"Bhineka Tunggal Ika"*. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan tingkat keberagaman yang tinggi, perlu adanya keseimbangan antara unitas dan diversitas. Apabila keduanya tidak dapat berjalan seimbang, layaknya sepasang kaki, salah satunya akan pincang. Partisipasi dan kesepakatan semua pihak dilakukan melalui persuasi, kompromi, dan negosiasi bersama. Hal ini membutuhkan mentalitas yang cerdas agar semua pihak merasa memiliki, loyalitas dan bertanggung jawab atas semua keputusan politik yang disepakati dan semangat kekeluargaan yang saling menghormati harus dijunjung.¹¹³

e. Aspek Keterwakilan

Sistem pemilihan dengan konsep ideal melalui permusyawaratan perwakilan dalam prosesnya akan lebih mudah dijalankan.¹¹⁴ Untuk itu, dalam permusyawaratan perwakilan yang menjadi dasar pemilihan presiden akan lebih baik apabila ada penyederhanaan jumlah partai dalam koalisi kepartaian yang lebih permanen seperti yang diterapkan oleh bangsa Indonesia. Demokrasi dalam bentuk koalisi partai akan memudahkan proses berjalan dengan baik dengan berlandaskan norma dasar (*grundnorm*) Pancasila.

¹¹³ Pengambilan kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah saat ini sangat minim sekali melibatkan masyarakat, jikapun masyarakat dilibatkan hanya sebatas perwakilan dari LSM maupun komunitas yang memiliki kepentingan langsung terhadap kebijakan maupun peraturan daerah tersebut. Hal ini menyebabkan masyarakat kadang merasa dikagetkan oleh kebijakan yang dibuat pemerintah. Padahal idealnya kebijakan atau peraturan yang baik haruslah dibuat secara konsensus dan mufakat, karena dampak dan akibat dari peraturan dan kebijakan tersebut akan dirasakan bersama. Apalagi kondisi masyarakat di berbagai daerah tidak homogen baik dalam agama, ras maupun kepercayaan sehingga pemerintah dalam membuat kebijakan haruslah tidak merugikan salah satu dari golongan tersebut.

¹¹⁴ Sistem demokrasi berdasarkan pengambilan suara meyakini pendapat banyak orang lebih baik (lebih mengandung kebenaran) dibandingkan pendapat sedikit orang. Bagaimana Hatta memandang bekerjanya sistem demokrasi? Dalam kata pengantarnya di penerbitan perdana Koran Daulat Ra'jat, 20 September 1931, Hatta menilai bangunan demokrasi barat bersifat pincang dan tidak senonoh karena yang berlaku hanya kedaulatan rakyat di bidang politik saja, sedangkan kedaulatan di bidang ekonomi berada pada tangan pemilik modal semata. Demokrasi tipe ini tidak adil dan dikritisi oleh Hatta yang mana seharusnya kedaulatan di bidang ekonomi juga berada pada tangan rakyat. Hatta berkata: "Yang menjadi pokok kepincangan ini adalah didikan bangsa Barat dengan asas-asas filsafat yang dikemoekakan pada bagian kedoea dari abad ke-XVIII: sifat individualisme atau dalam bahasa kita sifat perseorangan. Sifat perseorangan ini yang menjadi asas liberalisme Barat membangoenkan kapitalisme modern dan imperialisme perekonomian dan politik." Lihat Mohammad Hatta, *"Pengantar Koperasi"* Koran Daulat Ra'jat, No. 1, 20 September 1931, hlm. 1

Paradigma mengenai demokrasi¹¹⁵ yang berkembang pasca amandemen UUD 1945 mengarah kepada *elektoral democracy* dan *prosedural* dengan karakteristik liberal jauh dari kelima aspek permusyawaratan perwakilan.¹¹⁶ Konsep *prosedural*¹¹⁷ menjadi kekhasan demokrasi liberal yang mengutamakan kebebasan individu.¹¹⁸ Dengan kata lain, demokrasi liberal berarti menolak campur tangan negara dalam kehidupan pribadi.¹¹⁹

Konsep permusyawaratan dalam Sila ke-4 merupakan salah satu identitas melekat yang juga tradisi bernegara yang telah hadir dalam pendirian negara Indonesia. Permusyawaratan menjadi titik penting dan tidak hanya dimaknai sebagai sekedar perwakilan. Kehadiran perwakilan tanpa suatu permusyawaratan yang mendalam mengenai kenegaraan menjadi titik pokok mengapa pendirian negara dianggap tidak hanya berhenti kepada lahirnya suatu perwakilan yang *mainstream* tanpa adanya suatu permusyawaratan yang luas dan melibatkan seluruh komponen bangsa. Dengan demikian suatu permusyawaratan yang dimaknai adanya pergumulan pemikiran secara terbuka, bebas dan rasional untuk membicarakan segala urusan kenegaraan yang melibatkan seluruh komponen merupakan bentuk ajaran kedaulatan rakyat yang dikehendaki dalam pendirian negara.¹²⁰ Konsep sebagaimana terurai tersebut pada

¹¹⁵ Satya Arinanto, *"Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Indonesia"* (Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Jakarta: 2018), hlm. 372.

¹¹⁶ Pada dasarnya, demokrasi prosedural atau poliarki menurut Dahl adalah semata kemerdekaan rakyat memilih pemimpin. Lihat Jodeph Schumpeter, *"Capitalism, Socialism and Democracy"* (Harper and Row, New York: 1950), p. 54

¹¹⁷ Esensi demokrasi prosedural tak lain adalah pemisahan antara *leader* dengan *demos* yang disaring melalui mesin demokrasi yaitu pemilu. Dalam buku Dahl yang berjudul *Who Govern*, ia memberi jawaban bahwa demokrasi adalah menempatkan elit tertentu di pemerintahan. Lihat Robert Dahl, *Who Govern? Democracy and Power in an America City*, (Yale University Press, New Haven: 1961), p. 8

¹¹⁸ Schmitt jauh sudah mengingatkan betapa demokrasi dan liberalisme tidak sepadan. Liberalisme mengusung kemanusiaan universal dan kebebasan, sedangkan demokrasi mengusung *demos* atau kesatuan politik yang partikular dan yang mengecualikan. Demokrasi bagian dari partikularitas yang resmi dari politik. Sedangkan liberalisme justru menguras politik dari demokrasi dengan membuatnya menjadi semata-mata arena mencapai konsensus nasional. Konsensus nasional dicapai karena liberalisme menurunkan isu-isu antagonistik (moral, agama dan ekonomi). Lihat Donny Gahral Adian, *"Demokrasi Substansial: Risalah Kebangkitan Liberalisme"*, (Jakarta: 2010), hlm. 17

¹¹⁹ Bertentangan dengan konsep demokrasi Barat yang didasarkan pada hak asasi manusia individualistik. Menurut konsep Islam, hak asasi manusia sangat-sangat lengkap dan sesuai dengan hakikatnya. Dalam Islam, semua hak adalah kewajiban negara dan individu dan tidak boleh diabaikan. Misalnya, negara wajib menjamin perlindungan sosial setiap orang, tidak ada perbedaan gender, dan tidak ada perbedaan antara Muslim dan non-Muslim. Islam tidak hanya membebaskan kewajiban kepada negara, tetapi juga memerintahkan negara untuk berjuang melindungi hak-hak tersebut. Negara juga menjamin bahwa individu tidak akan melanggar hak-hak tersebut. Pemerintah memikul tanggung jawab sosial, jika tidak dilaksanakan berarti tidak berhak melanjutkan pemerintahan. Perspektif dari Islam yang menginspirasi munculnya kedaulatan rakyat yang berdasarkan permusyawaratan berarti kebersamaan bukan individualisme. Islam yang berdimensi transendental berorientasi menuju Tuhan Yang Maha Esa yang berpengaruh kepada sila dalam Pancasila. Lihat Auliya Khasanofa, *"Krisis Epistemologis Hukum Positivistik Menuju Pencerahan Baru dengan Paradigma Hukum Profetik"* dalam buku Absori, Kelik Wardiono, Shidarta dan Aan Asphianto (Ed), *"Transendensi Prospek dan Implementasi"* (Genta Publishing, Yogyakarta: 2017), hlm. 263

¹²⁰ Aidul Fitriciada Azhary, *"Rekonstruksi"*. *Op. Cit.*, hlm. 18

akhirnya menjelma kedalam MPR yang memang dalam UUD 1945 yang asli, meletakkan kedudukan dan fungsinya sebagai *locus of sovereignty* secara penuh. Bahkan sistem pemerintahan yang demikian ini disebut oleh Aidul dalam pidato pengukuhan sebagai sistem MPR.¹²¹

Sistem MPR dalam hukum tata negara masuk ke dalam ciri sistem pemerintahan parlementer karena MPR yang memilih presiden dan presiden bertanggungjawab kepada MPR. Menurut Djokosoetono, sistem parlementer adalah sistem menteri *verantwoordelijk-heid* (ketua menteri bertanggung jawab kepada parlemen) ditambah (kekuasaan lebih) atas parlemen.¹²² Sistem parlementer didasarkan pada parlemen dengan kekuasaan tertinggi yang terdapat kesamaan dalam sistem MPR menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi.

Sejarah penyelenggaraan kenegaraan Indonesia termasuk dinamika pelaksanaan sistem pemerintahan pasca kemerdekaan (yaitu 2 September 1945), karena Indonesia tidak segera membentuk kabinet. Dalam situasi yang rumit, kabinet baru dapat diumumkan tiga belas hari setelah deklarasi 17 Agustus 1945 diumumkan. Kabinet tersebut langsung diketuai oleh Presiden Soekarno. Ada 18 anggota kabinet pertama dari sistem presidensial. Pada 14 November 1945, pembentukan kabinet kedua diumumkan. Kabinet kali ini dipimpin oleh Sjahrir dan beranggotakan 13 orang. Kabinet kedua mengimplementasikan pemerintahan parlementer. Soekarno tetap menjabat sebagai Presiden, sedangkan Sjahrir menjabat sebagai Perdana Menteri. Dalam empat puluh tujuh hari (dari 2 September 1945 hingga 14 November 1945), Indonesia mengubah sistem pemerintahannya dari sistem presidensial menjadi sistem parlementer.

Harus diakui UUD 1945 “kilat” memang istilah Soekarno, konstitusi revolusioner yang dirancang pada Mei 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, meski berhasil mengedepankan banyak gagasan cerdas, namun dalam hal pemilihan sistem pemerintahan, sejak disahkannya UUD 1945 pada 18 Agustus 1945, para pemimpin Indonesia sepakat untuk membentuk kabinet parlementer pertama. Pemerintah di bawah kepemimpinan Perdana Menteri. Dalam pidato perdana Perdana Menteri Syahrir dan Soekarno, terlihat jelas bahwa pembentukan kabinet parlementer adalah untuk menjamin demokrasi yang sejati.¹²³

Penerapan sistem parlementer dalam konteks UUD 1945 memang menimbulkan dorongan konstitusional, karena nasib kabinet ditentukan oleh perdana menteri, bukan presiden. Presiden hanyalah kepala negara, bukan kepala eksekutif yang dijalankan oleh perdana menteri. Hingga berdirinya Republik Indonesia Serikat pada bulan Desember

¹²¹ Aidul Fitriciada Azhary, “Teori bernegara Bangsa Indonesia: Suatu Pemahaman tentang Pengertian-Pengertian dan Asas-Asas Dalam Hukum Tata Negara” Pidato Pengukuhan dalam Ucapan Penerimaan Jabatan sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Jakarta Tanggal 26 Juli 1995, h. 5

¹²² Secara umum terdapat karakteristik sistem pemerintahan parlementer yakni pemisahan pemegang jabatan sebagai “*head of state*” dengan “*head of government*.” R.M. Ananda B Kusuma, “Sistem Pemerintahan Indonesia”, (Jakarta, Jurnal Konstitusi Vol. 1 No. 1: 2004), hlm. 156

¹²³ Cora Elly Novianty, “Demokrasi dan Sistem Pemerintahan”, (Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2: 2013) hlm. 348

1949 dan disahkannya UUDS pada tahun 1950, terdapat tiga perdana menteri yaitu Sjahrir, Amir dan Hatta. Sutan Sjahrir dan Amir Sjarifuddin dua kali menjabat perdana menteri dan Mohammad Hatta semuanya memimpin kabinet yang bertanggung jawab kepada KNIP.

Setelah Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1959, sebelumnya demokrasi Indonesia berdasarkan UUDS 1950 sistem pemerintahannya parlementer. Sejak 1950, Indonesia telah dipecah menjadi 10 provinsi otonom. Selama periode ini, kabinet yang hampir setiap tahun berganti. Kabinet pada masa UUDS 1950 yakni Kabinet Natsir (September 1950 hingga Maret 1951), Kabinet Sukiman (April 1951 hingga Februari 1952), Kabinet Wilopo (April 1952-1953), dan Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953-1955), Kabinet Burhanudin Harahap (1955-1956), Kabinet Ali Sastroamidjojo II (Maret 1955-1957), dan Kabinet Juanda (1957-1959).

UUD 1945 asli maupun pasca perubahan, memang diketahui pola pemerintahan di antara keduanya mampu melahirkan dan pernah menghadirkan pemerintahan yang demokratis maupun otoritarian.¹²⁴ Di bawah UUD 1945, pada orde lama, periode 1946-1950 pola pemerintahan yang transformatif, lalu 1959-1967 hadir dengan demokrasi terpimpinnya, pada awal orde baru 1967-1971, MPR mampu menghadirkan pola yang demokratis, dan 1971- 1997 MPR hadir dibawah otoritarian orde baru yang justifikatif. Pada akhirnya demokratis pada periode 1999-2001. Di bawah UUD 1945 pasca perubahan menghadirkan pola pemerintahan yang cenderung pragmatis di periode 2004-2014, dan periode 2014 hingga saat ini banyak pihak yang menyatakan periode *neootoritarian* dengan karakteristik liberal.¹²⁵ Ini menunjukkan bahwa MPR relevan hadir dalam konstelasi bernegara yang demokratis dan tidak benar adanya kemudian meletakkan kritik terhadap kekuasaan eksekutif yang kemudian berdampak kepada amputasinya MPR. Namun, terlepas dari kebutuhan dan relevansinya, banyak pihak kemudian menyatakan keliru apabila MPR mendapatkan dukungan untuk direvitalisasi. Upaya merevitalisasi MPR dianggap sebagai sebuah kehendak yang akan mudah diselundupi oleh “penumpang gelap” yang kemudian berlindung dibalik gagasan revitalisasi MPR. Bahkan mayoritas pihak menyatakan bahwa revitalisasi MPR akan mencederai demokrasi yang telah dibangun dan diperjuangkan selama reformasi.

Kehadiran MPR sendiri mendapatkan legitimasi politik yang kuat secara teoritis dikarenakan institusionalisasi konsep permusyawaratan perwakilan di bawah UUD 1945 yang asli dilakukan atas cerminan kehendak suatu bangsa yang merdeka. UUD 1945 asli maupun yang telah dilakukan perubahan, masih meletakkan MPR (tidak menghapuskannya, seperti DPA) sebagai salah satu lembaga negara yang mempunyai porsi strategis. Hal ini menunjukkan bahwa terlepas dari munculnya perubahan paradigma yang tajam dalam UUD 1945 asli ke yang perubahan. Tidak menghapuskan keberadaan MPR dalam hukum positif meskipun telah diamputasi dalam struktur negara merupakan bukti bahwa MPR mendapatkan legitimasi politik yang kuat. John Austin

¹²⁴ Ada kesenjangan antara norma dan praktik, normatif belum tentu dalam praktiknya sama dengan teorinya atau realita.

¹²⁵ Eve Warburton, “Jokowi and the New Developmentalism,” *Indonesian Economic Studies*, Vol 52 No 3, 2016, hlm. 297-320,

menyatakan bahwa hukum positif lahir dari kehendak yang telah mengakar atau apa yang disebutnya *"the law set by political superior to political inferior."*¹²⁶ Senada dengan hal tersebut K.C Wheare menyatakan bahwa selain terdapat unsur yuridis, konstitusi juga sangatlah kental dengan unsur sosio-politik yang dikehendaki para pembuatnya¹²⁷ atau apa yang disampaikan Juergen Habermas sebagai *complex of law and political power characterizes the transition from societies organized by kinship to those early societies already organized around states.*¹²⁸

MPR mengampulasi dirinya sendiri setelah perubahan UUD 1945. Namun, faktanya MPR tetap menjadi identitas nasional struktur negara Indonesia dan bentuk tradisi bernegara. Pengaruh globalisasi sejatinya memang menjadi faktor bagi sebuah negara menerima pengaruh dari negara lain. Transplantasi hukum sejatinya memang mengakibatkan adanya upaya-upaya "paksa" sistem yang dianggap lebih 'modern' atau 'berhasil'. Transplantasi hukum memang merupakan pola yang terjadi dalam penyusunan struktur negara. Tranplatansi hukum memindahkan norma atau konsep yang dimiliki dalam sistem hukum tertentu ke sistem hukum tertentu.¹²⁹ Apabila dikaitkan dengan Perubahan UUD 1945, maka pengampulasian MPR oleh MPR sendiri dilakukan dikarenakan transplantasi hukum dari sistem presidensial Amerika Serikat.

Hal ini dapat ditelaah dari adanya perbedaan kerangka berpikir antara penyusun UUD 1945 yang asli¹³⁰ yang berkesesuaian dengan teori *originalism* dari Scalia dalam setiap perubahan aturan harus sesuai dengan pemikiran perumus aslinya¹³¹ yang dalam

¹²⁶ M.D.A Freeman, *"Lloyd's Introduction to Jurisprudence"* Op. Cit, hlm 25

¹²⁷ K.C Wheare mengemukakan: "Konstitusi, ketika disusun dan diterapkan, cenderung mencerminkan keyakinan dan kepentingan dominan, atau kompromi antara keyakinan dan kepentingan yang bertentangan, yang mencirikan masyarakat pada waktu itu. Lebih dari itu, konstitusi tidak mesti mencerminkan keyakinan dan kepentingan politik atau hukum saja. Ia bisa saja mencakup simpulan atau kompromi-kompromi atas masalah ekonomi, dan sosial yang ingin dijamin atau dinyatakan oleh para penyusun konstitusi. Konstitusi adalah resultan dari berbagai kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang bekerja pada waktu pembentukannya." K.C Wheare, *"Konstitusi-Konstitusi Modern"*, (Nusamedia, Bandung: 2011), hlm. 104-105

¹²⁸ Jurgen Habermas, *"Between Facts And Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy"* (The MIT Press, Cambridge, Massacuset: 1998), hlm. 137

¹²⁹ Aidul Fitriadi Azhary, *"Rekonstruksi Tradisi Bernegara"* Op. Cit, hlm 20

¹³⁰ Kerangka kenegaraan salah satu perumus asli UUD 1945 Hatta menegaskan tentang demokrasi politik, sebelum berbicara bentuk negara, Hatta dalam brosur Kearah Indonesia Merdeka – pedoman pendidikan Indonesia. Hatta mengemukakan dua konsep penting sebagai dasar memperjuangkan dan mengisi kemerdekaan, masing-masing kebangsaan dan kerakyatan. *Pertama*, semangat kebangsaan cinta tanah air harus ditumbuhkan dan dikembangkan terlebih dahulu agar tumbuh semangat untuk merdeka dari penjajahan asing. *Kedua*, kerakyatan atau kedaulatan rakyat merupakan asas yang harus menjiwai bangunan Indonesia merdeka, menjadi dasar bangunan kenegaraan agar cita-cita kemerdekaan dapat tercapai. Lihat Zulkifli Suleman, *"Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta"*, Kompas, Jakarta: 2010, hlm. 3

¹³¹ Scalia berpandangan sekaligus mengklarifikasi bahwa *originalism* yang terbagi dua yakni *original inten* dan Makna asli hendaknya tidak hanya ditafsirkan sebagai harapan khusus para perancang UUD ketika mereka menggunakan kata atau frasa yang mereka gunakan. Primitivisme versi Scalia cenderung memiliki pemahaman yang wajar tentang teks saat membuat kata dan frasa ini. Teori orisinalisme Scalia dapat dibagi menjadi versi yang lebih spesifik berdasarkan argumen dasarnya, yaitu: (1) Teks hukum harus ditafsirkan sesuai dengan makna aslinya; (2) Makna asli dari kata-kata berharga dalam teks hukum adalah

hal ini dilupakan oleh para anggota MPR yang kemudian mengamandemen UUD 1945. UUD 1945 disusun dengan maksud membentuk sistem dan struktur pemerintahan yang berdasar tradisi bernegara Indonesia. Penyusun UUD 1945 asli berpendapat bahwa meniru sistem pemerintahan dari negara lain seperti Belanda, Inggris, Amerika Serikat atau Jepang sekalipun adalah suatu hal yang tidak bijaksana.¹³² Justru sebaliknya terurai dari risalah perdebatan perubahan UUD 1945, kebanyakan anggota MPR yang melakukan perubahan UUD 1945 dengan tranplatansi hukum dari sistem presidensil Amerika Serikat yang menggunakan konsepsi trias politiknya.¹³³ Namun, transplantasi hukum memiliki konsekuensi yang sama dengan sistem organ manusia. Bahwa transplantasi hukum akan berhasil ke dalam sistem tubuh yang baru apabila tidak terdapat penolakan dari sistem kekebalan tubuh baru karena bisa terjadi komplikasi.¹³⁴ Sistem sosial, sistem ekonomi, kebudayaan rasional, independensi ekonomi bangsa Amerika yang sangat tinggi jelas bertentangan dengan sistem sosial bangsa Indonesia yang pada umumnya memang kuat tradisi bernegaranya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan, jika sistem ketatanegaraan pada era reformasi seolah melakukan gali lobang tutup lobang sebagai akibat konsekuensi tranplantasi hukum dalam amandemen UUD NRI 1945.

Meninjau hidup bernegara pada era reformasi,¹³⁵ konsep demokrasi yang hadir pasca amandemen juga nyatanya menimbulkan banyak kelemahan. Dalam praktiknya demokrasi hanya menjadi alat seremonial dan menjadikan pemilu sekedar alat untuk merampas hak-hak rakyat melalui pemungutan suara yang mirisnya mampu dibeli dengan harga yang murah.¹³⁶ Selain itu, demokrasi sebagai bentuk daulat rakyat hanya

penerapan. Prosedur biasanya diberikan ketika teks menjadi efektif; (3) Kata-kata yang memiliki nilai dalam teks hukum harus ditafsirkan sesuai dengan penerapan umumnya, dan penggunaan umum juga akan diberikan ketika menjadi efektif. Lihat <https://panmohamadfaiz.com/2020/03/05/membedah-originalism/> diakses pada 24 Oktober 2020

¹³² Dari Risalah-risalah sidang BPUPK dapat ditemui bahwa para tokoh penyusun UUD 1945, khususnya Soepomo dan Yamin sangat paham mengenai *Grondwet* (Belanda), Konstitusi Perancis, Konstitusi Jerman, Konstitusi Amerika Serikat dan konstitusi tidak tertulis Inggris, bahkan merujuk R.M. AB Kusuma, di dalam arsip A.K. Pringgodigdo yang semula disimpan di *Algemeen Rijksarchief* (ARA) Den Haag, ditemukan salinan konstitusi filipina, terjemahan UUD Jepang dan terjemahan *Atlantic Charter*.

¹³³ Tim Penulis, "*Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945: Buku 1*" Sekretariat Jenderal MK-RI, Jakarta: 2008.

¹³⁴ Aidul Fitriciada Azhary, "*Rekonstruksi Tradisi Bernegar*", *Op. Cit.*, hlm 21

¹³⁵ Giddens sangat yakin bahwa globalisasi telah mengubah karakteristik pemerintahan. Kekuasaan politik kini telah menyebar secara efektif di antara berbagai kekuatan di tingkat nasional dan internasional. Perusahaan multinasional, lembaga swadaya masyarakat dengan jaringan internasional atau lembaga keuangan global juga menentukan dan mempengaruhi kebijakan suatu negara. Giddens percaya: "Globalisasi telah menggantikan demokrasi liberal." Situasi ini tampaknya berada di luar kendali kami. "Konsekuensi modernitas dan globalisasi lebih radikal dan umum daripada kondisi sebelumnya, sehingga demokrasi tampaknya tidak salah lagi. Lihat Arif Susanto, "*Transisi Demokrasi Dalam Dunia, Jurnal Ilmu Pemerintahan*", Edisi 35, 2011, hlm. 13

¹³⁶ Hatta menulis dalam pamflet bertajuk "*Menuju Indonesia Merdeka*": "Di atas fondasi (cita-cita tolong bantu), pilar demokrasi bisa dibangun, tidak perlu lagi mengontrol seseorang atau sekelompok kecil penghidupan seorang sekelompok orang adalah untuk mengubah kebutuhan dan keinginan banyak orang menjadi pedoman bagi perusahaan dan pendapatan. " Demokrasi politik dan demokrasi ekonomi tidak dapat dipisahkan dan saling terkait. "Cita-cita demokrasi kita lebih luas, tidak hanya demokrasi politik,

bernilai waktu tidak lebih dari lima menit untuk memberikan suaranya melalui pemilu yang kemudian hak-haknya dipestaporakan oleh mereka yang terpilih melalui sistem pemilihan yang cenderung *oligarkis* dan korup.

Bahaya lain sangat mungkin terjadi akibat '*politik keroyokan*' akibat adanya *presidential trashhold* yang menjadikan dominasi ketua umum partai politik. Ada kemungkinan partai-partai yang sulit berkoalisi tidak bisa lagi menjadi calon presiden dan wakil presiden. Bagi partai dengan persentase kecil suara dan/atau kursi, dilema pasti ada. Dalam pemilihan presiden tahun 2019, oposisi tidak berdaya. Sebab, menurut Pasal 235 ayat 5 UU Pemilu, "Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat mengajukan pasangan calon tidak mengajukan bakal pasangan calon, partai politik bersangkutan dikenai sanksi tidak mengikuti pemilu berikutnya." Dalam hal ini, "politik keroyokan" kemungkinan besar akan benar-benar menghasilkan kartel politik untuk pemilu, atau disebut juga "koalisi kartel".¹³⁷ atau '*cartelized party system*'.¹³⁸ Amandemen dengan menggunakan teori *originalism* yang menurut Scalia suatu penafsiran yang memberikan jawaban atas pemahaman tentang konstitusi, makna teks konstitusi, atau niat para perumus aslinya.¹³⁹ Dengan melihat keinginan dari perumus awal teks UUD 1945 dengan mengembalikan model pemilihan Presiden ideal dengan konsep permusyawaratan perwakilan dan Pancasila harus dipandang sebagai landasan dan ideologi negara, serta menjadi acuan dan inspirasi bagi upaya menghadapi berbagai tantangan kehidupan bangsa. Demokrasi Pancasila itu bukan demokrasi yang mencari kalah dan menang namun bagaimana masalah-masalah penting yang menyangkut nasib rakyat dibahas, dibicarakan dan diputuskan dengan cara musyawarah dan mufakat yang penuh dengan hikmat kepemimpinan yang memiliki kebijaksanaan.¹⁴⁰

Ada dua cara menurut Al Mawardi dalam teori *imamah* mengenai pengangkatan imam (khalifah atau pemimpin negara): *Pertama*, Dewan pemilih bertanggung jawab memilih imam untuk rakyat. *Kedua*, panitia imam menunjuk salah satu dari mereka

tetapi juga demokrasi ekonomi." Demokrasi politik Hada tidak terbatas pada pemilu, tetapi merupakan bagian dari demokrasi yang disertai dengan rasa tanggung jawab. Baginya, demokrasi ekonomi lebih merupakan penegasan kemandirian rakyat di bidang ekonomi. Lihat Yudi Latif, "*Kratos Minus Demos: Demokrasi Indonesia Catatan Dari Bawah*", (Buku Obor, Jakarta: 2012), hlm. 90

¹³⁷ Moch. Nurhasim, "*Ambang Batas Pencalonan dan Kecenderungan Koalisi*", Kompas, 8 November 2018.

¹³⁸ Kuskridho Ambardi, "*The Making of the Indonesian Multiparty System: A Cartelized Party System and Its Origin*", (The Ohio State University, Ohio: 2008) p. 90

¹³⁹ Antonin Scalia & Bryan A. Garner, "*Reading Law: The Interpretation of Legal Texts*", (Thomson/West, United States of America: 2012), hlm. 1

¹⁴⁰ Bung Karno mewanti-wanti tentang kemungkinan hadirnya demokrasi tanpa "*demos*", tanpa pemberdayaan rakyat seperti yang terjadi di pasca revolusi. "Ya, marilah kita ingat akan pelajaran revolusi Perancis itu. Marilah ingat bagaimana kadang-kadang palsunya semboyan demokrasi, yang tidak menolong rakyat jelata, membinasakan rakyat jelata, sebagaimana yang terjadi pada revolusi Prancis. Marilah kita awas. Jangan sampai rakyat jelata Indonesia tertipu oleh kesadaran palsu "semboyan demokrasi" sebagaimana rakyat jelata Perancis itu yang pada akhirnya hanya diperkuda belaka oleh kaum Borjuis yang bergemborkan "demokrasi-kemerdekaan, persamaan, persaudaraan, tetapi hanya mencari kekuasaan sendiri, keenakan sendiri, keuntungan sendiri." Lihat Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, (Jakarta: 1965), hlm. 316

sebagai imam.¹⁴¹ Merekonstruksi konsep permusyawaratan perwakilan dengan sistem pemilihan presiden melalui aspek keterwakilan dalam lembaga permusyawaratan didalamnya ada anggota dipilih melalui pemilihan umum yang jujur dan adil.

Sistem pemilihan langsung terbukti tidak dapat melahirkan kader partai terbaik untuk tampil menjadi pemimpin bangsa. Sistem pemilihan langsung hasil perubahan UUD 1945 telah membentuk demokrasi prosedural dan demokrasi formalitas yang berbiaya tinggi dalam belantara politik yang liar dan keras. Pertarungan yang liar dan keras hanya akan melahirkan semacam *oligarki* atau segelintir elit penguasa yang tamak. Demokrasi berbiaya tinggi akan membuat uang menjadi sangat berkuasa. Artinya orang kaya, kaum pemodal dan kapitalis yang lambat laun akan menguasai partai-partai politik, bukan rakyat dan selanjutnya mereka akan menguasai bangsa dan negara Indonesia.

Siapa pun yang menjabat sebagai presiden pascaamandemen tidak akan bisa bekerja dengan tenang dan nyaman. Dalam tahun pertama kemenangannya, presiden hanya sibuk melakukan konsolidasi atas koalisinya bukan langsung bekerja untuk mewujudkan visi, misi dan janji kampanyenya. Penentuan jabatan bisa dipastikan sangat dipengaruhi oleh kekuatan partai politik dan pemodal. Jabatan strategis dan itu dapat langsung ditentukan oleh presiden biasanya diisi oleh “pesanan” dari partai politik bahkan dari pengusaha yang memiliki andil dalam pemenangannya sebagai presiden. Politik balas jasa dengan membayar pemodal dan pendukungnya dengan penempatan jabatan strategis.

Bahkan menurut Maria Farida amandemen UUD 1945 justru melahirkan konstitusi baru, bukan sekadar amandemen UUD 1945.¹⁴² Sementara Roeslan Abdulgani menyatakan bahwa konstitusi baru yang dibuat pada tahun 2002 mengandung kelemahan dan kekacauan terutama mengenai kedudukan MPR, kedaulatan rakyat dan sistem pengelolaan negara.¹⁴³

Dapat dikatakan bahwa setelah amandemen keempat UUD 1945, fungsi dan status MPR mengalami perubahan, yang tidak sesuai dengan norma standar Indonesia (Pancasila) dan pembukaan UUD 1945. Berdasarkan pada kedua hal tersebut terlihat bahwa teori *original inten* semula daripada keinginan pendiri negara adalah membangun MPR yang juga dapat berfungsi sebagai lembaga perundangan. Kemudian, konsep permusyawaratan perwakilan kembali ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945, yang secara langsung menetapkan Indonesia sebagai negara berdaulat rakyat. Sebelum Amandemen UUD 1945, MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara. Konsep ini berbeda dengan niat awal para *founding fathers* dengan adanya Amandemen Keempat UUD 1945. Hal ini kemudian menyebabkan MPR tidak berfungsi secara normal dan harus dijadikan sebagai lembaga untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.

¹⁴¹ Imam Mawardi, *“Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam, terjemahan Fadhli Bahri dari kitab al-Ahkam al-Sulthaniyyah”* (Darul Falah, Jakarta: 2006), hlm. 1

¹⁴² Yop Pandie, *“Polemik Cabut Mandat SBY, Suatu Tranformasi dari Masyarakat Nrimo ke Masyarakat Peduli Nasib Bangsa”* (Bina Rena Parwara, Jakarta: 2007), hlm. 132

¹⁴³ Roeslan Abdulgani, *“Jangan Sampai Kualat Rakyat Harus Bergerak”* (Bina Rena Pariwara, Jakarta: 2004), hlm. 5

Dalam konstruksi ketatanegaraan sebelum amandemen, meskipun kedaulatan berada di tangan seluruh rakyat Indonesia, tidak semua rakyat Indonesia berhak menjalankan kedaulatannya. Namun, perwujudan seluruh kedaulatan rakyat (*Vertretungsorgan des Willens des Staatvolkes*) yakni MPR yang menduduki kekuasaan negara tertinggi di antara lembaga negara lainnya. Oleh karena itu, menurut UUD 1945 kedaulatan rakyat atas sistem politik diwujudkan secara tidak langsung.¹⁴⁴

Jika menyebut gagasan awal pendiri negara Indonesia, jelas UUD 1945 lebih bertumpu pada Pancasila. Setidaknya itu diungkapkan dalam beberapa prinsip. *Pertama*, asas musyawarah menekankan pada koordinasi dan integrasi nilai-nilai bersama yang ditetapkan dalam Pancasila. Prinsip musyawarah dilaksanakan melalui mekanisme representatif, yaitu sebagai alat diskusi dan saling menguatkan nilai-nilai bersama. *Kedua*, nilai kekeluargaan dalam perekonomian mencerminkan kuatnya nilai solidaritas sosial dan upaya kolektif dalam kehidupan ekonomi. *Ketiga*, peran keluarga, ibu dan perkawinan sebagai landasan sosial kesejahteraan bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Peran keluarga ini bahkan membentuk keluarga besar, yang sangat penting untuk menjaga jaringan kolektif sosial dalam kehidupan ekonomi. *Keempat*, agama memiliki peran yang sangat kuat sebagai sumber nilai bersama dalam kehidupan berbangsa. Sila pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa", dianggap sebagai nilai utama yang menopang seluruh prinsip UUD 1945.¹⁴⁵

Nilai khas dari Indonesia dijalankan dalam sistem Malaysia terdapat hubungan dengan adat melayu yang sudah dijalankan sejak akhir abad ke-19. Dua tradisi bernegara Indonesia dalam masyarakat melayu yang berpengaruh bagi Malaysia yakni Adat *Perpatih* dan Adat *Temenggong* yang berasal dari Minangkabau Sumatera Barat. Kajian hukum ketatanegaraan memperlihatkan bahwa Adat Temenggong berkarakter otokratis,¹⁴⁶ sedangkan Adat Perpatih berkarakter demokratis.¹⁴⁷

Tradisi bernegara Indonesia dijalankan di Malaysia, pasca amandemen UUD 1945 Indonesia meninggalkan tradisi bernegaranya dengan tranplantasi hukum dari sistem Amerika Serikat khususnya dalam sistem pemilihan presiden yang perbandingan implikasi sistem pemilihan presiden Indonesia yang berdasarkan permusyawaratan perwakilan dan sistem pemilihan presiden Indonesia secara langsung liberal.

¹⁴⁴ Toto Pandoyo, "Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945" (Liberty, Yogyakarta: 1992), hlm. 145-146

¹⁴⁵ Aidul Fitriciada Azhari, "Mekanisme Checks and Balances dan Budaya Konstitusional dalam Buku, Bunga Rampai Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia" (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama, Jakarta: 2019), hlm. 77

¹⁴⁶ Dalam Adat Temenggong, Raja yang menjadi penguasa dengan sistem suksesi kerajaan yang turun temurun dan memiliki otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan. Lihat Abdullah Siddik, "Pengantar Undang-Undang Adat di Malaysia" (Penerbit University Malaya, Kuala Lumpur: 1975) hlm. 110

¹⁴⁷ Dalam Adat Perpatih mekanisme pengambilan keputusannya berdasarkan kemufakatan dalam perwakilan yang berjenjang. *Ibid.*

Tabel 11

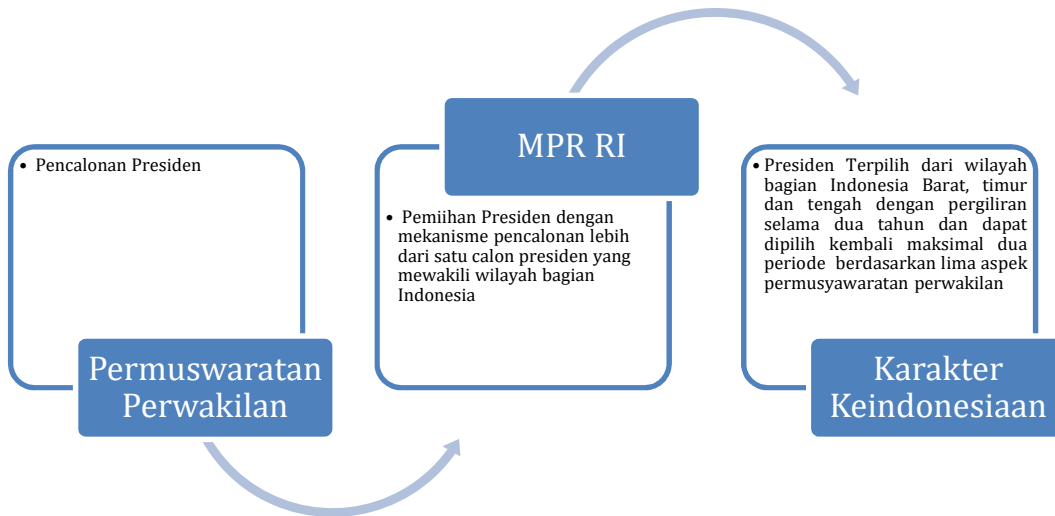
**Perbandingan Implikasi Sistem Pemilihan
Presiden Indonesia**

No.	Implikasi	Pemilihan Presiden Berdasarkan Permusyawaratan Perwakilan	Pemilihan Presiden Langsung Liberal
1.	Legitimasi	Kuat	Kuat
2.	Biaya	Relatif lebih murah	Besar dan boros
3.	Politik Uang	Relatif sedikit	Banyak
4.	Waktu	Sebentar	Lama
5.	Proses Penyelenggaraan	Pendek	Panjang
6.	Potensi Konflik	Sedikit	Banyak
7.	Intervensi Tim Sukses	Kecil	Besar
8.	Korban Jiwa	Tidak ada	Banyak

Berdasarkan data dan hasil pemilu yang dilaksanakan pasca kemerdekaan hingga era reformasi, konsep pemilihan presiden menurut karakter keindonesiaan yang ideal berdasarkan permusyawaratan perwakilan yang memiliki aspek kesepakatan, keterbukaan, kebersamaan, kekeluargaan dan keterwakilan melalui pemilihan presiden tidak langsung melalui MPR sebagai lembaga tertinggi negara untuk memilih presiden dengan konsep pergiliran sesuai dengan wilayah yang ada di Indonesia yakni Barat, Tengah dan Timur sebagai bagian dari unsur keterwakilan dengan masa dua tahun dan masing-masing tidak boleh dipilih kembali.

Skema 7

Mekanisme Pemilihan Presiden Berdasarkan Permusyawaratan Perwakilan yang Berkarakter Keindonesiaan



Konsep sistem pemilihan presiden berdasarkan lima aspek permusyawaratan perwakilan yang menjadi karakteristik keindonesiaan yaitu (1) kesepakatan sebagai kekuatan dari mufakat dalam permusyawaratan, (2) kebersamaan sebagai bangsa yang merdeka mewujudkan keinginan bersama meninggalkan semua sistem termasuk sistem pemilihan presiden yang dilaksanakan oleh penjajah (dekolonisasi) dengan menjalankan tradisi bernegara Indonesia, (3) keterbukaan bagi rakyat Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai presiden dan wakil presiden (calon), (4) kekeluargaan untuk kemaslahatan bangsa sesuai tujuan nasional dalam *modus vivendi* yakni pembukaan UUD 1945 dan, (5) keterwakilan dari multikultural Indonesia dengan bhineka tunggal ika dalam suatu lembaga tertinggi negara yang berasal dari pemikiran perumus asli UUD 1945 yakni MPR sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat merupakan kebaruan dari penelitian yang ada sebelumnya karena selama pemilihan presiden dari periode ke periode di Indonesia sering muncul dikotomi asal calon presiden dari Jawa dan Non Jawa. Berdasarkan bagian wilayah di Indonesia yang terdapat Indonesia Barat, Tengah dan Timur. Calon Presiden yang dipilih sesuai dengan karakteristik permusyawaratan perwakilan melalui MPR RI ada mewakili ketiga bagian wilayah tersebut untuk dipergilirkan selama masa enam tahun masing-masing menjabat dua tahun maksimal dua periode.

Masa jabatan presiden yang selama ini ada dan rentan disalahgunakan yang tercatat dalam sejarah ketatanegaraan baik pada masa orde lama, orde baru dan era reformasi baru dibatasi menjadi dua periode setelah itu tidak dapat dipilih kembali

dengan calon yang sama menduduki jabatan presiden maupun wakil presiden untuk menghindari dugaan *abuse of power* dan penyalahgunaan jabatan.

Pemilihan presiden yang berkarakter keindonesiaan menjadi jelas sesuai dengan tradisi bernegara dan kekuatan sila keempat Pancasila terpancar dalam sistem pemilihan presiden berdasarkan permusyawaratan perwakilan. Presiden yang terpilih merupakan representasi dari seluruh bagian wilayah di Indonesia yang sesuai dengan semboyan bangsa “Bhineka Tunggal Ika”. Sejarah ketatanegaraan Indonesia, sistem pemerintahan parlementer telah diterapkan, presiden yang dipilih oleh MPR menjadi kepala negara, dan perdana menteri adalah kepala pemerintahan.

Amandemen UUD NRI Tahun 1945 menjadi suatu keharusan untuk mewujudkan hukum yang simetris. Pemilihan Presiden selama reformasi medio 2004-2019 berdasarkan pasal 6A UUD NRI Tahun 1945 dengan mekanisme pemilihan langsung bersyarat dan ditambah serentak pada pemilu 2019 sangat liberal dan kapitalistik dengan mentranplantasi sistem pemilihan presiden dari Amerika Serikat banyak mendatangkan permasalahan mulai dari hukum yang asimetris, termasuk dalam penyelenggarannya pemilihan presidennya tidak hanya pembiayaan tetapi juga tragedi kemanusiaan dengan banyaknya korban jiwa dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Sistem pemilihan presiden yang berkarakter keindonesiaan dengan kelima aspek permusyawaratan perwakilan yakni kesepakatan, kebersamaan, keterbukaan, kekeluargaan dan keterwakilan. Kesadaran bersama karena berasal dari tradisi bernegara dan memiliki *original inten* sesuai dengan suasana kebatinan bangsa Indonesia yang pernah dihadirkan *the founding father* dalam merumuskan sistem pemilihan presiden Indonesia pada awal pembentukan naskah asli UUD 1945.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Karakteristik permusyawaratan perwakilan dalam sistem pemilihan presiden di Indonesia berdasarkan lima aspeknya yakni kesepakatan, kebersamaan, keterbukaan, kekeluargaan dan keterwakilan yakni (a) masa orde lama perodesasi tahun 1945-1966 dikategorikan transformatif karena kelima aspek permusyawaratan perwakilan tidak terpenuhi dan peraturan yang mendasarinya berubah seperti pada kemerdekaan dimulai dari Pasal III aturan peralihan UUD 1945, kemudian diganti dengan Pasal 2 UUD RIS 1949 dan Pasal 45 UUDS tahun 1950, dan akhirnya mengesahkan keputusan presiden untuk menjadikan Sukarno presiden seumur hidup. (b) Masa orde baru perodesasi tahun 1966-1998 dikategorikan justifikatif pasca dikukuhkan oleh MPRS pada tahun 1968 kemudian terus terpilih setiap lima tahun sekali dengan pemilihan berdasarkan Ketetapan MPR No. II/MPR/1973 meninggalkan kelima aspek permusyawaratan perwakilan. (c) Masa transisi 1999-2004 sistem pemilihan presidennya dikategorikan permusyawaratan perwakilan yang menjalankan kelima aspek permusyawaratan dengan dasar

hukum Pasal 6 ayat (1) dan (2) UUD 1945. (e) Era reformasi pascaamandemen sistem pemilihan presiden perodesasi 2004-2019 dikategorikan liberal karena menghilangkan lima aspek permusyawaratan perwakilan dengan mentranplantasi hukum dari sistem pemilihan presiden Amerika Serikat yang diatur dalam Pasal 6A dan Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945.

2. Konsep sistem pemilihan Presiden yang berkarakter keindonesiaan berdasarkan lima aspek permusyawaratan perwakilan dengan menghadirkan: kesepakatan, kebersamaan, keterbukaan, kekeluargaan dan keterwakilan. (a) Kesepakatan sebagai kekuatan dari mufakat dalam permusyawaratan. (b) Kebersamaan sebagai bangsa yang merdeka mewujudkan keinginan bersama meninggalkan semua sistem termasuk sistem pemilihan presiden yang dilaksanakan oleh penjajah (dekolonisasi) dengan menjalankan tradisi bernegara Indonesia. (c) Keterbukaan bagi seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. (d) Kekeluargaan untuk kemaslahatan bangsa dalam mencapai tujuan nasional sesuai pembukaan UUD 1945. (e) Keterwakilan dari multikultural bangsa Indonesia dengan *bhineka tunggal ika* termanifestasi dalam suatu perwakilan dengan kedudukannya sebagai lembaga tertinggi negara yang berasal dari pemikiran perumus asli UUD 1945 yakni MPR sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat dengan sistem pemilihan presiden tidak langsung.

B. Saran

1. Kepada Anggota MPR RI yang terdiri atas Anggota DPR RI dan DPD RI untuk melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945 sesuai kewenangannya menjadi suatu keharusan khususnya dalam mengembalikan MPR RI menjadi lembaga tertinggi negara dan pemilihan presiden dikembalikan mekanismenya kepada MPR RI berdasarkan permusyawaratan perwakilan dengan konsep pergiliran sesuai dengan wilayah bagian di Indonesia sehingga berjalanannya penyelenggaraan kekuasaan eksekutif dapat berjalan dengan baik, tidak ada dikotomi kedaerahan terhadap presiden yang terpilih dan terdapat laporan pertanggungjawaban presiden.
2. Kepada fungsionaris partai politik, pengurus organisasi masyarakat dan masyarakat sipil disarankan memahami bahwa tranplantasi hukum dari Amerika Serikat (Barat) khususnya dalam sistem pemilihan presiden langsung seharusnya dihindari karena banyak menyebabkan komplikasi berdasarkan pelaksanaan sistem pemilihan langsung dengan pembiayaan yang tinggi, kerumitan sistem pemilihan dan jatuhnya korban jiwa yang sering disebut tragedi kemanusiaan dalam pesta demokrasi di Indonesia.
3. Kepada Akademisi, penelitian mengenai sistem pemilihan presiden Indonesia berdasarkan permusyawaratan perwakilan dapat dilanjutkan untuk perluasan khazanah ketatanegaraan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori, *Epistimologi Ilmu Hukum Transendental dan Implementasinya dalam Pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum*. Prosiding disampaikan pada Seminar Nasional dengan Tema “Pengembangan Epistimologi Ilmu Hukum”, 11 April 2015 di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Absori, *Politik Pembangunan Hukum Sumber Daya Alam Bersendikan Cita Hukum Pancasila dalam Cita Hukum Pancasila Ragam Paradigma Hukum Berkepribadian Indonesia*, (Pustaka Itizam, Solo: 2016)
- Absori. et.al, *Cita Hukum Pancasila, Ragam Paradigma Hukum Berkepribadian Indonesia*, (Pustaka Itizam, Solo: 2016)
- Absori, Kelik Wardiono, Shidarta dan Aan Asphianto (Ed), *Transendensi Prospek dan Implementasi* (Genta Publishing, Yogyakarta: 2017)
- Abdulgani, Roeslan, *Jangan Sampai Kualat Rakyat Harus Bergerak* (Bina Rena Pariwisata, Jakarta: 2004)
- Ad-Dumaji, Abdullah, *Imamah, Uzhma, Ter. Umar Mujaahid*, (Ummur Qura, Jakarta: 2016)
- Al-Mawardi, Imam, *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, terjemahan Fadhli Bahri dari kitab *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, (Darul Falah, Jakarta: 2006)
- Al-Mawardi, Imam, *Hukum Tatanegara Islam dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), edisi terjemahan dari judul aslinya *al ahkamus -sulthoniyah wal wilaayaatud-diniyyah* (Al Maktab al Islami, Beirut: 1996)
- Al-Mawardi, Imam *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam, diterjemahkan oleh Fadhli Bahri, (Darul Falah, Jakarta: 2000)
- Al-Buraey, Muhammad A., *Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, (CV Rajawali, Jakarta: 1985)
- Al-Qardhawy, Yusuf, *Fiqih Daulah dalam Perspektif Al-Qur’an dan Sunnah*, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, (Pustaka Kautsar, Jakarta: 1997)
- As-Syawi, Taufiq *Syura Bukan Demokrasi*, (Gema Insani Press, Jakarta: 1997)
- Al-Attas, S.M. his *Prolegomena to The Metaphysics of Islam An Exposition of the Fundamental Element of the Worldview of Islam*, (ISTAC, Kuala Lumpur: 1995)
- Aljauziyah, Ibnul Qayyim, *Zaadul ma’ad fi Huda Khairil-’ibad*, juz 1
- Alifuddin, Moh., *Berdemokrasi, Panduan Praktis Perilaku Demokrasi*, (Script Publishing, Jakarta: 2012)
- Alkostar, Artidjo *Mengkritisi Fenomena Korupsi di Parlemen*, Yogyakarta: Jurnal Hukum, Vol 15 No. 1 2008
- Aolain, Fionnuala Ni and Colm Campbell, *The Paradox of Transition in Conflicted Democracy*, Human Right Quarterly Journal, No. 1, Vol 27, Februari , 2005
- Adian, Donny Gahral, *Demokrasi Substansial: Risalah Kebangkitan Liberalisme*, (Koekoesan, Jakarta: 2010)
- Aditya, Zaka Firma dan Sholahuddin Al-Fatih, *Reaktualiasi Demokrasi Permusyawaratan Dalam Pembuatan Kebijakan Publik yang Partisipatif dan Bermoral*, Paper Prossiding dipresentasikan dalam Konferensi Nasional “Membangun dan

- Memperkuat Integritas Tata kelola Pemerintahan dan Praktik Bisnis yang Baik untuk Mewujudkan Peradaban Nasional yang Berdaya Saing*”, di Universitas Paramadina, Jakarta, pada tanggal 14-15 Desember 2016.
- Alayawi, Ibn Khalifah, *Al-Jami’ al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul wa Syarh Ayatiha* (t.p, Kairo: t.th)
- Al-Thabari, Abi Ja’far Muhammad bin Jarir, *Tafsir Thabari: Jami’ul Bayan ‘an Ta’wil al-Qura’n Juz II* (Hajar, Kairo: 2001)
- Al-Razi, Imam Muhammad Fakhrudin, *Tafsir al-Fakhru al-Razi Juz XI* (tt: Darul Fikr: 1981)
- A. M. W., Pranaka, *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila* (Yayasan Proklamasi CSIS, Jakarta: 1985)
- Abdulgani, Roeslan, *Pengembangan Pancasila di Indonesia*, (1977)
- Antlov, Hans, *The Formulation of Good Governance in ‘Asian Values Democracies’*, disampaikan pada seminar *Good Governance and Legal Reforms*, LP3ES dan ICEL, 20 Agustus 1998.
- Anderson, Benedict, Clifford Geertz, *Mencari Demokrasi*, (PT Midas Surya Grafindo, Jakarta: 1999)
- Amirmachmud, *Pembangunan Politik Dalam Negeri* (Gramedia, Jakarta: 1987)
- Arief, Bernard, *Refleksi tentang Fundadi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, (Disertasi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung: 1996)
- Asgart, Sofian Munawar, *Representasi Dalam Dilema: Fenomena Golput dalam Pemilu 2009 dan Model Representasi Alternatif*, <http://politik.kompasiana.com/2011/04/13/dilema-mekanisme-perwakilan-fenomena-golput-dalam-pemilu2009-dan-model-representasi-alternatif-355291.html> Representasi Dalam Dilema:
- A. S. S., Tambunan, *Hukum Tata Negara Perbandingan*, (Puporis Publisher, Jakarta: 2001)
- Ambardi, Kuskridho, *The Making of the Indonesian Multiparty System: A Cartelized Party System and Its Origin*. (Disertasi pada The Ohio State University: 2008)
- Asmaroni, Ambiro Puji, *Menjaga Eksistensi Pancasila dan Penerapannya bagi Masyarakat di Era Globalisasi* dalam Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 1 No. 2, 2017
- Amalia, Lucky Sandra (ed), *Evaluasi Pemilihan Presiden Langsung di Indoneia* (Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2016)
- Alrasyid, Harun, *Pengisian Jabatan Presiden* (PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta: 1999)
- Arinanto, Satya, *Politik Hukum 2*, (Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: 2001)
- Arianto, Satya, *Agenda Pertemuan Empat Tokoh*, Koran Tempo, 12 April 2001,
- Arianto, Satya, *Sorotan: Pemerintahan Baru*, Kompas, 30 Juli 2001
- Arianto, Satya, *Legal Aspect of Good Public Governance in Indonesia* (Paper presented in Joint Seminar on Living in Plural Societies organized by Pemuda Muhammadiyah and The British Council in Jakarta, 21-22 Februari 2002)

- Arianto, Satya, *Reformasi Hukum, Demokratisasi, dan Hak-Hak Asasi Manusia*, *Hukum dan Pembangunan*, Nomor 1 – 3, Tahun XXVIII, Januari – Juni 1998
- Arinanto, Satya, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Indonesia* (Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Jakarta: 2018)
- Arianto, Satya *Legal Aspect of Good Public Governance in Indonesia* (Paper presented in Joint Seminar on Living in Plural Societies organized by Pemuda Muhammadiyah and The British Council in Jakarta, 21-22 Februari 2002)
- Apurines, Muh. Ide *Pratik Pemerintahan Pada Kesultanan Buton Tahun 1540-1960* Maseh dalam https://www.academia.edu/11742287/Praktik_Pemerintahan_Kesultanan_Buton_Pada_tahun_1540-1960_Masehi,
- Arif, Syaiful, *Falsafah kebudayaan Pancasila: Nilai dan Kontradiksi Sosialnya*, (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2016)
- Apeldorn, Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Noordhoff-kolff N.V, Jakarta: 1959)
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, Jakarta: 2009)
- Ardipandanto, Aryojati, *Kelemahan Pelaksanaan Pilpres 2014, Sebuah Analisis*, Jurnal DPR RI, 25 Maret 2015.
- Azhari, Aidul Fitriciada, *Rekonstruksi Tradisi Bernegara Dalam UUD 1945*, (Gentha Publishing, Yogyakarta: 2015)
- Azhari, Aidul Fitriciada, *Menemukan Demokrasi*, (Muhammadiyah University Press Universitas Muhammadiyah Surakarta, Solo: 2005)
- Azhary, Aidul Fitriciada, *Teori bernegara Bangsa Indonesia: Suatu Pemahaman tentang pengertian-pengertian dan asas-asad dalam hukum tata negara*, (Jakarta: Pidato Pengukuhan dalam ucapan penerimaan jabatan sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Jakarta Tanggal 26 Juli 1995)
- Al-Attas, S.M.N, , in his *Prolegomena to The Metaphysics of Islam An Exposition of the Fundamental Element of the Worldview of Islam*, (ISTAC, Kuala Lumpur: 1995)
- Azhari, Aidul Fitriciada, *Penafsiran Konstitusi dan Implikainya terhadap Pembentuk Sistem Ketatanegaraan Demokrasi atau Otokrasi (Studi Tentang Penafsiran UUD 1945 dan Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di Indonesia)* (Pascasarjana UI, Jakarta: 2005)
- Azhari, Aidul Fitriciada, *Rekonstruksi Tradisi Bernegara dalam UUD 1945*, (Genta Publishing, Yogyakarta: 2014)
- Azhari, Aidul Fitriciada, *Mekanisme Checks and Balances dan Budaya Konstitusional dalam Buku, Bunga Rampai Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia* (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama, Jakarta: 2019)
- Azwar, Rully Chairul, *Politik Komunikasi Partai Golkar di Tiga Era Dari Partai Hegemonik ke Partai Berorientasi Pasar* (Kompas Gramedia, Jakarta: 2009)
- A.S, Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English-Fifth Edition* (Oxford University Press, London: 1995)
- Attamimi, Hamid S., *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, (Disertasi, Universitas Indonesia, 1990)
- Asshiddiqie, Jimly, *Islam dan Kedaulatan Rakyat*, (Gema Insani Press, Jakarta: 1995)
- Asshiddiqie, Jimly, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, (Sinar Grafika, Jakarta: 2014)

- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Cetakan Pertama*, (Mahkamah Konstitusi dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, Jakarta: 2004)
- Asshiddiqie, Jimly, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta: 1994)
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: 2006)
- Ashiddiqie, Jimly, *Pengantar Hukum Tata Negara, Jil. II*, (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: 2006)
- Armado *The Suma Oriental of Tome Pires*. Vol. 1, 1944
- Awat, Rustam, *Alternatif Pengembangan Sumber Daya Budaya di Keraton Buton Sulawesi Tenggara* (Tesis Sekolah Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta: 2017)
- Bakry, Noor MS, *Pancasila Yuridis Kenegaraan, Edisi Kedua, Cet I*, (Liberty, Yogyakarta: 1987)
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul,, *Mu'jam Mufahras li al-Fazh al-Quran al-Karim* (Dar alKitab Al-Mishriyah, Kairo: 2008)
- Baetal, Bachtiar, *Kekuasaan dan Pertanggungjawaban Presiden Dalam Konstruksi Politik Hukum Konstitusi Negara Republik Indonesia* (PDIH Trisakti, Jakarta: 2017)
- Baechler, Jean, *Demokrasi Sebuah Tinjauan Analitis*, (Kanisius: Yogyakarta, 2001)
- Basuki, Udiyo, *Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Amanat Reformasi dan Demokrasi*, *Jurnal Panggung Hukum*, Vol.1, No.1, Januari 2015
- Bahar, Safrudin, *Kedaulatan Rakyat*, (Penerbit BP7 Pusat, Jakarta: 1997)
- Bahar, Safrudin dan Nannie Hudawati (penyunting), *“Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)-Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)”*, Sekretariat Negara Republik Indonesia: Jakarta, 1998
- Bhakti, Ikrar Nusa dan Riza Sihbudi, *Kontroversi Negara Federal* (Mizan, Bandung: 2002)
- Ball, Terrance dkk, *Political Ideologies And The Democratic Ideal*, (Perason, New Jersey: 2013)
- Buruma, Ian, *Is Democracy An Asian Value ?*, TIME Magazine 1996.
- Budiardjo, Miriam, *“Peranan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Demokrasi Terpimpin”* dalam Himpunan Kuliah Politik Dalam Negeri, Bahan Kursus Singkat Seskoad, Bandung, 1966
- Black, Antony, *Pemikiran Politik Islam*, (Serambi Ilmu Semesta, Jakarta: 2006)
- Bryce, J., *Studies in History and Jurisprudence*, vol.1,(Clarendon Press, Oxford, England: 1901)
- Corteseo, F.S.A., Declerqie, *Bijdragen tot de Kennis der Residentie Ternate*. 1890
- Cortesau, Armando, *The Suma Oriental of Tome Pires and The Book of Fransisco Rodrigues* (Robert Maclehouse and Co. Ltd., London: 1997)
- Creswell, John W., *Research Design: Qualitative & Quantitative Approache* (SAGE Publication, Inc, California: 1994)
- Dahl, Robert, *Who Govern? Democracy and Power in an America City*, (Yale University Press, New Haven: 1961)
- Dahl, Robert A., *Perihal Demokrasi* (Yayasan Obor Indonesia, Jakarta: 2001)

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2008)
- Djiwandono, J. Soedjiati, *Democratic Experiment in Indonesia: Between Achievements and Expectations, The Indonesian Quarterly*, Vol.XV, No.4, 1987
- Effendi, Sofian, *Sistem Pemerintahan adalah Jati Diri Bangsa*, <http://Sofian.Staff.Ugm.ac.id/Artikel/Dialog> Kembali ke Jati Diri Negara Semi Presidensial.pdf,
- Fadlika, Khairul Zulfa Azzah, *Pemilu Presiden 2019: Antara Konstetasi Politik dan Pemicu Pemecah Bangsa*, Jurnal Unnes Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018
- Fahmi, Khairul, *Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 3, Juni 2010
- Fernandes, Arya, *Politik Identitas Dalam Pemilu 2019: Proyeksi dan Efektifitas*, (CSIS Election Series I, Jakarta: 2018)
- Freeman, M.D.A., *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*, (Sweet & Maxwell, London: 1994)
- Freejohn, et. Al, *Constitutional Culture and Democratic Rule* (Cambridge University Press, Cambridge: 2001)
- Firdaus, *Membangun Hukum Indonesia yang Berwawasan Nilai-Nilai Pancasila*, Jurnal Konstitusi IV, No. 1, Juni 2011
- Grondin, Jen, *Hat Habermas Die Subjek Philosophie* (Algemen Zeitchrift, Verabschiedet in: 1987)
- Gutman, Amy and Deniss Thomson, *Democracy and Disagreement* (Belknap Harvard, England: 1996)
- Goh, Daniel, *The Rise of Neo-Authoritarianism: Political Economy and Culture in the Trajectory of Singapore Capitalism*, Working Papers #591. Center for Research on Social Organization, Department of Sociology, The University of Michigan, 2002
- Hatta, Mohammad, *Bung Hatta Berpidato Bung Hatta Menulis*, (Mutiarra, Jakarta: 1979)
- Hatta, Mohammad, *Pengantar Koperasi*, Koran Daulat Ra'jat, No. 1, 20 September 1931
- Habermas, Jurgen, *Legitimation Chrisis tr. T. McCarthy*, (Beacon Press, Boston: 1996)
- Habermas, Jurgen, *Between Fact and Norm Contribution to Discourse Theory of Law and Democracy* (terjemahan William Rehg), (Cambridge University Press, Massachussets: 1996).
- Habermas, Jürgen, Between Facts And Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy, (The MIT Press, Cambridge, Massacuset: 1998)*
- Hadiwinata, Bob Sugeng, *Demokrasi di Indonesia, Teori dan Praktik* (Graha Ilmu, Yogyakarta: 2010)
- Hafiz, Vedi R., *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*, (Stanford University Press, California: 2010)
- Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, (Tintamas, Jakarta: 1970)
- Hatta, Moh, *Indonesia Merdeka*, dalam karya lengkap "Merdeka" dalam karya lengkap Bung Hatta. *Buku I: Kebangsaan dan Kerakyatan*, (Penerbit LP3ES, Jakarta: 1998)
- Huntington, Samuel P., *Political Order In Changing Societes* (Yale University Press, Yale: 1968)

- Haris, Syamsudin, *Pemilu Serentak, Perlukah Diubah Kembali*, Pandangan yang disampaikan sebagai ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam sidang permohonan pengujian UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap UUD NRI 1945, tanggal 17 Oktober 2019;
- Haris, Syamsuddin, ed, *Pemilu Nasional Serentak 2019* (Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2016)
- Haris, Syamsudin, *Konflik Presiden – DPR dan Dilema Transisi Demokrasi di Indonesia* (Pustaka Utama Grafiti, Jakarta: 2007)
- Hogue, Rod, and Martin Harrop, *“Political Science: A Comparative Introduction*, (Fourth Edition, Palgrave Macmillan, Hampshire: 2004)
- Hardiman, F. Budi, *Demokrasi Deliberatif, Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas* (Kanisius: Yogyakarta, 2009)
- Hardiman, F. Budi, *Dari Kolonialisasi Birokrasi Ke Birokrasi Pasar, dalam AE Prioyono dan Usman Hamid, Merancang Arah Baru Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi*, (PT. Gramedia, Jakarta: 2014)
- Heywood, Andrew, *Politics*. (Macmillan Press, London: 1997)
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Raja Grasindo Persada, Jakarta: 2006)
- Hamid, Abdul, *Teori Negara Hukum Moderen*, (Penerbit Pustaka Media, Bandung: 2016)
- Haris, Abdul, *Kemerdekaan* (The Akbar Tandjung Institute, Jakarta: 2007)
- Hambali, *Sistem Pemerintahan Kesultanan Buton “Ketatanegaraan”* (Skripsi, 1990)
- Ikram. A., *Katalog Naskah Buton* (Yayasan Obor Indonesia, Jakarta: 2001)
- Ibrahim, Anis, et. al, *Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat*, (Setara Press, Malang: 2013)
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bayumedia Publishing, Malang: 2006)
- Istanto, F. Sugeng, *Penelitian Hukum* (CV Ganda, Yogyakarta: 2007)
- Isra, Saldi, *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia* (PT Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2010)
- Isra, Saldi, *“Perkembangan Pengisian Jabatan Presiden di Bawah UUD 1945*, dalam <http://www.saldiisra.web.id>, diunduh 24 Juni 2019
- Iqbal, Muhammad, dan Amien Nasution, *“Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer”*, (Kencana, Medan: 2013)
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Gaya Media Pertama, Jakarta: 2001)
- Janis, Roy B.B., *Wapres Pendamping atau Pesaing* (Penerbit PT BIP, Jakarta: 2008)
- Junaenah, Inna, *Kontribusi Tatanan Islam Terhadap Demokrasi Permusyawaratan di Indonesia*, Jurnal Ahkam, Vol XVI, No. 2, Juli 2016
- Kaelani, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama dan Humaniora*, (Penerbit Paradigma, Yogyakarta: 2012)
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila Paradigma*, (Yogyakarta: 2001)
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, (Russel & Russel, Newyork: 1973)
- Kamis, Margarito, *Pilpres Liberal, Segeralah Berlalu*, Kolom Republika, 15 Juli 2019.

- Khasanofa, Auliya, *The Concept of Deliberations Amongst Representatives in Indonesia's Presidential Election System*, International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, Issue 08, 2020
- Khasanofa, Auliya, Absori, Aidul Fitriadi, Azhari and Kelik Wardiono, *The Representative Consultation Concept amongst Representatives in Presidential Election System in Indonesia*, International Journal of Advanced Science and Technology, Vol. 29, No. 6, 2020
- Khasanofa, Auliya and Muhammad Zulhidayat, *Indonesian Democracy: Folk Party or Humanitarian Tragedy?* Advances in Economics, Business and Management Research, Atlantis Press, volume 121, International Conference on Law Reform (INCLAR 2019)
- Kortman, C. A. J. M., *Constitutioneel Recht*, (Kluwer, Deventer: 1990)
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Pusat Studi Tata Negara Fakultas Hukum UI, Jakarta: 1988)
- Khaldun, Ibnu, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, (Dar al-Sya'b, al-Qahirah: 2000)
- Konstituante, *Tentang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Konstituante* (Konstituante: 1959)
- Latif, Yudi, *Menjadikan Pancasila Sakti*, Jurnal Populer Pemikiran Ekonomi Islam, Kasyaf, Pusat Studi dan Bisnis Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Volume 1 Tahun 1/2019
- Latif, Yudi, *Kratos Minus Demos: Demokrasi Indonesia Catatan Dari Bawah* (Buku Obor, Jakarta: 2012)
- Latif, Yudi, *Revolusi Pancasila* (Mizan Media Utama, Bandung: 2017)
- Latifulhayat, Atip, "Editorial", Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran, Vol. 1 No. 1, April 2014
- Linz, Juan J., et al., *Defining and Crafting Democratic*, (Terjemahan : *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat : Belajar dari Kekeliruan Negara-negara Lain*), diterjemahkan oleh Rahmani Astuti dengan editor : Ikrar Nusa Bakti dan Riza Sihbudi, (Mizan, Bandung: 2001)
- Lewis, Bernard, et.al. *Islam Liberalisme Demokrasi*, Terj. Mun'im A. Sirry, (Paramadina, Jakarta Selatan: 2002)
- Ligtvoet, *beschrijving en Geschiedenis van Buton*, BKI, Vol. 26, 1878
- Lijphart, Arend, *Electoral System and Party System: A Study of Twenty Seven Democracy 1945-1990*, (Oxford University Press, Oxford: 1995)
- Lijphart, Arend, *Parliamentary Versus Presidential Government*, (Oxford University Press, Oxford: 1992).
- Lawrence, Christopher N., "Regime Stability and Presidential Government: The Legacy of Authoritarian Rule, 1951-90". Paper in 2000 SPSA Conference Departement of Political Science The University of Mississippi
- Lubis, Solly, *Hukum Tata Negara*, (Mandar Maju, Bandung: 2002)
- Lubis, Solly, *Pembahasan UUD*, (Rajawali Press, Jakarta: 1987)
- Manan, Bagir, *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, (FH UII Press, Yogyakarta: 2003) Samsul Wahidin, 1986, *MPR RI dari Masa ke Masa*, (Bina Aksara, Jakarta: 1986)
- Manan, Bagir, *Pembaruan UUD 1945*, Jurnal Magister Hukum, Vol. 2 No. 1, 2000

- Manan, Bagir, *Dasar-Dasar Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Makalah, 1994
- Manan, Bagir, *"Menulis Laporan Penelitian"*, Penataran Metodologi, Penelitian Bidang Hukum, Bagi Dosen Perguruan Tinggi Swasta", (Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Cisarua Bogor tanggal 8 s/d 13 Desember 1991)
- Manan, Bagir, *Lembaga Kepresidenan, Cet. Kedua*, (FH UII Press, Yogyakarta: 2003)
- Magnar, Kuntana, *Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dengan Presiden Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945: Pencarian Bentuk dan Isi*, (Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung: 2006)
- Mawardi, Imam, *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam, terjemahan Fadhli Bahri dari kitab al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Darul Falah, Jakarta: 2006)
- Mahendra, Yusril Ihza, *Dinamika Tata Negara Indonesia, Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, (Gema Insani Press, Jakarta: 1996)
- Mohammad, Goenawan, *Demokrasi dan Kekecewaannya* (Paramadina Press, Jakarta: 2009)
- Mahfud MD, Moh., *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2013)
- Mahfud MD, Moh., *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Cetakan Kedua/Edisi Revisi*, (Renika Cipta, Jakarta: 2001)
- Mahfud MD., Moh., *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Cet. Ke-2*, (Rineka Cipta, Jakarta: 2003)
- Mulyosudarmo, Soewoto, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, (Asosiasi Pengajar HTN dan HAN dan In-TRANS, Malang: 2004)
- Muhammad, Rusjdi Ali, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Syariat Islam: Mengenal Jati Diri Manusia*, (Ar-Raniry Press, Banda Aceh: 2004)
- Morsidi, *Undang-Undang Dasar Pemerintahan Kerajaan Sendiri di Buton, Baubau*, Jurnal, 1990
- Mahrudin, *Nilai-Nilai Hukum Dalam Undang-Undang Murtabat Tujuh*, Jurnal Al Adl, Vol. 8 No. 2, Juli 2015
- Muller, John, *Retreat From Doomsday, The Obsolescence of Major War* (Basic Book, Newyork: 1989)
- Moertopo, Ali, *Strategi Politik Nasional* (CSIS, Jakarta: 1974)
- Nashir, Haedar, *Muhammadiyah Membangun Integrasi Keislaman dan Kebangsaan Menuju Indonesia Berkemajuan* dalam buku *Darul-Ahdi Wasy-Syahadah, Konteks, Makna, Aktualisasi untuk Indonesia Berkemajuan* (Al Wasat Publishing House bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembinaan Mental dan Kebudayaan dan PP. Muhammadiyah, Jakarta: 2018)
- Nazir, *Metode Penelitian* (Ghalia Indonesia, Jakarta: 2003)
- Nazriyah, R., *Penguatan Peran Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-47 No.1 Januari-Maret 2017

- Nugraha, Harry Setya “Urgensi Pembentukan UU tentang MPR”, diakses dari <https://www.lintasparlemen.com/urgensi-pembentukan-uu-tentang-mpr/>
- Nugroho, Bimo, *Menatap Demokrasi Dari Jendela Jihari, Sebuah Pengantar*, (Institute Studi Arus Informasi, Jakarta: 1999)
- Nurhasim, Moch., *Ambang Batas Pencalonan dan Kecenderungan Koalisi*, Kompas, 8 November 2018.
- Novianty, Cora Elly, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan* (Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2: 2013)
- Notonagoro, *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*, (Rajawali Press, Jakarta: 1982)
- Nurhasim, Moch., *Ambang Batas Pencalonan dan Kecenderungan Koalisi*, Kompas, 8 November 2018
- O Hood, Phillips, and Paul Jackson, *Constitutional and Admintrative Law* (Sweet Maxwell, London: 1987)
- Nurdin, Ali, *Qur’anic Society*, (PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta: 2006)
- Tjandrasmita, Aur, *Arkeologi Islam Nusantara* (KPG, Jakarta: 2009)
- Leur, J. C. Van, *Indonesia Trade and Society* (The Hague, Nijhoff: 1957)
- Pandoyo, Toto, *Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945* (Liberty, Yogyakarta: 1992)
- Pandie, Yop, *Polemik Cabut Mandat SBY, Suatu Tranformasi dari Masyarakat Nrimo ke Masyarakat Peduli Nasib Bangsa* (Bina Rena Parwara, Jakarta: 2007)
- Purwoko, Bambang, “Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Pancasila,” Proceeding oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Kongres Pancasila di Universitas Gadjah Mada, 1 Juni 2009
- Purwadi, *Sejarah Sastra Jawa Klasik* (Panji Pustaka, Yogyakarta: 2009)
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulisyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, (Penerbit Gava Media, Yogyakarta: 2012)
- Pardede, Marulak, *Implikasi Sitem Pemilihan Umum Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 3 Nomor 1, April 2014
- Prayudi, *MPR, Transisi Kedaulatan Rakyat Dan Dampak Politiknya*, Politica Vol. 3, No. 1, Mei 2012
- Pramudito, Bambang, *Kitab Negara Kartagama : Sejarah Tata Pemerintahan dan Peradilan Keraton Majapahit*. (Gelombang Pasang, Yogyakarta: 2006)
- Riyanto, Astim, *Peran Strategis Garis-garis Besar Haluan Negara Dalam Mewujudkan Cita-cita dan Merealisasikan Tujuan Negara Indonesia: Dalam Perspektif Hukum Konstitusi*, Makalah, 2012.
- Riyanto, Astim, *Kapita Selekta Politik Kesejahteraan*, (Yapemdo, Bandung: 2010)
- Ranggawijaya, Rosjidi, *Wewenang Menafsirkan UUD*, (Penerbit Cita Bakti Akademika, Bandung: 1996)
- Ranggawidjaja, Rosjidi, *Pembatasan Konstitusional Hak Warga Negara untuk Memilih dan Dipilih Dalam Jabatan Publik*, Jurnal Konstitusi UNPAD, 2008
- Rosjidi Ranggawidjaja, *Hubungan Tata Kerja Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden* (Gaya Media Pratama, Jakarta: 1991)
- Reid, Anthony, *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680*. (Yayasan Obor Indonesia, Jakarta: 1992)

- Robert, Collin, *“Collins French Dictionary & Grammar 5th Edition* (HarperCollins Publishers, London: 2007)
- Roelofsz, Meilink, *Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago Between 1500 and about 1630* (Martinus Nijhoff, The Hague: 1962)
- Rohayuningsih, Heri, *Peranan BPUPKI dan PPKI dalam Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia*, Jurnal Forum Ilmu Sosial Vol. 36 No. 2 Desember 2009
- Romli, Lili *Mengapa Pemilihan Presiden Langsung? Catatan Pendahuluan* dalam Lili Romli, Ed., *Pemilihan Presiden Langsung 2004* (Pusat Penelitian Politik LIPI, Jakarta: 2005)
- Siddik, Abdullah, *Pengantar Undang-Undang Adat di Malaysia* (Penerbit University Malaya, Kuala Lumpur: 1975)
- Suny, Ismail, *Mekanisme Demokrasi Pancasila* (Aksara Baru, Jakarta: 1978)
- Susanto, Arif, *Transisi Demokrasi Dalam Dunia*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi 35, 2011
- Sunoto, *Mengenal Filsafat Pancasila: Pendekatan Melalui Sejarah dan Pelaksanannya*, (Hanindita, Yogyakarta: 1985)
- Suleman, Zulkifli, *Demokrasi Barat dalam Pandangan Hatta*, (Kompas, Jakarta: 2010)
- Suparlan, Parsudi, *Demokrasi Dalam Transisi Masyarakat Pedesaan Jawa, dalam Demokrasi Dan Proses Politik*, (LP3ES, Jakarta: 1986)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Universitas Indonesia Pers, Cetakan Ketiga, Jakarta: 1986)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-14, Jakarta: 2012)
- Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, (Jakarta: 1965)
- Stefanus, Kotan Y., *Perkembangan Kekuasaan Pemerintah Negara (Dimensi Pendekatan Politik Hukum Terhadap Kekuasaan Presiden Menurut UUD 1945)* (Univertas Atmajaya, Yogyakarta: 1998)
- Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)* (UMM Press, Malang: 2002)
- Sidharta, B. Arief, *Pengantar Logika Sebuah Langkah Penalaran Medan Telaah*, (Refika Aditama, Bandung: 2008)
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* (Mizan Pustaka, Bandung: 2014)
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 12* (Lentera Hati, Jakarta: 2009)
- Sparringa, Daniel *Pemilu 2004: Taksonomi Tema dan Isu Relevan* dalam M. Cahyono, Faried dan Lambang Trijono (Ed), *Pemilu 2004: Transisi Demokrasi dan Kekerasan*, (CPS UGM, Yogyakarta: 2004)
- Said HA, Fuad, *Ketatanegaraan Menurut Islam* (Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur: 2001)
- Slater, Dan, *Party Cartelization, Indonesian-Style: Presidential Power-Sharing and The Contingency of Democratic Opposition*, Journal of East Asian Studies. Vol. 18, No 1, 2018
- Scalia, Antonin & Bryan A. Garner, *Reading Law: The Interpretation of Legal Texts*, (Thomson/West, United States of America: 2012)

- Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi* (1965)
- Saragih, Bintang R., *Fungsi Perwakilan, Pembuatan Keputusan, dan Pembentukan Legitimasi*, Badan Pendidikan dan Pelatihan Depdagri, Jakarta, 1997
- Sekjen Dephankam, *Materi Demokrasi Pancasila Derivasi dari UUD 1945*, September 1992
- Soemantri, Sri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Alumni, Bandung: 1992)
- Soemantri, Sri, *Kedudukan Lembaga-lembaga Negara dan Hak Menguji Menurut UUD 1945, Cetakan Pertama* (Sinar Grafika, Jakarta: 1987)
- Soemantri, Sri, *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, (Bandung: 1986)
- Siahaan, Maruarar, *Undang-undang Dasar 1945 Konstitusi yang Hidup*, (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitusi, Jakarta, 2008)
- Strong, C.F., *"A History of Modern Political Constitution* (Capricorn Book, Newyork: 1963)
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*, (Jakarta: 1992)
- Schumpeter, Jodeph, *Capitalism, Socialism and Democracy*, (Harpet and Row, New York: 1950)
- Suleman, Zulkifli, *Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta*, (Kompas, Jakarta: 2010)
- Stefanus, Kotan Y., *Perkembangan Kekuasaan Pemerintah Negara (Dimensi Pendekatan Politik Hukum Terhadap Kekuasaan Presiden Menurut UUD 1945)* (Univertas Atmajaya, Yogyakarta: 1998)
- Sabartier, Paul A. dan Hank C Jenskin Smith, (Eds), *Policy Change and Learning*, (Wesrview Press, Boulder, 1993)
- Saidi, *Studi Sosiologi Kultural Dan Historis Tentang Dasar-Dasar Adat Dan Budaya Masyarakat Buton, Bau-bau*, Hasil penelitian Inventarisasi adat dan budaya masyarakat Buton, 2001
- Sanusi, Shalahuddin, *Intregasi Ummat Islam*, (Iqomatuddin, Bandung: 1987)
- Shubhan, Hadi, *"Recal: Antara Hak Partai Politik dan Hak Berpolitik Anggota Parpol"*, Jurnal Konstitusi, Volume 3, Nomor 4 Desember 2006
- S. T., Sulistiyono, *"Multikulturalisme dalam Perspektif Budaya Pesisir"*, Jurnal Agastya , 2015 Vol. 5 (1)
- Slametmulyana, *Nagarakretagama dan Tafsir Sejarahnya* (Bhratara Karya Aksara, Jakarta: 1979)
- Syaltut, Mahmud, *"Al-Islam Aqidah wa Syari'ah"*, (Qahirah, Kairo: 1968)
- Schoorl, Pim, *Masyarakat, Sejarah dan Budaya Buton* (Penerbit Jambatan Bekerjasama dengan Perwakilan KITLV, Jakarta: 2003)
- Tutik, Titik Triwulan, *Pokok-Pokok hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Cerdas Pustaka, cet. 1, Jakarta: 2007)
- Taufiq Asy-Syawi, *Fiqhusy-syura wal-istisyarat*, (Kairo: 1992)
- Tim Penulis, *Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945: Buku 1*, (Sekretariat Jenderal MK-RI, Jakarta: 2008)

- Thompson, Brian, *Textbook on Constitutional Law and Administrative Law*, (Blackstone Press, London: 1997)
- Tim Penulis, *Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945: Buku 1*, (Sekretariat Jenderal MK-RI, Jakarta: 2008)
- Wahidin, Samsul, *MPR RI dari Masa ke Masa* (Bina Aksara, Jakarta: 1986)
- Widisuseno, Iriyanto, *Azas Filosofis Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara* dalam jurnal HUMANIKA Vol. 20 No 2, 2014
- Wheare, K. C., *The Modern Contitution*, (Oxford University Press, 3rd Impression, London-Newyork-Toronto: 1975)
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional : Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia* (Rajawali Press, Jakarta: 1994)
- Wingjosoebroto, Soetandyo, *Penelitian Hukum: Sebuah Tipologi*, Majalah Masyarakat Indonesia, Tahun –I, No. 2, 1974
- Wiratman, Herlambang P., *Pemilu dan Neo Otoritarianisme*, Makalah untuk Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) ke-5, “Tantangan Menjaga Daulat 1 Rakyat dalam Pemilihan Umum” (Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas), Batusangkar, 9-12 November 2018.
- Warburton, Eve, *Jokowi and the New Developmentalism*, Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol 52 No 3, 2016
- Wahono, Untung, *Peran Politik Poros Tengah dalam Kancah Perpolitikan Indonesia* (Pustaka Tarbiatuna, Jakarta: 2003)
- Wikipedia, “*Parlementer System*,” http://en.wikipedia.org/wiki/Parlementary_system,
- Yamin, Muhammad, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid I*, (Prapanca, Jakarta: 1959)
- Yamin, Muhammad, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, (Ghalia Indonesia, Jakarta: 1982)
- Yunus, Abdul Rahim, *Islamic Mysticism in the Buton Sultanate, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara Province, during the 19th century* (Indonesian-Netherlands Cooperation on Islamic Studies, Jakarta: 1995)
- Verney, Douglas V, “*The Analysis of Political System*” (Outlage & Kegan Paul, London: 1979)
- Verney, Douglas V., *Parliamentary Government and Presidential Goverment* (Routledge & Kegan Paul, 1979)
- Poelinggomang, L. Edward, *Makassar Abad XIX* (Jakarta: KPG, 2002)
- Zuhdi, Susanto, *Sejarah Buton yang Terabaikan Labu Rope Labu Wana* (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010)
- Zahari, *Sejarah dan adat fiy darul butuni jilid, I, II, III* (Depdikbud RI, Jakarta: 1977)